

TESIS

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN MELALUI MUSRENBANGDES
(STUDI KASUS KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS)**

**SITTI ASMA
MPW4513027**



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2018**

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN MELALUI MUSRENBANGDES
(STUDI KASUS KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS)**

TESIS

**SITTI ASMA
MPW4513027**



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Magister**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2018**

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari Tanggal :
Tesis Atas Nama : SITTI ASMA
NIM : MPW4513027

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Bosowa untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi **Perencanaan Wilayah dan Kota.**

Ketua : Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si

Sekretaris : Dr. Ir. Syahriar Tato, SH, MH, MM.

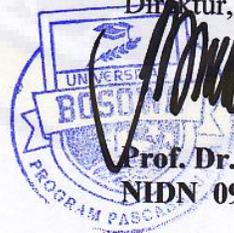
Anggota Penguji : 1. Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S.

: 2. Prof. Dr. Ir. Tommy S.S Eisenring, M.Sc.

(.....)
(.....)
(.....)

Makassar, 2018

Direktur,



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si.
NIDN 0913017402

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Nama : SITTI ASMA

NIM : MPW4513027

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul : Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbangdes (Studi Kasus Kecamatan Mandai Kabupaten Maros) adalah merupakan hasil karya sendiri.

Seluruh ide dan gagasan yang ada dalam Tesis ini adalah merupakan ide dan gagasan saya sendiri, kecuali beberapa referensi dan berbagai sumber, baik media cetak maupun elektronik (internet) serta kutipan dari informan.

Jika pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Universitas Bosowa Makassar.

Makassar,

2018

Mahasiswa,



SITTI ASMA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga penelitian dengan judul "Peran Serta Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Mandai Kabupaten Maros)" dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Komisi Pembimbing, Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si dan Bapak Dr. Ir. Syahriar Tato, SH, MH, MM yang telah meluangkan waktunya untuk membagi ilmu yang bermanfaat dan membimbing kami dari awal sampai akhir dengan sabar, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Terima kasih pula kami persembahkan kepada suami dan anak-anakku tercinta yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan semangat yang memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan keterbatasan, maka saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian ini selanjutnya.

Harapan kami, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga semua bantuan yang telah diberikan dicatat sebagai amal shaleh dan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT, amin.

Makassar, Nopember 2017
Penulis,

SITTI ASMA

ABSTRAK

Sitti Asma, Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbangdes (Studi Kasus Kecamatan Mandai Kabupaten Maros) Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, M.Si dan Dr. Ir. H. Syahriar Tato, SH, MH, MM

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi dan menganalisis partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, serta faktor pendukung dan penghambat perempuan dalam berpartisipasi; 2) menganalisis dan merumuskan strategi peningkatan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan tujuan utama mendeskripsikan secara terperinci dan mendalam mengenai partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan mata untuk melihat partisipasi perempuan, survey, yaitu penyebaran angket/kuesioner, dan dokumentasi, yaitu dengan mempelajari dokumen yang berasal dari desa/kelurahan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan maksud dari penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, dan analisis SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbang Desa/Kelurahan di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros sejauh ini sudah baik dilihat dari kontribusi, pengorganisasian, dan pemberdayaan perempuan. Pemerintah sudah melaksanakan pengarusutamaan gender yang lebih baik yang sesuai dengan keadaan dan aspirasi daerah, berdasarkan tata laksana pemerintahan yang baik, demokratis dan berkeadilan. Kegiatan Musrenbangdes menjadi harapan/peluang untuk melaksanakan strategi PUG yaitu suatu strategi pembangunan yang demokratis, mengakomodasi suara dan aspirasi perempuan dan laki-laki serta berkeadilan bagi perempuan dan laki-laki (*keadilan gender*) dalam berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan. Adapun strategi peningkatan peran serta perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros adalah dengan kebijakan dan pemberdayaan dengan cara memaksimalkan kontribusi perempuan, pengorganisasian perempuan, dan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan Musrenbangdes.

Kata kunci : Partisipasi, Perempuan, Perencanaan Pembangunan, Musrenbangdes.

ABSTRACT

Sitti Asma, Women's Participation in Development Planning Through Musrenbangdes (Case Study of Mandai Sub-district of Maros Regency) Guided by Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, M.Si and Dr. Ir. H. Syahriar Tato, SH, MH, MM.

This research aims to: 1) identify and analyze women's participation in development planning through Musrenbangdes in Sub-district of Mandai Maros Regency, as well as supporting factors and inhibiting women in participating; 2) to analyze and formulate strategies to increase women's participation in development planning through Musrenbangdes in Mandai Sub-district of Maros Regency.

This research was a descriptive quantitative research with the main objective to describe in detail and depth about women participation in Musrenbangdes in Sub Mandai Maros Regency. Technique Data collecting used in this research was participant observation, that was collecting data by using eye to see woman participation, survey, that was spreading of questionnaire / questionnaire, and documentation, that was by studying document coming from village / kelurahan and related literatur with the intent of this study. Data analysis in this research using descriptive statistical analysis, and SWOT analysis.

The results show that: Women's participation in development planning through Musrenbang Desa / Kelurahan in Mandai Sub-district of Maros Regency has been well seen from contribution, organizing and empowering women. The government has implemented better gender mainstreaming in accordance with regional circumstances and aspirations, based on good governance, democratic and just governance. The Musrenbangdes activity becomes the hope / opportunity to implement the PUG strategy that was a democratic development strategy, accommodating the voice and aspirations of women and men as well as justice for women and men (gender equity) in participating and enjoying the development result. The strategy of increasing the participation of women in the consultation of village / kelurahan development planning in Mandai Sub-district of Maros Regency is with the policy and empowerment by maximizing the contribution of women, organizing women, and empowering women in Musrenbangdes activities.

Keywords : Participation, Women, Development Planning, Musrenbangdes.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENERIMAAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.....	11
B. Gender dan Perencanaan Pembangunan	29
C. Partisipasi.....	35

	D. Strategi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Musrenbangdes...	49
	E. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	54
	F. Kerangka Pikir.....	58
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis dan Desain Penelitian.....	60
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	60
	C. Populasi dan Sampel	61
	D. Jenis dan Sumber Data	62
	E. Teknik Pengumpulan Data	63
	F. Variabel Penelitian	64
	G. Teknik Analisis Data	65
	H. Defenisi Operasional Penelitian	65
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Deskripsi Wilayah Penelitian	67
	B. Partisipasi Perempuan Kecamatan Mandai	67
	C. Faktor Pendukung dan Pengambat Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbangdes	82
	D. Peran Serta Perempuan Dalam Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Dilihat dari Karakteristik Penduduk	87
	E. Strategi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pelaksanaan Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros	94

F. Sintesis Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros ..	103
G. Sintesis Strategi Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros	110
H. Temuan Penelitian	115
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	117
B. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

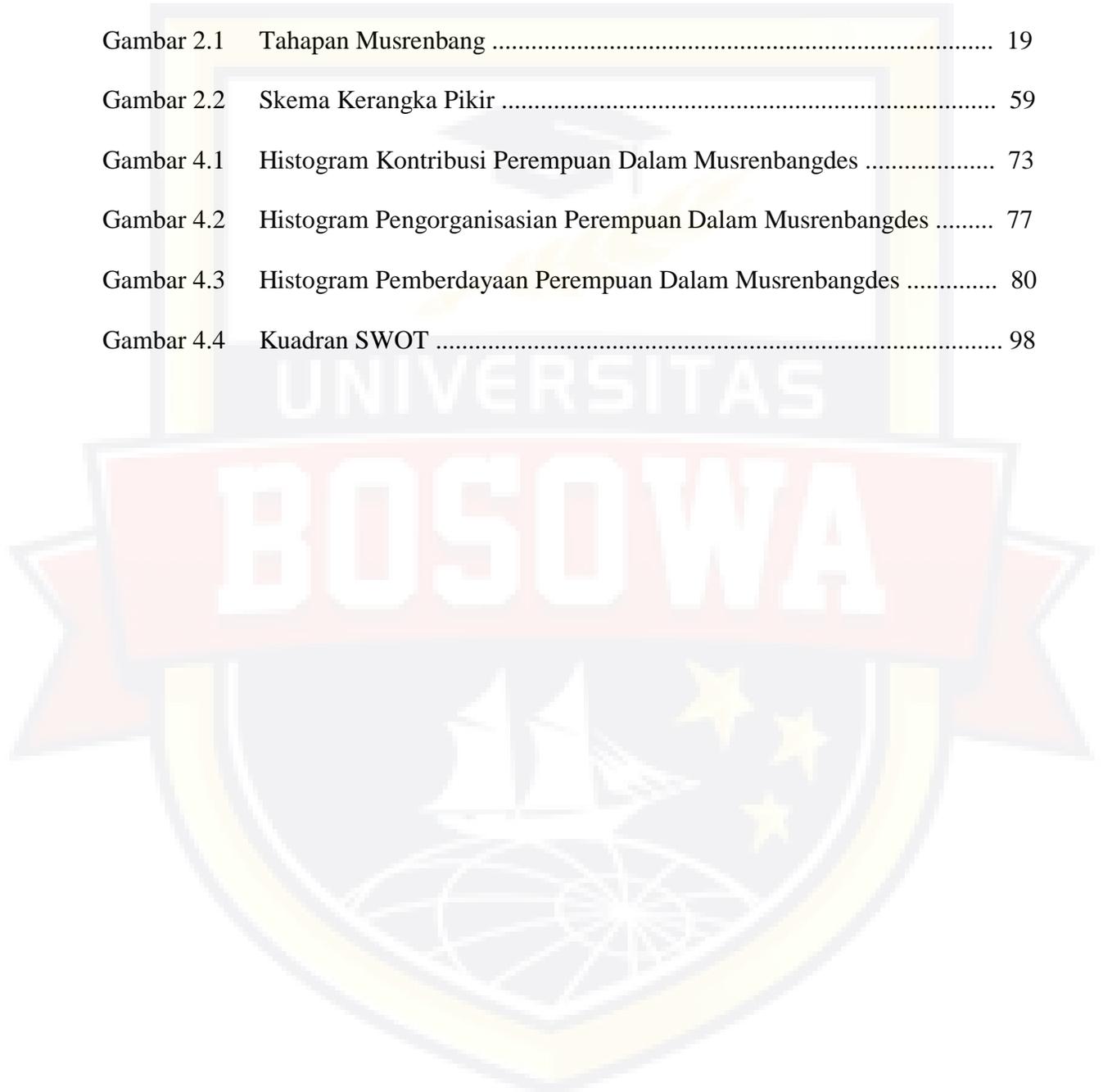
	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Peserta Musrenbangdes di Wilayah Kecamatan Mandai
	Tahun 2015 5
Tabel 3.1	Jadwal Pelaksanaan Penelitian 61
Tabel 3.2	Ukuran Sampel 62
Tabel 4.1	Kriteria Tingkat Peran Serta Perempuan Dalam Musrenbangdes..... 70
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Skor Kontribusi Perempuan Dalam Musrenbangdes 72
Tabel 4.3	Rekapitulasi Usulan Masyarakat Dalam Musrenbangdes Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Tahun 2015 74
Tabel 4.4	Rekapitulasi Usulan Setiap Desa/Kelurahan Dalam Musrenbangdes Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Tahun 2015 75
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi Skor Pengorganisasian Perempuan Dalam Musrenbangdes 76
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Skor Pemberdayaan Perempuan Dalam Musrenbangdes 80
Tabel 4.7	Peran Serta Perempuan Berdasarkan Umur 88
Tabel 4.8	Peran Serta Perempuan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 89
Tabel 4.9	Peran Serta Perempuan Berdasarkan Pekerjaan 90
Tabel 4.10	Peran Serta Perempuan Berdasarkan Penghasilan 92

Tabel 4.11	Peran Serta Perempuan Berdasarkan Lama Bermukim	93
Tabel 4.12	Hasil Analisis SWOT (Faktor Internal)	100
Tabel 4.12	Hasil Analisis SWOT (Faktor Eksternal)	101



DAFTAR GAMBAR

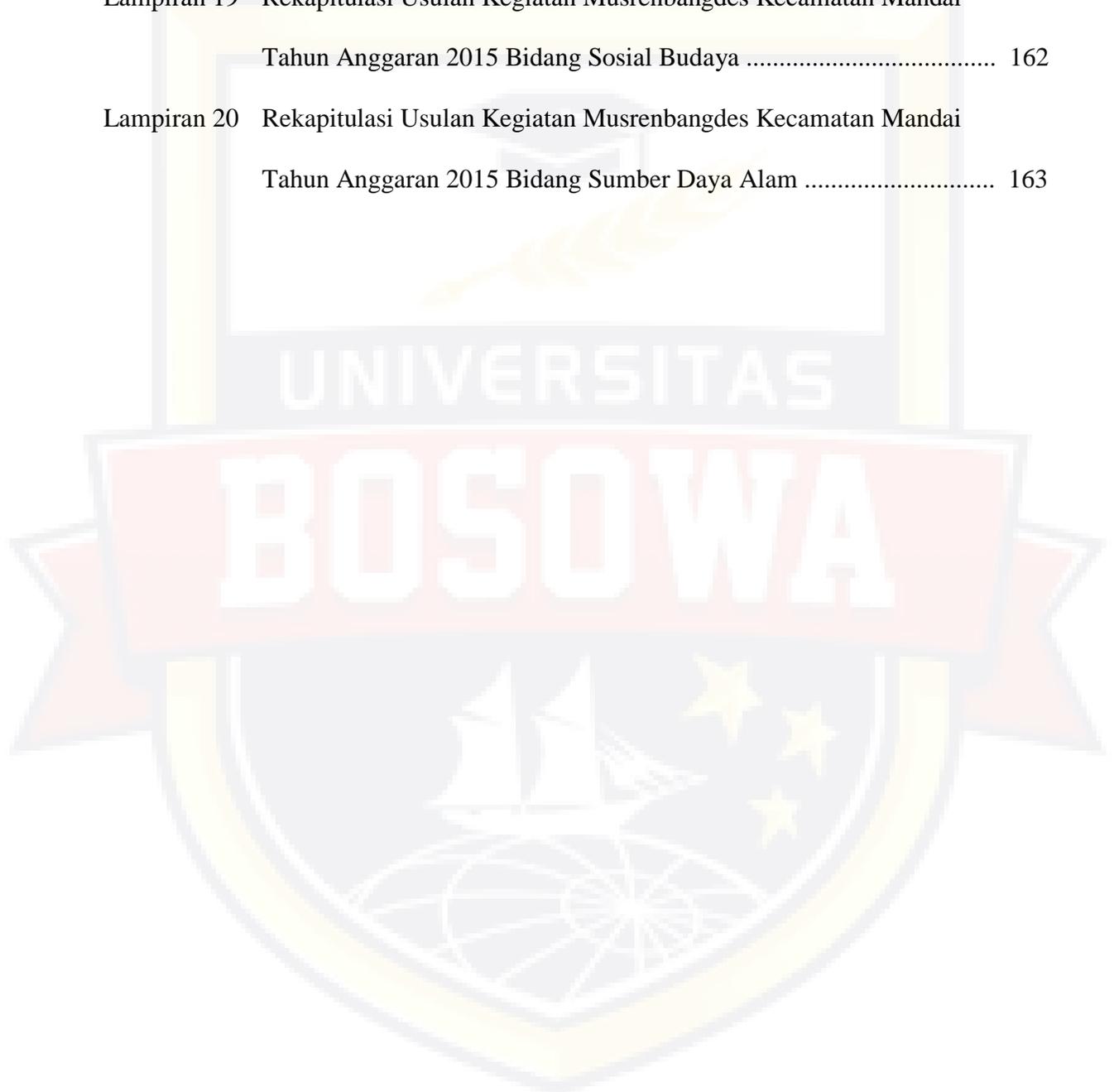
	Halaman
Gambar 2.1 Tahapan Musrenbang	19
Gambar 2.2 Skema Kerangka Pikir	59
Gambar 4.1 Histogram Kontribusi Perempuan Dalam Musrenbangdes	73
Gambar 4.2 Histogram Pengorganisasian Perempuan Dalam Musrenbangdes	77
Gambar 4.3 Histogram Pemberdayaan Perempuan Dalam Musrenbangdes	80
Gambar 4.4 Kuadran SWOT	98



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Koesioner Penelitian 124
Lampiran 2	Koesioner Riset SWOT 128
Lampiran 3	Data Penelitian Kontribusi Perempuan 131
Lampiran 4	Data Penelitian Pengorganisasian Perempuan 133
Lampiran 5	Data Penelitian Pemberdayaan Perempuan 135
Lampiran 6	Hasil Penelitian Kontribusi Perempuan 137
Lampiran 7	Hasil Penelitian Pengorganisasian Perempuan 139
Lampiran 8	Hasil Penelitian Pemberdayaan Perempuan 141
Lampiran 9	Hasil SWOT Kekuatan (S) Penilaian Kondisi Saat Ini 143
Lampiran 10	Hasil SWOT Kelemahan (W) Penilaian Kondisi Saat Ini..... 145
Lampiran 11	Hasil SWOT Peluang (O) Penilaian Kondisi Saat Ini 147
Lampiran 12	Hasil SWOT Ancaman (T) Penilaian Kondisi Saat Ini..... 149
Lampiran 13	Hasil SWOT Kekuatan (S) Penilaian Urgensi 151
Lampiran 14	Hasil SWOT Kelemahan (W) Penilaian Urgensi..... 153
Lampiran 15	Hasil SWOT Peluang (O) Penilaian Urgensi 155
Lampiran 16	Hasil SWOT Ancaman (T) Penilaian Urgensi..... 157
Lampiran 17	Rekapitulasi Usulan Kegiatan Musrenbangdes Kecamatan Mandai Tahun Anggaran 2015 Bidang Sarana dan Prasarana 159

Lampiran 18	Rekapitulasi Usulan Kegiatan Musrenbangdes Kecamatan Mandai Tahun Anggaran 2015 Bidang Ekonomi	161
Lampiran 19	Rekapitulasi Usulan Kegiatan Musrenbangdes Kecamatan Mandai Tahun Anggaran 2015 Bidang Sosial Budaya	162
Lampiran 20	Rekapitulasi Usulan Kegiatan Musrenbangdes Kecamatan Mandai Tahun Anggaran 2015 Bidang Sumber Daya Alam	163



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan isu penting yang tidak pernah berhenti dibahas baik di negara terbelakang, negara berkembang, sampai dengan negara maju. Walaupun konteks yang dibicarakan dan cara yang digunakan mereka berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya tujuan yang diharapkan semua sama, yakni membawa negaranya masing-masing dari keadaan sebenarnya saat ini menuju keadaan normatif yang dianggap lebih baik. Hal ini seperti pendapat Kantz (1971), pembangunan merupakan suatu proses perubahan pokok pada masyarakat dari suatu keadaan nasional tertentu menuju ke keadaan lain yang dianggap lebih bernilai.

Sasaran utama dari pembangunan nasional negara Indonesia adalah perbaikan kualitas hidup masyarakat Indonesia di berbagai bidang. Dari pernyataan tersebut dapat kita artikan bahwa di dalam proses pembangunan tersebut dibutuhkan adanya keterlibatan masyarakat; laki-laki dan perempuan secara serasi, selaras dan seimbang atau dengan kata lain dibutuhkan adanya emansipasi dalam segala bidang dan berupaya meningkatkan status dan kedudukan perempuan dalam semua aspek pembangunan, yang dicantumkan dalam arahan GBHN 1999, UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, serta dalam Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Kesetaraan dan keadilan gender sudah menjadi komitmen gerakan kaum feminisme yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan laki-

laki.. Emansipasi dalam bidang kesempatan kerja berarti perempuan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berperan serta di dalam pembangunan dan dalam mengembangkan keberadaan kehidupan pribadinya.

Untuk mencapai keberhasilan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diuraikan oleh pendapat Conyers dalam Irma Purnamasari (2008) yang lebih lanjut mengemukakan tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan agar setiap daerah wajib melaksanakan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai rencana tahunan daerah.

Musrenbang merupakan forum menjaring aspirasi masyarakat yang diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Musrenbang juga sebagai salah satu wadah silaturahmi antar masyarakat dengan pemerintah, untuk mendapatkan keserasian antara kebijakan pembangunan yang ada serta untuk menjaring semua pemangku kepentingan. Dengan adanya Musrenbang diharapkan tidak ada kegiatan-kegiatan pembangunan yang tumpang tindih yang mengakibatkan sumber daya pembangunan yang terbatas tidak teralokasikan dengan optimal dan tidak ada aspirasi masyarakat yang terabaikan.

Proses Musrenbang yang menganut pendekatan *bottom-up* harus melibatkan partisipasi masyarakat dari semua golongan, laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, Musrenbang akan menghasilkan rancangan pembangunan yang sesuai kehendak dan kebutuhan masyarakat, terutama perempuan.

Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang merupakan isu yang sudah diwacanakan oleh gerakan perempuan (feminis) sejak beberapa tahun lalu. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan yakni memastikan partisipasi dan suara perempuan masuk dalam rencana pembangunan baik dari tingkat lokal hingga tingkat nasional. Oleh karena, kita menyadari bahwa partisipasi dan suara kelompok perempuan masih sangat terbatas karena berbagai hal. Persoalan budaya, politik, kebijakan dan kesempatan adalah beberapa hal yang menjadikan mengapa partisipasi perempuan sangat rendah dalam perencanaan pembangunan. Selama ini, pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa, belum mengakomodir dan memperhatikan kebutuhan perempuan. Keterlibatan

perempuan dalam Musrenbang hanya formalitas tanpa pernah diberi kesempatan bersuara atau didengar suaranya.

Peraturan yang tegas mensyaratkan keterwakilan perempuan dalam Musrenbang adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa di mana Pasal 10 Ayat 2k berbunyi: penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dari peserta musrenbang desa untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan menegaskan pentingnya partisipasi perempuan dalam Musrenbang. Pasal ini menjelaskan daftar nama Tim Delegasi kelurahan/desa yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan (3 orang atau 5 orang, bila 3 orang, minimal 1 orang perempuan, bila 5 orang minimal 2 orang perempuan).

Demikian pula di dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang telah disebutkan bahwa keterwakilan unsur perempuan diupayakan minimal 30 % dari jumlah keseluruhan peserta. Peran serta perempuan dalam kegiatan Musrenbangdes/kel di Kecamatan Mandai berdasarkan data selama tiga tahun terakhir, menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan masih di bawah 30 %.

Untuk melihat tingkat peran serta perempuan dalam Musrenbangdes/kel di Kecamatan Mandai pada Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1.1
Jumlah Peserta Musrenbangdes di Wilayah Kecamatan Mandai Tahun 2015

NO.	DESA/KEL.	ELEMEN PESERTA PEREMPUAN				LAKI-LAKI	JUMLAH
		STAF KEC.	STAF DS./KEL.	ANGG. PKK	TOKOH PEREMP.		
1	PATTONTONGAN	1	1	7	1	29	39
2	BAJI MANGNGAI	-	1	4	1	21	27
3	TENRIGANGKAE	-	1	2	-	30	33
4	BONTO MATENE	1	1	4	1	21	28
5	BONTOA	2	6	2	2	31	43
6	HASANUDDIN	-	2	2	1	19	24

Sumber : Daftar hadir di setiap desa/kelurahan

Dari tabel di atas menunjukkan prosentase dari peserta laki-laki dan perempuan di dalam Musrenbangdes Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, terlihat adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan untuk prosentase minimal 30 % seperti yang tertulis di dalam peraturan formalnyapun tidak terpenuhi.

Partisipasi perempuan di Kecamatan Mandai dalam kegiatan Musrenbangdes/kel menunjukkan bahwa peran serta mereka belum memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, keterlibatan perempuan masih di bawah ketentuan yaitu 30 %, sedangkan secara kualitatif peran serta perempuan masih kurang dalam memberikan aspirasi dan pendapat mereka dalam kegiatan Musrenbangdes/kel, ini terlihat dari usulan yang kebanyakan hanya mengenai fisik saja dan kurangnya usulan kegiatan yang menyangkut kepentingan perempuan.

Kebijakan yang mengatur perencanaan pembangunan melalui Musrenbang, tidak otomatis membuka ruang partisipasi bagi perempuan, karena tak dilaksanakan secara

konsisten dan konsekuen oleh Pemerintah Daerah. Dalam Musrenbang di berbagai tingkatan, keterlibatan perempuan sangat rendah dan biasanya perwakilan masyarakat yang terlibat didominasi laki-laki. Sebagian besar perempuan tak memperoleh informasi dan kesempatan terlibat dalam Musrenbang. Akibatnya, kepentingan perempuan tidak ada dalam rencana pembangunan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Peran mereka juga masih minim dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, implementasi, menikmati hasil pembangunan, hingga evaluasi pembangunan. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan jauh dari kepentingan strategis dan kebutuhan praktis perempuan.

Banyak persoalan yang dihadapi perempuan, khususnya kalangan perempuan akar rumput, baik dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan sosial budaya. Realitas yang ada masih menunjukkan kesenjangan bagi perempuan dalam bidang-bidang tersebut sebagai hak dasar warga. Juga masih rendah partisipasi perempuan dalam segala bidang. Masalah tersebut berakar pada kuatnya nilai patriarkhal yang ada di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pattiro dan Fitra menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan hampir di semua daerah (Murenbangdes/kel, Musrenbangcam, Musrenbangkab dan Musrenbangkot), setidaknya memiliki tiga masalah utama (Kalyanamitra, 2011). Masalah pertama, rendahnya persentase tingkat akomodasi usulan masyarakat dalam musrenbang di APBD. Masalah kedua, peserta dalam Musrenbang tidak representatif. Misalnya, dalam Musrenbangdes/kel, mayoritas pesertanya adalah pengurus RT dan

RW yang masih dalam kendali kelurahan. Hal ini mengakibatkan Musrenbang tinggal ketok palu. Masalah ketiga, rendahnya partisipasi perempuan.

Kondisi demikian harusnya disikapi secara baik oleh pemerintah. Persoalan di masyarakat seyogyanya direspon dengan program-program yang tepat sesuai kebutuhan mereka, terutama kaum perempuan, kelompok miskin dan kalangan terpinggirkan. Hal itu dapat terjadi bila kelompok perempuan dilibatkan dalam rencana pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Dari uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes, faktor pendukung dan penghambat partisipasi perempuan, serta strategi peningkatan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Sejauhmana partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros serta faktor pendukung dan penghambat perempuan dalam berpartisipasi ?.
2. Bagaimana strategi peningkatan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros ?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, serta faktor pendukung dan penghambat perempuan dalam berpartisipasi.
- b. Menganalisis dan merumuskan strategi peningkatan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan/manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan serta kepustakaan untuk penelitian sejenis.
- b. Meningkatkan pengetahuan bersama tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka penyusunan strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

- b. Sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Pasca Sarjana Universitas Bosowa Makassar.
- c. Menambah wawasan pembaca tentang partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Substansi

Fokus penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tingkat peran serta perempuan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat desa/kelurahan.

Adapun substansi dalam penelitian ini dibatasi pada :

- a. Partisipasi perempuan dalam studi ini adalah peran aktif perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbang desa/kelurahan.
- b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan tahunan pada tingkat desa/kelurahan untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil Musyawarah Warga dan Musyawarah Khusus Perempuan. Untuk memudahkan substansi penulisan maka selanjutnya untuk menyebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah dengan Musrenbangdes.
- c. Partisipasi perempuan dalam penelitian ini dibatasi hanya perempuan yang pernah mengikuti kegiatan Musrenbangdes.

2. Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dengan luas wilayah $\pm 49,11 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk 36.606 jiwa yang terdiri dari laki-

laki 18.296 jiwa dan perempuan 18.310 jiwa. Memiliki 4 (empat) desa dan 2 (dua) kelurahan, yaitu Desa Tenrigangkae, Desa Pattontongan, Desa Bonto Mate'ne, Desa Baji Mangngai, Kelurahan Bontoa, dan Kelurahan Hasanuddin.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

1. Desa

Desa menurut Sutardjo Kartohadikusumo dalam Bintarto (1989:13) adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian desa dalam pandangan The Liang Gie dalam Bintarto (1989:13) adalah sebagai daerah otonom tingkat terbawah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah pengertian desa sebagaimana yang tertera dalam pasal 1 ayat (5) PP No. 72 Tahun 2005,

Definisi lain mengenai desa berangkat dari desa sebagai permukiman yaitu suatu tempat atau daerah di mana penduduk berkumpul dan hidup bersama di mana mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka (Daldjoeni,1998).

Sedangkan menurut Bintarto (1989:11) desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu ujud kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang saling berinteraksi unsur-unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, desa dapat diartikan sebagai permukiman manusia yang letaknya di luar kota yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.

Desa sebagai kesatuan masyarakat memiliki tiga unsur : (Bintarto, 1989:13)

- a. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas, dan batas, yang merupakan lingkungan geografi setempat.
- b. Penduduk, adalah yang meliputi jumlah penduduk, penambahan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian penduduk desa setempat.
- c. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa, jadi menyangkut seluk-beluk kehidupan masyarakat desa.

Maju mundurnya desa tergantung pada tiga unsur ini yang dalam kenyataan ditentukan oleh faktor usaha manusia (*human effort*) dan tata geografi (*geographical setting*). Ada desa dengan sumber daya yang besar tetapi semangat membangun, keterampilan, dan pengetahuan masyarakatnya kurang, sehingga desa tersebut tak dapat maju. Sebaliknya ada desa yang meski sumber dayanya serba terbatas, tetapi dapat maju ekonominya, berkat kemampuan penduduknya mengatasi berbagai hambatan alam yang dipengaruhi oleh unsur-unsur geografis wilayah yang ditempati.

2. Musyawarah

Musyawarah berasal dari kata Syawara yaitu berasal dari Bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata Negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah

dikenal dengan sebutan “syuro”, “rembug desa”, “kerapatan nagari” bahkan “demokrasi”. Kewajiban musyawarah hanya untuk urusan keduniawian. Jadi musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Musyawah>).

Musyawah adalah suatu proses melakukan pembahasan terhadap masalah tertentu yang dihadapi oleh sekelompok orang. Tujuan musyawarah adalah untuk mencapai keputusan yang dapat berpengaruh bagi kepentingan bersama. (<http://jendela-catatan.blogspot.com/2014/04/definisi-musyawah-mencapai-mufakat.html>).

Jadi musyawarah adalah suatu proses pembahasan dengan cara berunding yang dilakukan untuk meraih kesepakatan dan solusi bagi kepentingan bersama.

Musyawah mufakat bisa dikatakan sebagai suatu warisan dari budaya nenek moyang Indonesia yang memiliki prinsip. Prinsip tersebut diharuskan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan musyawarah mufakat untuk tercapainya solusi atas masalah bersama. Prinsip berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh semua peserta dalam musyawarah mufakat :

- b. Dalam menyampaikan pendapat harus dilakukan dengan baik dan santun dari segi sikap, bahasa atau gerak tubuh. Sikap santun dapat mengurangi ketersinggungan orang lain apabila ada perbedaan pendapat.
- c. Menghargai dan tidak menganggap remeh pendapat orang lain dengan mendengarkan secara keseluruhan sehingga mengetahui substansi pendapat orang lain.

d. Jika hasil mufakat tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita harus tetap menerimanya dengan sabar dan ikhlas. Selain itu kita harus melaksanakan putusan hasil mufakat tersebut dengan tanpa keraguan meskipun bukan pendapat kita yang diterima.

3. Perencanaan

Perencanaan menurut Achmad Djunaedi (2012:2) adalah penyusunan serangkaian strategi, program dan tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang diprediksikan akan terjadi di masa depan. Pemahaman ini diperkuat oleh Bayer dkk. dalam Achmad Djunaedi (2012), bahwa perencanaan itu terkait masa depan, terkait tempat dan untuk membantu kita membuat keputusan.

Perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat suatu rencana tindakan, artinya menentukan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dan di mana hal itu dilakukan, Moekijat dalam Robinson Tarigan (2005:4). Sudut pandang yang berbeda tentang perencanaan dikemukakan oleh Friedman. Menurut Friedman dalam Robinson Tarigan (2005:4) perencanaan adalah cara berpikir mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa depan. Sasaran yang dituju adalah keinginan kolektif dan mengusahakan keterpaduan dalam kebijakan dan program. Friedman melihat perencanaan memerlukan pemikiran yang mendalam dan melibatkan banyak pihak sehingga hasil yang diperoleh dan cara memperoleh hasil itu dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini berarti perencanaan harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Conyers & Hills (1994) dalam Robinson Tarigan (2005:5) berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-

keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuantujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Widjojo Nitisastro dalam Robinson Tarigan (2005:5) memberikan penekanan yang berbeda yang hampir mirip dengan Friedman. Menurutnya perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal, pertama ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan, dan yang kedua ialah pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Widjojo Nitisastro sangat menekankan tentang perlunya diperhatikan nilai yang dimiliki masyarakat dalam proses perencanaan tersebut, yang berarti masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengertian perencanaan yang lebih sederhana dikemukakan oleh Handoko (2003), perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, perencanaan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyusun serangkaian strategi, program dan tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang diprediksikan akan terjadi di masa depan, memerlukan pemikiran yang mendalam dan melibatkan banyak pihak, memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung sehingga perencanaan itu merupakan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat.

Proses perencanaan merupakan suatu prosedur dan tahapan dari perencanaan yang dilaksanakan. Pada kegiatan Musrenbangdes/kel, perencanaan dilakukan atas

dasar prinsip “*Top-Down Planning*” dan “*Bottom-Up Planning*”. Perencanaan dengan menggabungkan kedua prinsip di atas adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan program yang diinginkan oleh masyarakat yang merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat sehingga peran antar satu dan keduanya saling berkaitan.

4. Perencanaan Pembangunan Desa

Sebelum mendefinisikan perencanaan pembangunan perlu dipahami dahulu makna pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Kartasmita, 1994), selain itu pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 1994).

Perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses di mana tujuan-tujuan, bukti-bukti faktual dan asumsi-asumsi diterjemahkan sebagai suatu proses argumen logis ke dalam penerapan kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan (Rose, 1994). Perencanaan diartikan sebagai perwujudan kebutuhan dasar dari penduduk asli (Friedmann, 1987).

Perencanaan pembangunan merupakan kegiatan hampir sama dengan riset/penelitian, dikarenakan instrumen yang digunakan adalah metode-metode riset. Kejadiannya berawal dari teknik pengumpulan data, analisis data sampai dengan studi lapangan untuk memperoleh data-data yang akurat. Data lapangan sebagai data penting dan utama yang akan dipakai dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan

alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental/spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. (Bratakusumah, 2004).

Proses perencanaan pembangunan dimulai dengan rencana pembangunan atau mungkin hanya dengan formulasi kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kemudian diikuti dengan berbagai langkah-langkah kegiatan formulasi rencana dan implementasinya, dapat diusahakan rencana itu bersifat realistis dan dapat menanggapi masalah-masalah yang benar-benar dihadapi.

Dari beberapa definisi perencanaan pembangunan di atas dapat diambil makna tentang apa yang dimaksud dengan perencanaan, pembangunan dan tahap-tahap yang ada di dalamnya. Kemudian hubungannya dengan konsep pembangunan desa sebagai tempat proses perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/desa dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi

yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang teguh pada azas skala prioritas (Bratakusumah,2004).

5. Musrenbangdes

a. Pengertian

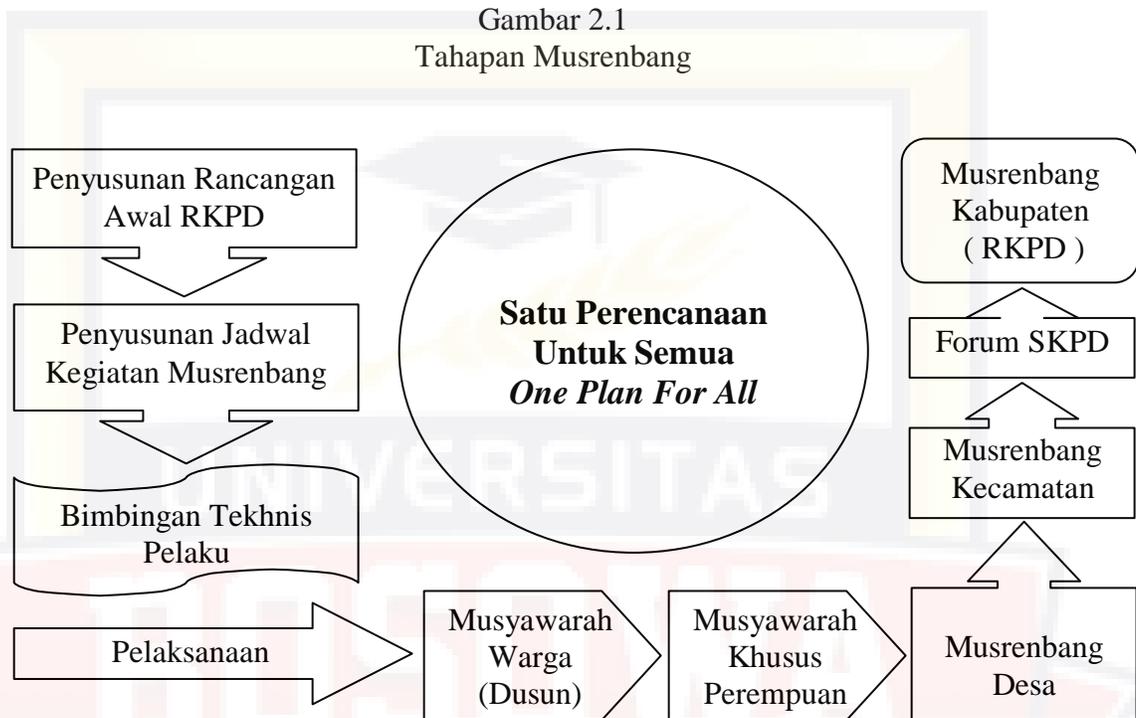
Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan tahunan tingkat desa/kelurahan untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil Musyawarah Warga dan Musyawarah Khusus Perempuan yang telah dilaksanakan, serta membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan yang akan disampaikan ke Musrenbang Kecamatan. Musrenbangdes merupakan forum dialogis antara Pemerintah Desa/Kelurahan dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dibutuhkan dan merupakan prioritas untuk mengatasi permasalahan di wilayah desa/kelurahan.

Musrenbang Kabupaten Maros, dilaksanakan melalui tahapan proses (alur) sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
2. Penyusunan Jadwal Kegiatan Musrenbang
3. Bimbingan Tekhnis Pelaku .
4. Pelaksanaan Musrenbang :
 - a. Musyawarah Warga (Dusun)
 - b. Musyawarah Khusus Perempuan
 - c. Musrenbang Desa
 - d. Musrenbang Kecamatan
 - e. Forum SKPD

f. Musrenbang RKPD Kabupaten

Tahapan tersebut digambarkan, dengan bagan alur sebagai berikut :



Sumber : Juknis Musrenbang Kabupaten Maros

b. Tujuan Musrenbangdes

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah :

- 1) Tujuan umum, mendorong partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat Desa/Kelurahan.
- 2) Tujuan khusus :
 - a) Menampung dan membahas usulan Muswar dan Musyawarah Khusus Perempuan.
 - b) Menetapkan usulan yang akan di danai oleh APB Desa (ADD/Stimulan, PADes dll)

- c) Menetapkan usulan kegiatan yang akan diajukan pada Musrenbang Kecamatan
- d) Menetapkan Delegasi Musrenbang Desa/Kelurahan yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan.

c. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Dilaksanakan pada Minggu ke III dan IV Bulan Januari setiap Tahun Anggaran dan dilaksanakan di wilayah Desa/Kelurahan (tempat yang disepakati).

d. Peserta, Narasumber dan Fasilitator

Adapun peserta dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah :

- 1) Unsur Pemerintahan Kecamatan
- 2) Unsur Pemerintahan Desa/Kelurahan
- 3) Aparat Desa/Kelurahan
- 4) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat /Perwakilan BPD (Badan Perwakilan Desa)
- 5) Delegasi dari Dusun/Lingkungan yang berjumlah 5 (lima) orang (termasuk 2 Perempuan) setiap dusun/lingkungan
- 6) Tokoh masyarakat
- 7) Kelompok profesi
- 8) Organisasi Masyarakat Sipil di tingkat Desa/Kelurahan.
- 9) Kelompok Usaha Kecil (sektor Informal)

Narasumber dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah :

- 1) Bappeda
- 2) Camat/Aparat Kecamatan mengulas kegiatan tahun lalu.
- 3) Kepala Desa/Lurah

Sedangkan Fasilitator dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan atau Masyarakat Sipil yang terlatih.

e. Penyelenggara Musrenbangdes

Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan adalah Kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah, yang terdiri dari :

- 1) Kepala Desa/Lurah sebagai Penanggung Jawab Kegiatan;
- 2) Sekertaris, dipilih dari unsur Desa/Kelurahan
- 3) Fasilitator, dari Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) atau masyarakat sipil terlatih lainnya.

f. Tugas dan Fungsi Pelaku

- 1) Camat
 - a) Melakukan Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - b) Menjadi Narasumber pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - c) Menerima BAP hasil Musrenbang Desa/Kelurahan tentang kebutuhan prioritas pembangunan tahunan desa/kelurahan.
- 2) BPD/LPM
 - a) Melakukan Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - b) Menjadi Narasumber pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.
- 3) Kepala Desa/Lurah
 - a) Penanggung jawab rangkaian pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.

- b) Bersama aparat Desa/Kelurahan melakukan kompilasi/penyusunan daftar permasalahan Desa/Kelurahan hasil kegiatan Muswar sebagai bahan atau materi persiapan Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - c) Membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - d) Membuka acara Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - e) Memberikan pemaparan tentang pelaksanaan pembangunan Tahun berjalan dan rencana pembangunan Desa untuk 1(satu) Tahun ke depan.
 - f) Menyampaikan daftar usulan kegiatan tahun lalu yang belum terakomodir.
 - g) Menandatangani berita acara hasil Musrenbang Desa/Kelurahan
 - h) Menutup Acara Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - i) Menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Des Tahun rencana.
- 4) Penyelenggara
- a) Menyebarkan undangan keseluruh peserta Musrenbang Desa/Kelurahan
 - b) Menyiapkan Dokumen pendukung (data-data) yang terkait dengan Kondisi Geografis, Sosial, Ekonomi di Desa/Kelurahan.
 - c) Menyiapkan peralatan yang akan di gunakan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - d) Menyiapkan tempat/ruang rapat yang representative.
 - e) Menyediakan konsumsi rapat.
 - f) Membuat daftar hadir dan mencatat jalannya acara.
 - g) Membuat berita acara penetapan (BAP) Musrenbang Desa/Kelurahan.

5) Delegasi dari Dusun/Lingkungan

a) Memberikan Penjelasan, klarifikasi permasalahan, usulan serta solusi dari hasil kegiatan Muswar Dusun/Lingkungan dan Musyawarah Khusus Perempuan.

b) Memberikan masukan/pendapat pada saat pembahasan.

6) Peserta Lainnya

Memberikan saran dan pendapat dalam pembahasan usulan prioritas kegiatan pembangunan di Desa/Kelurahan.

g. Proses Pelaksanaan

1) Tahap Persiapan (Penyiapan Dokumen)

a) Dokumen Daftar gagasan/usulan hasil Musyawarah Warga dan Musyawarah Khusus perempuan.

b) Dokumen RPJM Desa atau Renstra Kelurahan

c) Data Evaluasi Program/Kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan di Desa/Kelurahan bersangkutan.

d) Draft (rancangan awal) Renja SKPD untuk tahun berikutnya, terutama Pendidikan, kesehatan, Koperindag, Pertanian, Pekerjaan Umum; jika belum ada bisa mengacu kepada Renstra SKPD.

e) Profil Desa/Kelurahan

f) Peta Sebaran Kelompok miskin dan pengangguran di wilayah Desa/Kelurahan bersangkutan.

2) Tahap Pelaksanaan

a) Registrasi Peserta

- b) Pembukaan dan penjelasan mekanisme Musrenbang
- c) Pengarahan dari Bappeda tentang rancangan awal RKPD tahun direncanakan.
- d) Pengarahan Camat Tentang Informasi rencana kegiatan pembangunan di Kecamatan dan Evaluasi Program yang telah dilaksanakan pada Tahun sebelumnya.
- e) Pemaparan oleh Kepala Desa/Lurah untuk memberikan pemaparan tentang pelaksanaan pembangunan Tahun berjalan, dan rencana pembangunan Desa/Kelurahan untuk 1(satu) tahun kedepan dan menyampaikan daftar usulan kegiatan tahun lalu yang belum diakomodir.
- f) Pemaparan tentang usulan kegiatan prioritas yang disampaikan oleh Delegasi tiap Dusun/Lingkungan sesuai hasil Muswar.
- g) Pemaparan tentang usulan kegiatan prioritas yang disampaikan oleh Delegasi perempuan sesuai hasil Musyawarah khusus perempuan.
- h) Dilanjutkan dengan pembahasan yang dipimpin oleh tenaga pendukung/fasilitator dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- Membagi peserta kedalam 4 (empat) kelompok, yaitu:
 - Bidang Sosial
 - Bidang Ekonomi
 - Sumberdaya Manusia
 - Bidang Fisik (sarana dan prasarana lingkungan)
 - Masing-masing kelompok membahas setiap usulan hasil Muswar dan Musyawarah khusus Perempuan sesuai kelompok bidang.

o Masing-masing usulan disesuaikan dengan RPJM Desa/Renstra Kelurahan dan Draft Rancangan Awal Renja SKPD.

o Masing-masing kelompok menentukan prioritas usulan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- **Tingkat kebutuhan mendesak**

Kebutuhan tersebut Tidak dapat ditunda dan apabila tidak segera di tangani akan mengganggu aktivitas warga/masyarakat.

- **Tingkat manfaat yang tinggi**

Kebutuhan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak dan jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan munculnya masalah lain.

- **Sumber daya**

Usulan yang di latar belakanginya oleh tersedianya sumber daya dalam jumlah yang cukup banyak.

- **Dampak Lingkungan**

Usulan yang muncul dengan latar belakang bahwa apabila tidak segera diatasi akan mengakibatkan dampak buruk yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya (baik secara fisik maupun sosial)

o Masing-masing kelompok mengidentifikasi usulan kegiatan dan potensi sumber pendanaannya, yaitu :

- Usulan kegiatan yang akan didanai oleh swadaya masyarakat murni
- Usulan kegiatan yang akan didanai oleh APBDes (ADD/dana stimulant, PADes, dll)

- Usulan kegiatan yang akan diajukan ke Musrenbang Kecamatan.
 - Masing-masing kelompok menentukan usulan prioritas yang akan dibawa ke diskusi pleno.
 - i) Secara bersama-sama melakukan diskusi pleno untuk mengidentifikasi prioritas utama dari masing-masing bidang.
 - j) Penentuan 6 (enam) orang delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan yang terdiri Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan 3 (tiga) perempuan.
 - k) Pembacaan Berita Acara agar seluruh peserta Musrenbang mengetahui hasil-hasil Musrenbang Desa.
 - l) Penandatanganan berita acara oleh perwakilan peserta dan kepala Desa/Kelurahan.
 - m) Penutupan oleh Kepala Desa atau Lurah.

h. Batasan Pembahasan

Aspek pembahasan dan batasan program dalam Musrenbangdes meliputi :

- 1) Bidang Sosial
- 2) Sumber daya Manusia
- 3) Bidang Ekonomi
- 4) Bidang Fisik lingkungan (sarana dan prasarana dasar lingkungan).

i. Keluaran (Output)

Yang dihasilkan dari kegiatan Musrenbangdes, adalah Dokumen Berita Acara yang berisikan :

- 1) Usulan yang akan diajukan untuk didanai oleh APBDes.

- 2) Usulan yang akan diajukan untuk didanai oleh Swadaya murni masyarakat
- 3) Usulan yang akan diajukan ke Musrenbang Kecamatan
- 4) RKP Desa.
- 5) Delegasi Desa/Kelurahan yang akan ke Musrenbang Kecamatan.

j. Anggaran (Pendanaan)

Kegiatan ini didanai dari Swadaya, APB-Des atau sumber lain yang tidak mengikat.

MUSYAWARAH KHUSUS PEREMPUAN

a. Pengertian

Musyawarah Khusus Perempuan adalah merupakan pertemuan di tingkat Desa/Kelurahan yang hanya dihadiri oleh perempuan untuk membahas gagasan-gagasan khusus perempuan sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.

b. Tujuan Musyawarah Khusus Perempuan

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Khusus Perempuan adalah :

- 1) Tujuan umum, mendorong partisipasi perempuan pada tingkat paling bawah dalam rangka memperkuat kapasitas dan kemandirian kaum perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 2) Tujuan khusus, menentukan usulan kegiatan yang merupakan apresiasi perempuan, memilih wakil perempuan untuk mengikuti Musrenbang kecamatan, dan memilih perempuan yang terlibat dalam penulisan usulan.

c. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Dilaksanakan di desa sebelum pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan tempat pelaksanaan kegiatan yaitu di Balai Warga atau tempat lainnya.

d. Peserta, Narasumber dan Fasilitator

Adapun peserta dalam kegiatan Musyawarah Khusus Perempuan adalah :

- 1) Wakil-wakil perempuan dari setiap dusun/lingkungan
- 2) Wakil-wakil dari kelompok perempuan yang ada di desa

Narasumber adalah Aparat Desa/Kelurahan, sedangkan fasilitator adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) perempuan atau Masyarakat Sipil yang terlatih (Dalam hal perspektif gender).

e. Tugas dan Fungsi Pelaku

- 1) Kepala Desa/Lurah
 - a) Penanggungjawab/Koordinator pelaksanaan Musyawarah khusus perempuan di desa
 - b) Menjadi Narasumber
 - c) Monitoring pelaksanaan Musyawarah Khusus Perempuan.
- 2) Ketua PKK Desa/Kelurahan (Ketua Pelaksana)
 - a) Pelaksana Musyawarah khusus perempuan.
 - b) Membuat Jadwal dan mengumumkan pelaksanaan Musyawarah khusus perempuan
 - c) Memimpin Musyawarah khusus perempuan
- 3) Sekretaris Musyawarah Khusus Perempuan

Mencatat, merekapitulasi, merangkum dan merumuskan hasil Musyawarah Khusus Perempuan ke dalam format.

4) Fasilitator

Membantu Ketua dan Sekretaris dalam memfasilitasi Musyawarah Khusus Perempuan.

B. Gender dan Perencanaan Pembangunan

1. Pengertian Gender

Istilah Gender pertama kali di perkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasari pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan ciri-ciri fisik biologis. Gender disini yaitu memberikan batasan dan membedakan laki-laki dan perempuan dari ciri-ciri fisik dan biologisnya dengan laki-laki dan perempuan dari aspek kaitannya dengan sosial budaya.

Dalam sejarah ilmu sosial tokoh yang paling berjasa dalam mengembangka istilah dan pengertian Gender adalah Ann Oakley (1972) yang mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia. Sedangkan, menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional):2007 gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung- jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.

Menurut Judith Butler dalam Riant Nugroho (2008) gender merupakan bentuk simbolik dari aksi masyarakat yang mengikuti kebiasaan yang dilakukan. Hillary M. Lips dalam Riant Nugroho (2008) mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap

laki-laki dan perempuan. Sementara H.T. Wilson dalam Riant Nugroho mengartikan gender sebagai dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.

Gender menurut Mansour Fakih adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Sedangkan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia menartikan gender adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya (lak-laki dan perempuan).

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, gender adalah pembagian peran sosial dan tingkah laku (feminin dan maskulin) berdasarkan nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu/zaman, suku/ras/bangsa, budaya, status sosial, agama, negara, ideologi, politik, hukum, dan ekonomi.

Dalam konteks gender, terdapat teori yang melihat perbedaan gender tersebut. Masing-masing teori mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam melihat perbedaan gender.

a. Teori Feminisme

Feminisme berasal dari Bahasa Latin, femina yang berarti memiliki sifat keperempuanan. Feminisme (tokohnya disebut feminis) adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an, mengacu pada teori kesetaraan laki-

laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Secara luas pendefinisian feminisme adalah advokasi kesetaraan hak-hak perempuan dalam segala bidang sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia.

Dalam rangka untuk mengkaji gerakan feminisme dalam perencanaan pembangunan, maka akan diuraikan teori-teori yang berkembang seiring dengan dinamika budaya modern, yaitu :

1. Teori Feminisme Kultural, pada teori ini memusatkan pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat secara kultural, atau bagaimana perempuan berbeda dari laki-laki. Teori ini memandang perbedaan gender berdasarkan karakter dari jenis kelamin. Misalnya saja pada laki-laki lebih bersifat maskulin sedangkan perempuan lebih ke feminin.
2. Teori Peran Institusional, teori ini mengemukakan bahwa perbedaan gender berasal dari perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai latar institusional. Dalam teori ini yang paling menentukan adalah pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Seperti diketahui kebanyakan laki-laki diasumsikan sebagai pekerja kasar, sedangkan perempuan biasanya berada di lingkungan rumah tangga.
3. Teori Analisis Eksistensial dan Fenomenologis, dalam teori ini perempuan dianggap sebagai objek sedangkan laki-laki sebagai subjek, atau laki-laki dijadikan sebagai aktor utama sedangkan perempuan aktor tambahan, sehingga muncullah perbedaan gender diantara keduanya. Teori ini lebih memarginalkan perempuan sehingga derajatnya lebih rendah daripada laki-laki.

b. Teori Kritis

Kata kritis berasal dari kata Yunani *kritikos* yang berarti penilaian atau kearifan. Teori kritis adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora.

Teori Kritis pertama kali didefinisikan oleh Max Horkheimer. Max Horkheimer menggambarkan teori kritis adalah teori sosial berorientasi pada mengkritisi dan mengubah masyarakat secara keseluruhan.

Teori kritis memungkinkan kita membaca produksi budaya dan komunikasi dalam perspektif yang luas dan beragam. Ia bertujuan untuk melakukan eksplorasi reflektif terhadap pengalaman yang kita alami dan cara kita mendefinisikan diri sendiri, budaya kita, dan dunia. Saat ini teori kritis menjadi salah satu alat epistemologis yang dibutuhkan dalam membahas mengenai persamaan gender dalam pembangunan, dimana fokus utama yang dimaksudkan adalah bagaimana melibatkan perempuan di dalam pembangunan seagaimana laki-laki. Hal ini didorong oleh kesadaran bahwa perlu adanya kesepakatan tentang keseimbangan pembagian peran dalam pembangunan, dalam hal ini adalah pembagia peran antara laki-laki dengan peran perempuan. Saat ini, wanita terlalu diberi porsi yang sangat kecil dan termarginalkan karena kemampuannya cenderung untuk diragukan.

2. Gender dan Perencanaan Pembangunan

Gender dan perencanaan pembangunan lebih berkonsentrasi pada perencanaan dan intervensi yang berfokus pada proses pembangunan yang mentransformasikan relasi gender. Tujuannya adalah membuat perempuan mampu berpartisipasi secara

setara dengan laki-laki dalam menentukan masa depan bersama. Maka dari itu pendekatan kesetaraan gender adalah mengenai laki-laki dan perempuan dan merupakan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menganalisis dan merencanakan intervensi pembangunan karena mempertimbangkan situasi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender bertujuan melibatkan laki-laki dan perempuan dalam menyikapi permasalahan mereka terkait pembangunan, mereformasi lembaga-lembaga untuk membangun hak-hak dan peluang yang setara, serta mendorong perkembangan ekonomi yang menguatkan kesetaraan partisipasi. Pendekatan semacam itu bertujuan untuk memperbaiki kesenjangan yang terus ada terkait akses terhadap sumber daya alam dan kemampuan untuk mengemukakan pendapat.

Apabila dibayangkan, hubungan antara gender dengan perencanaan pembangunan terasa masih membingungkan. Padahal, bagaimanapun metode dan konsep pembangunan pasti akan diikuti atau berpengaruh pada kehidupan baik spesifik pada laki-laki, perempuan, atau keduanya. Oleh karena itu, pembahasan gender dengan perencanaan pembangunan bukanlah hal yang dapat diapresiasi dengan sikap skeptis. Isu gender merupakan suatu isu yang menuntut keadilan konstruksi sosial maupun kultural antara kaum laki-laki dengan perempuan. Dalam tuntutan konstruksi ini, keseimbangan fungsi, status, dan hakekat antar jenis kelamin diharapkan dapat direalisasikan. Sebaliknya, pembangunan merupakan suatu konstruksi perubahan yang terjadi di masyarakat dari kondisi sosio-kultural tertentu menuju ke arah sesuatu yang dianggap lebih bernilai. Selain itu dapat juga diartikan sebagai usaha pengentasan keterbelakangan. Oleh karena itu, gender dan perencanaan pembangunan adalah suatu korelasi timbal balik antara satu dengan yang lain.

Kesejahteraan merupakan tujuan utama dari adanya pembangunan. Substansi dari kesejahteraan salah satunya dengan adanya keadilan. Keadilan sendiri bukanlah hal yang dapat dengan mudah diperhitungkan secara matematis.

Melihat fakta yang ada selama ini, memang dapat dirasakan bahwa pembangunan yang dilakukan hanyalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak kapitalis. Kesejahteraan yang menjadi tujuan utama dari pembangunan dirubah menjadi unsur pembangunan. Pembangunan sampai dewasa ini lebih meningkatkan dari segi infrastruktur dan ekonomi. Sektor keseimbangan dalam hal ini gender kurang diperhatikan. Hal ini disebabkan bahwa terdapat suatu penyimpangan dalam konsep pembangunan. Pembangunan yang terjadi hanya sedikit yang berlandaskan untuk kesejahteraan dan kebanyakan pembangunan akan terus digencarkan guna mengikuti dan menyamai perkembangan zaman bangsa-bangsa yang sudah maju. Mungkin, logika seperti ini dapat menjadi salah satu kritik atas pembangunan di daerah-daerah.

Isu gender dalam perencanaan pembangunan, datang ke daerah tepat waktu dan tepat asas, tetapi berpotensi luput menggunakan kesempatan. Tepat waktu, karena instruksi mengharuskan semua sektor pembangunan di tingkat nasional maupun daerah untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam keseluruhan proses perencanaan (Inpres No. 9 Tahun 2000) datang bersamaan dengan adanya pergeseran dari pendekatan yang sentralistik ke pendekatan yang desentralistik yang dibawa oleh Otonomi Daerah.

Dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah di Indonesia, maka sejumlah kekuasaan dan tanggung-jawab berada di tangan pemerintah daerah, terutama di tingkat kabupaten/kota. Kesempatan besar itu sekaligus merupakan tantangan luar biasa bagi daerah. Karena daerah diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk

melakukan terobosan-terobosan, melalui program/kegiatan pembangunan termasuk pelaksanaan pengarusutamaan gender yang lebih cocok dengan keadaan dan aspirasi daerah.

Tepat asas, karena dengan maraknya semangat reformasi yang berasaskan tatalaksana pemerintahan yang baik, demokratis dan berkeadilan, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat menjadi peluang, sebagai '*entry point*' yang instrumental untuk melaksanakan strategi PUG yaitu suatu strategi pembangunan yang demokratis, mengakomodasi suara dan aspirasi perempuan dan laki-laki serta berkeadilan bagi perempuan dan laki-laki (*keadilan gender*) dalam berpartisipasi dan menikmati (hasil) pembangunan dan pada gilirannya mencapai kesetaraan seperti terukur dalam berbagai kualitas hidupnya termasuk hubungan sosial di antara keduanya (*kesetaraan gender*).

C. Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijakan hingga pelaksanaan program. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung berupa keuangan, pemikiran dan material yang diperlukan (Wibisana dalam Uwes Qoroni, 2005).

Partisipasi menurut Sastropetro (1995) dalam Azis Turindra adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya.

Verhangen (1979) dalam Azis Turindra menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Sedangkan Theodorson dalam Azis Turindra mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditunjukkan oleh yang bersangkutan.

Rumusan FAO yang dikutip Mikkelsen dalam Irma Purnamasari (2008) menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri dalam rangka pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka dengan cara memantapkan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek, agar mereka memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial yang ditimbulkan dengan keberadaan proyek tersebut.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi dalam Saca Firmansyah (2009) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut Moeljarto Tjokrowinoto dalam Sri Ekawati, partisipasi adalah penyertaan mental dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok, yang mendorong mereka untuk menyumbangkan ide, pikiran, dan perasaan yang terciptanya tujuan bersama-sama bertanggung jawab terhadap tujuan tertentu.

Adisasmita (2006) dalam Anggita mengemukakan partisipasi masyarakat sebagai pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam penyusunan perencanaan dan implementasi program atau proyek pembangunan dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan.

Defenisi partisipasi juga dikemukakan oleh Loekman (1995) dalam Anggita bahwa partisipasi merupakan kerja sama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil yang dicapai. Menurut Hetifah Sj Sumarto (2003) dalam Anggita, partisipasi sebagai keterlibatan warga dalam pembuatan keputusan mengenai penggunaan sumber daya publik dan pemecahan masalah publik untuk pembangunan daerahnya.

Sedangkan Mikkelsen dalam Saca Firmansyah (2009) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- b. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
- c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
- d. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;

- e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Partisipasi/peran serta masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang memandang masyarakat dalam konteks dinamis yang mampu memobilisasi sumber daya sesuai dengan kepentingan, kemampuan dan aspirasi yang dimiliki, baik secara individu maupun komunal (Hall dalam Uwes Qoroni, 2005).

Kemudian Oakley dalam Dika (2011) memberi pemahaman tentang konsep partisipasi, dengan mengelompokkan ke dalam tiga pengertian pokok, yaitu Partisipasi sebagai kontribusi; Partisipasi sebagai organisasi; dan Partisipasi sebagai pemberdayaan.

Mengadaptasi landasan teori dari Oakley, disusun definisi konseptual variabel partisipasi perempuan adalah keterlibatan langsung perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes yang meliputi kontribusi perempuan, pengorganisasian perempuan dan pemberdayaan perempuan.

Dari definisi konseptual tersebut diperoleh 3 (tiga) dimensi kajian, yakni Dimensi Kontribusi Perempuan, Dimensi Pengorganisasian Perempuan, dan Dimensi Pemberdayaan Perempuan.

Dimensi Kontribusi Perempuan dijabarkan menjadi indikator-indikator : Kontribusi Pemikiran, Kontribusi Dana, Kontribusi Tenaga, dan Kontribusi Sarana.

Dimensi Pengorganisasian Perempuan dijabarkan menjadi indikator-indikator : Model Pengorganisasian, Struktur Pengorganisasian, Unsur-unsur Pengorganisasian, dan Fungsi Pengorganisasian.

Dimensi Pemberdayaan Perempuan dijabarkan menjadi indikator-indikator : Peran Perempuan, Aksi Perempuan, Motivasi Perempuan, dan Tanggung jawab Perempuan.

Dari berbagai pengertian di atas, maka pengertian peran serta dalam penelitian ini adalah ikut ambil bagian atau keikutsertaan, keterlibatan aktif perempuan memberikan kinerjanya untuk berkontribusi dalam kegiatan Musrenbangdes baik langsung maupun tidak langsung dan dilakukan secara sadar, sukarela, tanpa ada unsur paksaan, dan dengan tanggung jawab dalam memberikan kontribusi sumber daya yang dimilikinya.

1.1 Partisipasi Sebagai Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution* yang berarti tindakan atau materi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontribusi bisa diartikan sebagai uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya) atau sumbangan. Secara lebih umum, kontribusi bermakna peran kita dalam keikutsertaan terhadap sesuatu. Kontribusi juga bisa diartikan sebagai keikutsertaan, melibatkan diri, atau memberi sumbangan (baik uang, tenaga, maupun pikiran).

Menurut Dany H, Yandianto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan kontribusi sebagai bentuk iuran uang atau dana pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya. Sedangkan T. Guritno, menurutnya kontribusi adalah sumbangan

yang diberikan seseorang sebagai upaya membantu kerugian atau membantu kekurangan terhadap hal yang dibutuhkan.

Jadi pengertian kontribusi dalam penelitian ini adalah pemberian bantuan berupa uang, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama.

1.2 Partisipasi Sebagai Organisasi

Organisasi berasal dari Bahasa Yunani: *ὄργανον*, *organon* yaitu suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi berarti kesatuan yang terbentuk karena penggabungan dari beberapa orang dan sebagainya dalam suatu perkumpulan yang mempunyai tujuan tertentu.

Menurut Stephen P. Robbins organisasi adalah entitas sosial yang terkoordinir secara sengaja dan memiliki batasan yang mampu dipahami serta bergerak berdasarkan acuan yang berjalan sepanjang waktu dalam rangka meraih tujuan bersama. Chester L Bernard mengartikan organisasi adalah rangkaian kerjasama yang tersistem dan dilaksanakan oleh 2 orang ataupun lebih.

Organisasi menurut Stoner adalah pola yang saling berkaitan dimana sumberdaya manusia yang berada di dalamnya diarahkan oleh manajer untuk mencapai tujuan bersama. James D. Mooney memberikan pemahaman bahwa organisasi adalah segala bentuk perkumpulan dalam rangka peraihian tujuan bersama.

Sedangkan organisasi menurut Thompson adalah suatu kerjasama yang terintegrasi antara anggota yang rasional dan sesuai keadilan untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang telah diketahui bersama.

Dari beberapa pengertian di atas, organisasi adalah tempat atau wadah bagi orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, lingkungan, sarana, parasarana, data, dan lain sebagainya) yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

1.3 Partisipasi Sebagai Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat menurut wikipedia Bahasa Indonesia adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007).

Menurutnya, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu, penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.

Pemberdayaan berasal dari penerjemahan bahasa Inggris "*empowerment*" yang juga dapat bermakna "pemberian kekuasaan" karena power bukan sekedar "daya", tetapi juga "kekuasaan", sehingga kata "daya" tidak saja bermakna "mampu", tetapi juga "mempunyai kuasa". (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007), Ife (1995) mengatakan pemberdayaan bertujuan memberikan kekuatan atau kekuasaan kepada orang-orang

yang tidak beruntung. Swift dan Levin (1987) cenderung mengartikan pemberdayaan sebagai pengalokasian ulang mengenai kekuasaan (*reallocation of power*). Sedangkan Rappaport (1984) mengartikan pemberdayaan sebagai suatu cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya.

Jadi pemberdayaan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan perempuan sebagai sumber daya insani, potensi perempuan dalam hal kuantitas maupun kualitas yang dimiliki.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

Angell dalam Saca Firmansyah (2009) mengatakan partisipasi/peran serta yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia, faktor usia merupakan faktor yang memengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.
2. Jenis kelamin, nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah di dapur yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan, dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.
4. Pekerjaan dan penghasilan, hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.
5. Lamanya tinggal, lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Sedangkan Margono Slamet dalam Turindra (2009) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh 3 (tiga) unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya kemauan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi
- b. Adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi
- c. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

Sedangkan Slamet dalam Uwes Qoroni (2005) berpendapat bahwa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi/peran serta masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan serta mata pencaharian.

3. Tahap-tahap Partisipasi

Adapun tahap-tahap partisipasi/peran serta adalah sebagai berikut :

a. Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggaran) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal (Mardikanto dalam Turindra, 2009).

b. Tahap partisipasi dalam perencanaan kegiatan

Dalam tahap perencanaan, orang sekaligus diajak turut membuat keputusan yang mencakup merumuskan tujuan, maksud dan target. Oleh karena keadaan ini, peranan masyarakat sendirilah akhirnya yang harus membuat pilihan akhir sebab mereka yang akan menanggung kehidupan mereka. Oleh sebab itu, sistem perencanaan harus didesain sesuai dengan respon masyarakat, bukan hanya karena keterlibatan mereka yang begitu esensial dalam meraih komitmen, tetapi karena

masyarakatlah yang mempunyai informasi yang relevan yang tidak dapat dijangkau perencanaan teknis atasan (Slamet dalam Turindra, 2009).

c. Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang ada di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang kaya) yang lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proposional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan (Mardikanto dalam Turindra, 2009).

d. Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan (Mardikanto dalam Turindra, 2009).

e. Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan.

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang (Mardikanto dalam Turindra, 2009).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros jumlah penduduk perempuan di Kecamatan Mandai sebanyak 50,1% dari total penduduk. Hal ini berarti di Kecamatan Mandai jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dengan jumlah perempuan yang demikian besar maka potensi perempuan perlu lebih diberdayakan sebagai subyek maupun obyek pembangunan bangsa. Peranan strategis perempuan dalam menyukseskan pembangunan bangsa dapat dilakukan melalui:

1) Peranan perempuan dalam keluarga

Perempuan merupakan benteng utama dalam keluarga. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dimulai dari peran perempuan dalam memberikan pendidikan kepada anaknya sebagai generasi penerus bangsa.

2) Peranan Perempuan dalam Pendidikan

Jumlah perempuan yang demikian besar merupakan aset dan problematika di bidang ketenagakerjaan. Dengan mengelola potensi perempuan melalui bidang pendidikan dan pelatihan maka tenaga kerja perempuan akan semakin menempati posisi yang lebih terhormat untuk mampu mengangkat derajat bangsa.

3) Peranan perempuan dalam bidang ekonomi

Pertumbuhan ekonomi akan memacu pertumbuhan industri dan peningkatan pemenuhan kebutuhan dan kualitas hidup. Di sektor ini perempuan dapat membantu peningkatan ekonomi keluarga melalui berbagai jalur baik kewirausahaan maupun sebagai tenaga kerja yang terdidik.

4) Peranan perempuan dalam pelestarian lingkungan

Kerusakan lingkungan yang semakin parah karena proses industrialisasi maupun pembalakan liar perlu proses reboisasi dan perawatan lingkungan secara intensif. Dalam hal ini perempuan memiliki potensi yang besar untuk berperan serta dalam penataan dan pelestarian lingkungan.

Hubeis (1985) mengatakan, analisis alternatif peran perempuan dalam mendorong pembangunan dapat dilihat dari tiga aspek yaitu :

- a. Peran tradisi atau peran domestik yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga. Perempuan yang berhasil mengelola rumah tangga dengan baik akan menjadi inspirasi dan motivator bagi pelaku pembangunan,
- b. Peran transisi yang berkaitan dengan garapan lahan pertanian atau bekerja di usaha keluarga, dan
- c. Peran kontemporer. Perempuan memiliki peran di luar rumah tangga atau disebut wanita karier. Peran-peran ini menunjukkan bahwa perempuan baik langsung maupun tidak langsung mempunyai kontribusi yang besar terhadap pembangunan bangsa.

Kaum perempuan hendaknya mengambil peran strategis dalam proses pembangunan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Bung Karno, agar kaum perempuan ikut memastikan arah gerak negara, sehingga kaum perempuan

mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia yang mulia. Dengan keterlibatan kaum perempuan, maka kepentingan kaum perempuan akan lebih tersalurkan dan lebih dari itu, kebijakan-kebijakan yang muncul akan mencerminkan suatu kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender.

Pada intinya ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- f. Kemampuan perempuan sebagai sumber daya insani pembangunan perlu ditingkatkan dan diarahkan secara bersungguh-sungguh melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, agar perempuan :
 - 1) Perempuan dapat mengaktualisasikan dirinya baik dalam keluarga maupun masyarakat.
 - 2) Perempuan dapat lebih memanfaatkan kesempatan yang ada seoptimal mungkin.
 - 3) Perempuan dapat berfungsi sebagai mitra sejajar pria di semua bidang dan proses pembangunan.
- g. Pemberian kesempatan kepada perempuan untuk berperan aktif sebagai mitra sejajar pria perlu ditunjang oleh sikap mental, perilaku, dan pandangan masyarakat terhadap perempuan, terutama peran aktif di luar lingkungan keluarga dan rumah tangga.
- h. Penyesuaian sistem dan struktur pranata sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik.

Kaum perempuan sudah saatnya memanfaatkan ruang yang telah terbuka dengan sebaik-baiknya. Beberapa kebijakan yang mulai memperlihatkan suatu kesadaran tentang kesetaraan dan keadilan gender, tentu perlu diperluas dan pada

gilirannya arah dan seluruh gerak negara, berorientasi pada usaha membangun tata kehidupan yang setara dan berkeadilan.

D. Strategi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Musrenbangdes

Kata "strategi" berasal dari bahasa Yunani, *stratēgos* yang berarti komandan militer pada zaman demokrasi Athena. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif (<http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi>).

Menurut A. Halim, strategi merupakan suatu cara dimana sebuah lembaga atau organisasi akan mencapai tujuannya sesuai peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan internal dan sumber daya. Sedangkan Morrisey mengatakan bahwa strategi ialah proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh perusahaan supaya dapat tercapai segala misinya.

Johnson dan Scholes, berpendapat bahwa yang dimaksud strategi ialah arah dan ruang lingkup dari sebuah organisasi atau lembaga dalam jangka panjang., yang mencapai keuntungan melalui konfigurasi dari sumber daya dalam lingkungan yang menantang, demi memenuhi kebutuhan pasar dan suatu kepentingan.

Rangkuti mengatakan bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Sedang Craig dan Grant mendefinisikan strategi yaitu penetapan tujuan dan sasaran dalam jangka panjang (*Targeting and long-term goals*).

Menurut Siagaan, strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diterapkan seluruh jajaran dalam suatu organisasi demi pencapaian tujuan organisasi tersebut. Sedangkan menurut Syafrizal, strategi ialah cara untuk mencapai sebuah tujuan berdasarkan analisa terhadap faktor eksternal dan internal.

Dari beberapa pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengertian strategi merupakan sekumpulan cara yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, keputusan, perencanaan dalam kurun waktu tertentu.

Untuk membina dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam Musrenbangdes diperlukan usaha-usaha nyata dengan berbagai jalan, dengan harapan lama-kelamaan peran serta masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya.

Peran serta tidak datang dengan sendirinya, dibutuhkan strategi-strategi untuk menumbuhkannya dengan pengembangan kemampuan sumber daya manusia khususnya perempuan untuk mendorong partisipasinya dalam Musrenbangdes.

Menurut Sudarmanto (2009), untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia (individu) dalam mendorong kinerja yaitu aspek kompetensi, aspek budaya organisasi, dan aspek sistem penghargaan (*reward system*).

1) Kompetensi (kemampuan)

Menurut Spencer dalam Sudarmanto (2009:53), komponen-komponen kompetensi mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- a) *Motive* (dorongan) adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau dikehendaki seseorang yang menyebabkan tindakan. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap kegiatan atau tujuan tertentu dan menjauh dari yang lain,
- b) *Traits* (ciri, sifat) adalah karakteristik-karakteristik fisik dan respons-respons konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi,
- c) *Self concept* adalah sikap, nilai, dan citra diri seseorang,
- d) *Knowledge* adalah pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu,
- e) *Skill* adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu.

2) Budaya Organisasi

Budaya organisasi adalah kerangka kerja kognitif yang terdiri dari sikap-sikap, nilai-nilai, norma perilaku dan harapan bersama yang dirasakan oleh anggota organisasi (Green Berg & Baron dalam Sudarmanto, 2009).

3) Sistem Penghargaan

Penghargaan (*reward*) memiliki pemahaman penghargaan atau imbalan yang diberikan organisasi kepada anggotanya, baik yang sifatnya materi finansial, materi non finansial, maupun psikis atau non materi (Sudarmanto, 2009).

Kreitner dan Kinicki dalam Sudarmanto (2009;196) membagi penghargaan ke dalam tiga tipe penghargaan :

- a) Finansial/material, merupakan tipe atau bentuk penghargaan yang diberikan organisasi berupa uang atau materi yang berwujud,

b) Sosial, merupakan tipe atau bentuk penghargaan berupa pengakuan dari lingkungan sosial pekerjaan,

c) Psikis, merupakan tipe atau bentuk penghargaan dengan memberikan efek pada perasaan, harga diri, kepuasan kerja, atau prestasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa untuk menumbuhkan dan meningkatkan peran serta masyarakat khususnya perempuan dalam Musrenbangdes yaitu dengan :

1. Meningkatkan peran serta perempuan melalui pelatihan-pelatihan dan penyuluhan-penyuluhan sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat,
2. Memberikan suasana kegiatan Musrenbangdes dengan suasana seperti berada di rumah sendiri, sehingga perempuan dapat dengan leluasa mengeluarkan pendapat, ide, pikiran mereka secara gamblang,
3. Memberikan penghargaan kepada perempuan berupa diikutkan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Desa/Kelurahan.

Salah satu segi yang perlu mendapat perhatian dalam menumbuhkembangkan peran serta adalah komunikasi, di mana Bintoro Tjokroamidjojo (1986 : 227) menyatakan bahwa : ...gagasan-gagasan, kebijaksanaan dan rencana hanya akan mendapat dukungan, bila diketahui kemudian dimengerti, bahwa hal-hal tersebut mencerminkan sebagian atau seluruh kepentingan dan aspirasi masyarakat (kelompok masyarakat), kemudian lebih lanjut diterima dengan pengertian oleh masyarakat, bahwa hasil daripada kebijaksanaan rencana tersebut akan betul-betul sebagian atau seluruhnya dipetik oleh masyarakat.

Dalam kutipan di atas nampaknya faktor komunikasi berperan dalam menumbuhkan dan meningkatkan peran serta masyarakat. Dari penjabaran di atas, maka kesediaan, keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat yang dapat menjadi ukuran tingkat peran serta masyarakat meliputi keseluruhan rangkaian pelaksanaan Musrenbangdes, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tanggung jawab atas hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Penguatan peran serta perempuan dalam Musrenbangdes ada dua langkah yang bersifat pemberdayaan dan kebijakan, yaitu :

1. Penguatan perempuan melalui pemberdayaan, yang terdiri dari :
 - a. Melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, workshop ataupun sarana lain berupa pencerahan untuk menjelaskan atau meluruskan pemahaman tentang konsep seks (jenis kelamin) dengan konsep gender, yaitu kesempatan yang sama dan adil antara laki-laki dan perempuan dalam memikul tanggung jawab.
 - b. Penguatan kapasitas masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat.
 - c. Pembentukan kelembagaan/organisasi kewanitaan.
2. Penguatan perempuan melalui kebijakan, dengan mengeluarkan kebijakan yang responsif terhadap peran perempuan, seperti :
 - a. Menciptakan tata tertib Musrenbangdes, dimana perempuan diberikan porsi untuk mengungkapkan program-programnya, pengaturan peserta dengan keterwakilan perempuan 30 % dari unsur organisasi atau aktivis perempuan.

- b. Adanya program atau kegiatan prioritas yang menyangkut masalah pemberdayaan perempuan di tingkatan desa serta memperoleh alokasi anggaran.
- c. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur partisipasi optimal perempuan dalam susunan kepanitiaan.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian-penelitian yang ada relevansinya dengan peran serta sejauh pengamatan peneliti sudah ada yang saling terkait antar satu variabel dengan variabel yang lain.

Penelitian-penelitian sebelumnya diantaranya :

1. Hasil penelitian yang dilakukan Joseph Motte (2005), mengemukakan bahwa terdapat tiga variabel karakteristik penduduk yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan pengalaman berorganisasi.
2. Agus Harto Wibowo (2009), mengemukakan hasil penelitian bahwa masyarakat berpartisipasi dalam hal penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, perumusan tujuan, menetapkan langkah-langkah rinci, dan merancang anggaran.
3. Elzafina (2011), mengemukakan hasil penelitian bahwa proses perencanaan pembangunan secara partisipatif memang telah dilakukan di Kota Solok, walau masih perlu penyempurnaan. SDM fasilitator musrenbang kelurahan juga perlu ditingkatkan dalam hal keterampilan memfasilitasi dan pengetahuan tentang berbagai dokumen perencanaan. Selain itu pemerintah perlu menunjang pelaksanaan musrenbang dengan mempersiapkan kebutuhan data dan informasi seperti laporan hasil musrenbang pada

tahun sebelumnya, batasan yang jelas tentang kriteria pembangunan yang dilakukan dengan dana goro bandunsanak, dana kecamatan dan APBD kota. Selain itu juga perlu ada informasi tentang pagu indikatif diawal perencanaan pembangunan sehingga SKPD dan masyarakat mendapat gambaran tentang ketersediaan dana dan hanya membuat kegiatan yang prioritas. Selain itu perlu ada keterbukaan terhadap pemilihan kegiatan yang direalisasikan agar menjadi pembelajaran dan masukan bagi masyarakat.

4. Irma Purnamasari (2008), mengemukakan hasil penelitian bahwa :
 - a. Proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan dengan baik di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dimana: 1) beberapa tahapan proses perencanaan memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke tingkat Kabupaten. pembangunan di masing-masing desa belum dilaksanakan, diantaranya tahapan persiapan dan tahapan pembahasan kegiatan/penetapan prioritas kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat musrenbang Kecamatan, seperti Kelurahan Cibadak, Desa Pamuruyan, Desa Sukasirna, dan Desa Warnajati; 2) Di tingkat Musrenbang Kecamatan beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, terutama pada tahapan dimana masyarakat belum dilibatkan.
 - b. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi masih rendah.
5. Sri Ekawati (2010), mengemukakan bahwa terdapat bentuk-bentuk partisipasi langsung perempuan di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahun 2010 yaitu menghadiri Musrenbangkel sebagai utusan atau perwakilan RW, PKK, Posyandu, ikut terlibat dalam susunan kepanitiaan Musrenbangkel, menyampaikan usulan di dalam sidang Musrenbangkel

baik sidang pleno maupun sidang komisi, serta menjadi perwakilan sebagai utusan Kelurahan untuk ikut terlibat dalam Musrenbangcam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas perempuan bisa dikatakan cukup aktif dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 dengan keterwakilan perempuan sebesar 37%. Akses perempuan ditunjukkan dengan adanya keterlibatan perempuan dalam sidang komisi. Sedangkan kontrol dalam Musrenbangkel Joyosuran tahun 2010 masih kurang dimiliki oleh perempuan. Ada manfaat yang dirasakan perempuan antara lain menambah pengalaman mereka.

6. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Samsul Ma'arif, Prihadi Nugroho, dan Lydia Wijayanti (2010), menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang melibatkan proses Musrenbang harus memenuhi prinsip Participative, prinsip sustainable, dan prinsip holistic.
7. Utin Sri Ayu Supadmi, AB. Tangdililing, dan Mahyudin Syafei (2013), mengemukakan hasil penelitian bahwa kurang maksimalnya Musrenbang dipengaruhi oleh faktor keakuratan usulan kegiatan, faktor minimnya pendampingan, faktor kurangnya transparansi pelaksanaan Musrenbang, dan faktor anggaran.
8. Erwinsyah Putra Nasution (2010) mengemukakan hasil penelitian bahwa, secara keseluruhan dari kelima indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi program yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, struktur birokrasi, hasil yang diperoleh dan hambatan-hambatan, menunjukkan skor rata-rata dalam kategori baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi Musrenbang di Kecamatan Medan Area cukup efektif.

9. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mokhammad Faedhoni (2014) menunjukkan bahwa belum ada sinkronisasi antara visi dan misi kepala desa terhadap aspirasi masyarakat melalui Musrenbang desa.
10. Desi Sri Pasca Sari S (2004) mengemukakan hasil penelitian bahwa, hubungan aktivitas perempuan pedesaan dengan kelestarian lingkungan hidup masih dalam kategori rendah disebabkan karena pemahaman perempuan tentang lingkungan hidup masih rendah.
11. Hasil penelitian Jume'edi (2005) menyimpulkan bahwa, pendapatan suami, curahan kerja wanita keluarga nelayan, jumlah anggota keluarga, pendidikan wanita keluarga nelayan, dan strata wanita keluarga nelayan secara menyeluruh tidak berpengaruh nyata terhadap besarnya pendapatan wanita keluarga nelayan.
12. Muhammad Salman (2009) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa, tingkat penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008 adalah sangat rendah. Faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan aspirasi adalah ketersediaan anggaran yang terbatas, kepentingan politik, kualitas usulan, dan tingkat kepentingan (urgensi).

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir digambarkan untuk menjelaskan kedudukan variabel bebas maupun terikat. Sesuai yang dijelaskan pada kajian pustaka dan tentunya teori yang mendukung peran serta perempuan dalam Musrenbangdes dapat dilihat dari adanya kemauan, kesempatan, dan kemampuan perempuan dalam kegiatan tersebut.

Kemauan untuk berperan serta merupakan kunci utama bagi tumbuh dan berkembangnya peran serta perempuan. Sebab, kesempatan dan kemampuan yang cukup, belum merupakan jaminan bagi tumbuh dan berkembangnya peran serta perempuan, jika mereka sendiri tidak memiliki kemauan untuk (turut) membangun. Sebaliknya, adanya kemauan akan mendorong seseorang untuk meningkatkan kemampuan dan aktif memburu serta memanfaatkan setiap kesempatan. (Mardikanto dalam Turindra, 2009).

Oakley dalam Dika (2011) memberi pemahaman tentang konsep partisipasi, dengan mengelompokkan partisipasi masyarakat ke dalam tiga pengertian pokok, yaitu partisipasi sebagai kontribusi, partisipasi sebagai organisasi, dan partisipasi sebagai pemberdayaan.

Berdasarkan teori dari Oakley di atas, disusun definisi konseptual variabel partisipasi aktif perempuan dalam Musrenbangdes adalah keterlibatan langsung perempuan dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbangdes yang meliputi kontribusi aktif perempuan, pengorganisasian perempuan, dan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan tersebut.

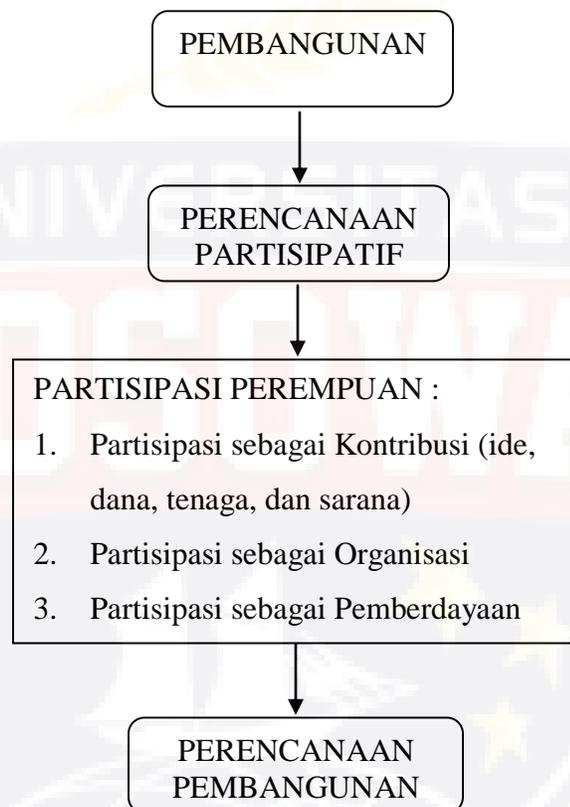
Sedangkan Slamet dalam Uwes Qoroni (2005) berpendapat bahwa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi/peran serta masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan serta mata pencaharian.

Adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan untuk menggerakkan partisipasi perempuan akan tidak banyak berarti, jika perempuannya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Mardikanto menjelaskan yang dimaksud dengan kemampuan adalah kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun, atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya), kemampuan untuk melaksanakan pembangunan, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, kemampuan untuk memecahkan masalah yang

dihadapi dengan menggunakan sumber daya dan kesempatan (peluang) lain yang tersedia secara optimal.

Dari uraian di atas, dapat digambarkan skema kerangka pikir peran serta perempuan dalam Musrenbangdes, sebagai berikut :

Gambar 2.2
Skema Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan cara mengumpulkan dan mengorganisir data kuantitatif, yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner (angket) pada masyarakat luas terutama perempuan yang dipilih berdasarkan kepentingan dan tujuan penelitian. Kemudian data tersebut dijelaskan dan disimpulkan sehingga memberikan informasi sesuai kebutuhan penelitian. Dengan demikian data dikumpulkan melalui observasi, survey, dan dokumentasi..

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dikaitkan dengan judul adalah wilayah Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasinya terletak di bagian Selatan Kota Makassar dengan karakteristik wilayah yang cukup dinamis, dan merupakan daerah padat penduduk. Adapun pertimbangan pemilihan lokasi penelitian sebagai berikut :

- Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki
- Kehidupan perempuan sudah agak maju baik dari segi pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan gaya hidup

- Banyak perempuan yang memegang peranan penting (jabatan strategis) di kecamatan ini, seperti ada lurah perempuan, KCD Pendidikan perempuan, Kepala Puskesmas Perempuan, Kepala Sekolah perempuan, dan Sekdes perempuan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dengan judul Peran Serta Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, direncanakan selama 6 (enam) bulan terhitung bulan Agustus 2015 hingga Januari 2016. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jadwal Pelaksanaan Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN					
		AGUST.	SEPT.	OKT.	NOV.	DES.	JAN.
1	Penyusunan Proposal	■	■				
2	Seminar Proposal		■				
3	Pengambilan Data			■			
4	Mengolah/Menganalisis Data				■		
5	Menyusun Laporan Hasil Analisis				■	■	
6	Seminar Hasil					■	
7	Seminar Tutup						■

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota PKK desa/kelurahan yang berjumlah 240 orang, semua staf Kantor Kelurahan/Desa yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 46 orang, semua staf kecamatan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 20 orang, dan tokoh perempuan berjumlah 10 orang dan

berpendidikan minimal SMA. Jadi jumlah keseluruhan populasi dalam penelitian ini adalah 316 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi Arikunto: 2006). Sampel yang baik adalah representatif (mewakili) terhadap populasi. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah stratified random sampling, karena populasi terdiri dari beberapa kelompok.

Teknik pengukuran sampel dilakukan berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto, bahwa jika populasinya besar dan wilayah pengamatan luas, maka sampel dapat diambil antara 10 – 15 % atau 20 – 25 % atau lebih. Jadi, dari populasi tersebut di atas diambil sebanyak 25 %, sehingga diperoleh sampel sebanyak 25 % dari 316 yaitu 79 orang dengan uraian seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Ukuran Sampel

NO.	NAMA/JENIS DATA	POPULASI	SAMPEL
1	Staf Kecamatan (perempuan)	20 Orang	25 % dari
2	Staf Kantor Desa (perempuan)	46 Orang	316 orang
3	Anggota PKK Desa/Kelurahan	240 Orang	Yaitu
4	Tokoh Perempuan	10 Orang	Sebanyak
JUMLAH		316 Orang	79 Orang

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu

data yang dapat diukur dalam suatu skala numerik (angka). Adapun jenis data penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Data penduduk Kecamatan Mandai
- Daftar rekapitulasi usulan prioritas desa/kelurahan
- Data anggota PKK setiap desa/kelurahan
- Data pegawai/staf kantor desa/kelurahan dan kecamatan yang berjenis kelamin perempuan

2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala keterangan atau informasi mengenai hal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros
- b. Kantor desa/kelurahan
- c. Kantor camat

E. Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan penelitian.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Observasi Partisipan, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan mata untuk melihat secara langsung kejadian-kejadian yang berhubungan dengan tujuan penelitian, yaitu peran serta perempuan pada saat pelaksanaan Musrenbangdes di Kecamatan Mandai.

2. Survey, yaitu penyebaran angket/kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai peran serta perempuan dalam Musrenbangdes.
3. Dokumentasi, yaitu dengan mempelajari dokumen yang berasal dari desa/kelurahan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan maksud dari penelitian ini. Studi dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi tentang jumlah penduduk, jumlah anggota PKK desa/kelurahan dan kecamatan, jumlah staf desa/kelurahan dan kecamatan yang berjenis kelamin perempuan yang ada pada masing-masing desa/kelurahan di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.

F. Variabel Penelitian

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Pada rumusan masalah pertama, terdiri dari :
 - a. peran serta aktif, yaitu :
 - Aktif memberikan kontribusi ide/pemikiran, dana, tenaga, dan sarana pada kegiatan Musrenbangdes
 - Aktif dalam pengorganisasian perempuan pada kegiatan Mjsrenbangdes
 - Aktif dalam pemberdayaan perempuan pada kegiatan Musrenbangdes
 - b. Peran serta pasif, yaitu kebalikan dari peran serta aktif.
2. Pada rumusan masalah kedua yaitu strategi peningkatan peran serta perempuan dalam Musrenbangdes, terdiri dari :
 - Penguatan perempuan melalui pemberdayaan dan
 - Penguatan perempuan melalui kebijakan

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu :

6. Pada rumusan masalah pertama menggunakan analisis statistik deskriptif, diperlukan untuk mendeskripsikan data pada variabel-variabel penelitian yang diajukan. Data yang diperoleh dari hasil kuesioner, diolah dan dianalisis dengan metode statistik. Data yang disajikan dilakukan kategorisasi dengan skala likert, yaitu sangat aktif (SA), aktif (A), cukup aktif (CA), dan tidak aktif (TA).
7. Pada rumusan masalah kedua menggunakan analisis SWOT yang merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis SWOT yaitu suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) dalam suatu proyek, baik proyek yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaann proyek baru.

H. Definisi Operasional Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguji hubungan peran serta perempuan terhadap kegiatan Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros. Adapun defenisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Peran Serta

Peran serta perempuan adalah keikutsertaan dan keterlibatan perempuan dalam hal menyumbangkan ide, pikiran, dan masukan dalam kegiatan Musrenbangdes baik langsung maupun tidak langsung.

2. Perempuan

Perempuan adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang bisa mengandung dan melahirkan anak.

3. Musyawarah

Musyawarah adalah pertemuan antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas masalah pembangunan untuk mencapai suatu mufakat/kesepakatan.

4. Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan dalam proses penyusunan usulan-usulan pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan setiap tahun.

5. Pembangunan

Pembangunan adalah rangkaian usaha untuk merubah diri atau wilayah ke arah yang lebih baik.

6. Desa

Desa adalah tempat di mana manusia bermukim dan mencari nafkah, yang letaknya di luar kota.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Keadaan geografi Kecamatan Mandai merupakan daerah bukan pantai yang sebagian besar berbentuk dataran. Dari enam daerah wilayah administrasi yang ada, mempunyai topografi dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 20 meter di atas permukaan laut.

Luas Kecamatan Mandai sekitar 49,11 km². Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Turikale, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanralili, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Marusu, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Moncongloe dan Kota Makassar.

Kecamatan Mandai memiliki empat desa dan dua kelurahan yaitu Desa Baji Mangngai, Desa Tenrigangkae, Desa Pattontongan, Desa Bonto Matene, Kelurahan Hasanuddin, dan Kelurahan Bontoa, dengan jumlah RT 180 dan RW/RK 44/26.

Jumlah penduduk Kecamatan Mandai Tahun 2016 sebanyak 38.879 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 18.405 jiwa dan perempuan sebanyak 20.474 jiwa. Penduduk terbanyak berada di Kelurahan Bontoa sebanyak 13.625 jiwa dan terkecil berada di Desa Pattontongan sebanyak 2.187 jiwa.

B. Partisipasi Perempuan Kecamatan Mandai

Untuk mengetahui sejauh mana partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes, peneliti mengadaptasi konsep partisipasi dari

Oakley yang mengelompokkan partisipasi ke dalam tiga pengertian pokok, yaitu Partisipasi sebagai kontribusi; Partisipasi sebagai organisasi; dan Partisipasi sebagai pemberdayaan.

Mengadaptasi landasan teori dari Oakley, disusun definisi konseptual variabel partisipasi perempuan adalah keterlibatan langsung perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes yang meliputi kontribusi perempuan, pengorganisasian perempuan dan pemberdayaan perempuan.

Dari definisi konseptual tersebut diperoleh 3 (tiga) dimensi kajian, yakni Dimensi Kontribusi Perempuan, Dimensi Pengorganisasian Perempuan, dan Dimensi Pemberdayaan Perempuan.

Dimensi Kontribusi Perempuan dijabarkan menjadi indikator-indikator : Kontribusi Pemikiran, Kontribusi Dana, Kontribusi Tenaga, dan Kontribusi Sarana.

Dimensi Pengorganisasian Perempuan dijabarkan menjadi indikator-indikator : Model Pengorganisasian, Struktur Pengorganisasian, Unsur-unsur Pengorganisasian, dan Fungsi Pengorganisasian.

Dimensi Pemberdayaan Perempuan dijabarkan menjadi indikator-indikator : Peran Perempuan, Aksi Perempuan, Motivasi Perempuan, dan Tanggung jawab Perempuan.

Untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, maka dilakukan penelitian terhadap beberapa responden yang mewakili pendapat perempuan Kecamatan Mandai. Sesuai dengan penelitian yang telah dilaksanakan, berikut ini dikemukakan beberapa hasil penelitian yang diperoleh.

Tahap analisis ini dilakukan dengan metode kuantitatif, yaitu dengan cara memberikan skor pada setiap indikator dalam variabel keaktifan perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musrenbangdes, sehingga akan diketahui partisipasi/peran serta perempuan dalam Musrenbangdes di Kecamatan Mandai.

Uraian hasil penelitian tingkat partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes diukur berdasarkan tingkat keaktifannya dalam proses pelaksanaan Musrenbangdes, yang meliputi kontribusi perempuan (ide, dana, tenaga, dan sarana), pengorganisasian perempuan, dan pemberdayaan perempuan. Kemudian pengukuran tingkat partisipasi perempuan dengan karakteristik penduduk yang meliputi umur, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan lama bermukim.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keaktifan perempuan Kecamatan Mandai dalam Musrenbangdes, maka diperoleh tingkat partisipasi perempuan secara keseluruhan di Kecamatan Mandai. Tingkat partisipasi perempuan diperoleh dari prosentase data primer setiap pernyataan responden mengenai keikutsertaan dan keaktifan mereka dalam Musrenbangdes dan setiap pernyataan tersebut diberi bobot/nilai sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun bobot masing-masing variabel, tolok ukur, dan bobot peran serta perempuan dalam Musrenbangdes dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Kriteria Tingkat Peran Serta Perempuan Dalam Musrenbangdes

NO.	VARIABEL	TOLOK UKUR	BOBOT
1	Kontribusi (ide, dana, tenaga, sarana)	- Sangat Aktif - Aktif - Cukup Aktif - Tidak Aktif	- 4 - 3 - 2 - 1
2	Pengorganisasian (model, struktur, fungsi, unsur)	- Sangat Aktif - Aktif - Cukup Aktif - Tidak Aktif	- 4 - 3 - 2 - 1
3	Pemberdayaan (peran, aksi, motivasi, tanggung jawab)	- Sangat Aktif - Aktif - Cukup Aktif - Tidak Aktif	- 4 - 3 - 2 - 1

Kemudian berdasarkan hasil survey primer yang diperoleh dari pernyataan responden mengenai peran serta mereka, serta bobot probabilitas maksimum dan minimum dari seluruh variabel partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes, maka diperoleh kriteria tingkat partisipasi perempuan menurut total skor yang penilaiannya dijelaskan sebagai berikut :

1. Menentukan Range Data

Range data diperoleh dari perkalian jumlah variabel (dimensi) peran serta/partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes dengan selisih bobot terbesar dan bobot terkecil dari ketiga variabel peran serta yang telah disusun berdasarkan tolok ukur peran serta perempuan menurut kajian literatur, sehingga diperoleh range data sebesar 12.

$$\text{Range Data} = (4 - 1) \times 4 = 12$$

2. Menentukan Interval Kelas

Interval kelas digunakan untuk menentukan interval bobot yang akan dikategorikan menurut kelas-kelas kategori tingkat peran serta perempuan, dan dalam penelitian ini kategori tingkat peran serta perempuan terdiri dari tiga, yaitu tinggi, sedang, dan rendah, sehingga diperoleh interval kelasnya adalah 4.

$$\text{Interval Kelas} = \frac{12}{3} = 4$$

3. Menentukan Kriteria Tingkat Peran Serta Perempuan Dalam Musrenbangdes

Untuk menentukan kriteria tingkat peran serta perempuan dalam Musrenbangdes, maka diperlukan nilai probabilitas maksimum dan minimum dari keempat dimensi variabel peran serta tersebut. Bobot probabilitas maksimumnya adalah 16 dan bobot probabilitas minimumnya adalah 4, sehingga berdasarkan interval kelas yang telah ditentukan yaitu 4, maka kriteria tingkat peran serta perempuan dalam Musrenbangdes serta total bobot skor yang diperoleh adalah :

KRITERIA	RENDAH	SEDANG	TINGGI
TOTAL SKOR	4 – 8	9 – 13	14 – 18

Berdasarkan kriteria skor di atas, maka diperoleh kesimpulan tingkat peran serta perempuan dalam Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros. Prosentase tingkat peran serta/partisipasi perempuan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kontribusi Perempuan

Pada setiap kegiatan Musrenbangdes partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk merencanakan pembangunan di desanya. Perencanaan pembangunan desa memerlukan kontribusi masyarakat, dalam hal ini perempuan, untuk mengetahui apa-apa saja yang sangat dibutuhkan/diperlukan perempuan untuk ditingkatkan pembangunannya demi meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kontribusi perempuan dalam kegiatan Musrenbangdes meliputi kontribusi pemikiran/ide-ide, kontribusi dana/sumbangan, kontribusi tenaga, dan kontribusi sarana.

Perempuan sangat diharapkan memberikan kontribusinya untuk perkembangan pembangunan, pengetahuan, kesejahteraan, keterampilan perempuan yang ada di desa. Karena hanya perempuan itu sendirilah yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh kaumnya. Berikut data kontribusi perempuan Kecamatan Mandai pada kegiatan Musrenbangdes :

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Skor Kontribusi Perempuan Dalam Musrenbangdes

Interval Skor	Frekuensi	Presentasi (%)	Kategori
4 – 8	28	35,44	Rendah
9 – 13	48	60,76	Sedang
14 – 16	3	3,80	Tinggi
Jumlah	79	100,00	

Sumber : Hasil Analisis 2017

Dari tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa dari 79 orang responden hanya 3 orang (3,80 %) yang memiliki kontribusi dengan kategori tinggi dalam memberikan kontribusinya pada kegiatan Musrenbangdes, sedangkan 48 orang (60,76 %) kategori sedang, dan 28 orang (35,44 %) tergolong kategori rendah (tidak aktif) memberikan kontribusinya pada kegiatan Musrenbangdes. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah.

Gambar 4.1
Histogram Kontribusi Perempuan Dalam Musrenbangdes



Sumber : Hasil Analisis 2017

Dari gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa dari tiga tingkat partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes di Kecamatan Mandai yaitu tinggi, sedang dan rendah, diketahui bahwa perempuan di Kecamatan Mandai cukup aktif berperan serta memberikan kontribusinya dalam kegiatan Musrenbangdes yang terlihat dari presentasi keaktifan perempuan yang mencapai 60,76 %. Ini menunjukkan perempuan di Kecamatan Mandai cukup aktif memberikan kontribusinya.

Untuk dapat mengamati lebih cermat mengenai partisipasi perempuan memberikan kontribusinya dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes, maka usulan-usulan yang masuk dalam daftar prioritas pembangunan dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

- 1) Usulan yang bersifat umum, yang orientasi dan tujuannya untuk kepentingan umum menyangkut semua orang (laki-laki dan perempuan)
- 2) Usulan yang responsif gender, yang orientasi dan tujuannya untuk kepentingan perempuan.

Di bawah ini adalah hasil Musrenbangdes yang mencakup usulan-usulan masyarakat di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Tahun 2015.

Tabel 4.3
Rekapitulasi Usulan Masyarakat Dalam Musrenbangdes
Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Tahun 2015

No.	Bidang Pembahasan	Usulan-Usulan		Jumlah
		Umum	Responsif Gender	
1	Sarana dan Prasarana	67	-	67
2	Ekonomi	22	8	30
3	Sosial Budaya	34	24	58
4	Sumber Daya Alam	13	-	13
Jumlah		136	32	168

Sumber : Diolah dari Data Primer Musrenbangdes Mandai Tahun 2015

Berikut adalah daftar usulan setiap desa/kelurahan yang akan diusulkan dalam forum Musrenbangdes Mandai Tahun 2015, yang dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.4
Rekapitulasi Usulan Setiap Desa/Kelurahan Dalam Musrenbangdes
Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Tahun 2015

No.	Desa/Kel.	Bidang Pembahasan								Jumlah
		Infrastruktur		Ekonomi		Sosbud		SDA		
		Umum	Responsif Gender	Umum	Responsif Gender	Umum	Responsif Gender	Umum	Responsif Gender	
1	Bontoa	11	-	-	-	1	-	1	-	13
2	Hasanuddin	6	-	-	1	7	3	3	-	20
3	Tenrigangkae	6	-	8	2	1	4	3	-	24
4	Pattontongan	8	-	4	-	1	-	1	-	14
5	Bonto Matene	33	-	9	4	18	8	3	-	75
6	Baji Mangai	3	-	1	1	6	9	2	-	22
	Jumlah	67	-	22	8	34	24	13	-	168

Sumber : Diolah dari Data Primer Musrenbangdes Mandai Tahun 2015

Mencermati kedua tabel di atas menunjukkan bahwa usulan yang responsif perempuan yang masuk dalam daftar skala prioritas pembangunan masih rendah, yaitu sebanyak 32 usulan dari 168 usulan dengan presentasi 19,05 %. Namun demikian perempuan Kecamatan Mandai telah memperoleh manfaat yang besar dari Musrenbangdes karena forum ini telah memperhatikan aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan perempuan.

Untuk meningkatkan kontribusi perempuan dalam Musrenbangdes di Kecamatan Mandai, perlu adanya wahana khusus bagi kelompok perempuan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan mereka. Dalam Juknis dan Juklak Musrenbangdes Kabupaten Maros mensyaratkan setiap desa/kelurahan untuk melaksanakan Musrenbang Khusus Perempuan sebelum Musrenbangdes dilaksanakan, namun pemerintah desa/kelurahan tidak pernah mengadakan Musyawarah Khusus Perempuan sehingga aspirasi perempuan kurang

terakomodasi. Ini menunjukkan bahwa budaya patriarkal yang memarjinalkan kaum perempuan di desa masih besar.

b. Pengorganisasian Perempuan

Kegiatan Musrenbangdes pada Tahun 2015 di Kecamatan Mandai, seperti diuraikan pada BAB I, kehadiran perempuan pada kegiatan tersebut kurang dari 30 %. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah, dalam hal ini kepala desa dalam pengorganisasian perempuan untuk turut serta dalam kegiatan Musrenbangdes.

Pengorganisasian perempuan hanya dimungkinkan apabila mereka diikutsertakan atau dilibatkan dalam kegiatan Musrenbangdes, baik sebagai undangan, delegasi, maupun panitia pelaksana. Pengorganisasian perempuan dalam kegiatan Musrenbangdes meliputi model/cara mengorganisasikan perempuan, struktur pengorganisasian, Fungsi, dan unsur-unsur pengorganisasian. Berikut data pengorganisasian perempuan dalam kegiatan Musrenbangdes di Kecamatan Mandai.

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Skor Pengorganisasian Perempuan Dalam Musrenbangdes

Interval Skor	Frekuensi	Presentasi (%)	Kategori
4 – 8	5	6,33	Rendah
9 – 13	48	60,76	Sedang
14 – 16	26	32,91	Tinggi
Jumlah	79	100,00	

Sumber : Hasil Analisis 2017

Pada tabel 4.5 di atas memperlihatkan bahwa dari 79 orang responden yang mewakili sebagian perempuan di Kecamatan Mandai, 26 orang (32,91 %) di antaranya tergolong kategori tinggi dalam pengorganisasian perempuan pada Musrenbangdes. Sedangkan 60,76 % (48 orang) tergolong kategori sedang, dan 6,33 % (5 orang) tergolong dalam kategori rendah peran sertanya baik sebagai undangan, delegasi, maupun anggota panitia kegiatan Musrenbangdes yang menjadi sebahagian dari pengorganisasian perempuan dalam Musrenbangdes. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini.

Gambar 4.2
Histogram Pengorganisasian Perempuan Dalam Musrenbangdes



Sumber : Hasil Analisis 2017

Dari gambar 4.2 di atas memperlihatkan bahwa pengorganisasian perempuan dalam kegiatan Musrenbangdes cukup baik, ini ditandai dengan tanggapan responden tentang pengorganisasian mereka dalam Musrenbangdes yang mencapai 32,91 % . Hal ini menunjukkan perempuan di Kecamatan Mandai sudah sangat dimobilisasi oleh pemerintah untuk turut serta dalam kegiatan Musrenbangdes, baik sebagai undangan, delegasi, maupun sebagai anggota

panitia. Pemerintah (Kepala Desa/Lurah) sudah memberi kebebasan seluas-luasnya kepada perempuan di Kecamatan Mandai untuk berperan serta secara aktif dalam Musrenbangdes dengan memberikan ide/pemikiran, usulan-usulan dan tenaganya yang berkaitan dengan kepentingan atau kebutuhan perempuan yang ada di wilayah kelurahan/desanya, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

Dari hasil penelitian dan pengamatan, diketahui bahwa pengorganisasian perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes Kecamatan Mandai Tahun 2015 masih rendah, karena dari sekian banyak kepengurusan kepanitiaan Musrenbangdes masih kurang posisi strategis yang diduduki perempuan. Hampir semua perempuan lebih memilih untuk menjadi anggota (bagian konsumsi). Faktor yang berpengaruh diantaranya adalah rasa tidak percaya diri perempuan dalam forum publik karena selama ini perempuan lebih banyak berkuat di wilayah domestik. Faktor beban ganda perempuan yaitu produktif (bekerja membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga) dan reproduktif (urusan rumah tangga), sehingga perempuan akan berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya terlebih dahulu sebelum menjalani pekerjaan dan aktivitas publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan cukup aktif dalam pengorganisasian mereka dalam perencanaan pembangunan. Namun pengorganisasian perempuan dalam kegiatan Musrenbangdes masih harus ditingkatkan agar lebih aktif lagi di masa yang akan datang. Peningkatan pengorganisasian perempuan dalam perencanaan pembangunan dapat melalui

pembentukan organisasi-organisasi perempuan di tingkat desa/kelurahan maupun pendidikan dan pelatihan bagi perempuan.

Dari hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dalam perencanaan pembangunan dan menjadi mitra sejajar laki-laki dalam merencanakan pembangunan dan menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan perencanaan pembangunan di daerahnya.

c. Pemberdayaan Perempuan

Untuk meningkatkan animo atau keinginan perempuan untuk aktif dalam kegiatan Musrenbangdes, maka pemerintah (kepala desa/lurah) perlu memberdayakan perempuan Kecamatan Mandai agar mau berperan aktif mengangkat hal-hal yang menjadi kebutuhan perempuan yang ada di wilayah desa/kelurahannya, memberikan kesempatan kepada para perempuan Kecamatan Mandai untuk memperlihatkan aksi mereka dalam mempertahankan usulan yang telah diusulkan oleh perempuan Kecamatan Mandai, memotivasi mereka agar aktif berpartisipasi memasukkan usulan-usulan yang sesuai kebutuhan/kepentingan perempuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraannya, serta memberdayakan mereka untuk bertanggung jawab atas usulan-usulan yang telah mereka masukkan agar menjadi daftar prioritas utama.

Berikut data hasil penelitian pemberdayaan perempuan dalam kegiatan Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.

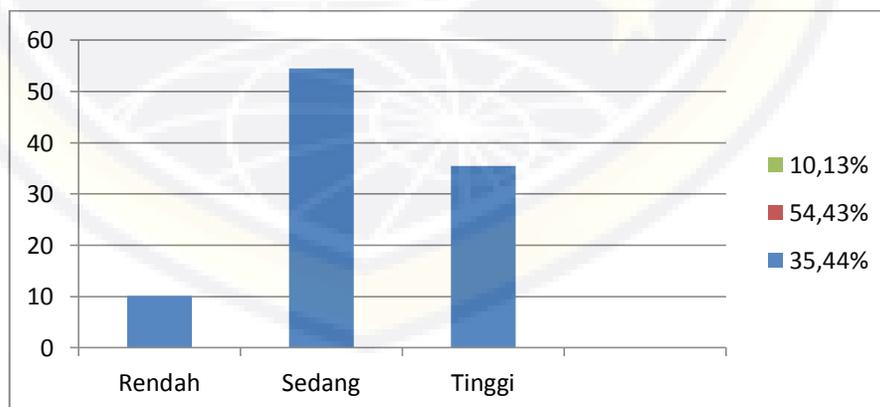
Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Skor Pemberdayaan Perempuan Dalam
Musrenbangdes

Interval Skor	Frekuensi	Presentasi (%)	Kategori
4 – 8	8	10,13	Rendah
9 – 13	43	54,43	Sedang
14 – 16	28	35,44	Tinggi
Jumlah	79	100,00	

Sumber : Hasil Analisis 2017

Pada tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa dari 79 orang responden yang mewakili sebagian perempuan di Kecamatan Mandai, hanya 28 orang (35,44 %) yang tergolong dalam kategori tinggi partisipasinya setelah mereka diberdayakan oleh pemerintah dalam kegiatan Musrenbangdes. Sedangkan 43 orang (54,43 %) tergolong kategori sedang, dan 8 orang (10,13 %) tergolong dalam kategori rendah memberdayakan dirinya dalam Musrenbangdes. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini.

Gambar 4.3
Histogram Pemberdayaan Perempuan Dalam Musrenbangdes



Sumber : Hasil Analisis 2017

Dari gambar 4.3 di atas mencerminkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam kegiatan Musrenbangdes sudah agak baik, ini ditunjukkan dengan tanggapan responden tentang pemberdayaan mereka dalam Musrenbangdes yang mencapai 35,44 % . Hal ini mencerminkan, perempuan di Kecamatan Mandai sudah diberdayakan oleh pemerintah dalam kegiatan Musrenbangdes. Perempuan di Kecamatan Mandai cukup aktif berpartisipasi memberikan perannya sebagai wakil perempuan di desa/kelurahannya untuk menyampaikan aspirasi semua perempuan yang ada di wilayah Kecamatan Mandai, menunjukkan aksinya dalam mempertahankan usulan-usulan yang telah diusulkan melalui diskusi panjang lebar dengan semua peserta Musrenbangdes, memotivasi dirinya untuk hadir dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbangdes, dan bertanggung jawab menggolongkan usulan-usulan yang telah diusulkan (usulan yang diwakilkan pada mereka) agar menjadi daftar usulan prioritas utama yang akan diikuti pada Musrenbang Kecamatan.

Dari hasil penelitian dan pengamatan dapat dikemukakan bahwa, pemberdayaan perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes di Kecamatan Mandai cukup baik, ini terlihat dari :

- 1) Keikutsertaan perempuan dalam Musrenbangdes
- 2) Kesamaan hak dalam memberikan usulan-usulan
- 3) Kesempatan untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan Musrenbangdes
- 4) Menikmati manfaat dari hasil-hasil perencanaan pembangunan yang telah disepakati dalam Musrenbangdes.

Dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes, perempuan sudah cukup diberdayakan, hanya perlu langkah-langkah yang berkesinambungan atau terus menerus agar pemberdayaan perempuan akan semakin meningkat di tahun-tahun yang akan datang.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan agar pemberdayaan perempuan dapat berkesinambungan adalah :

- 1) Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang hendak diberdayakan harus dipihaki atau diberikan keutamaan/keistimewaan dalam memberikan aspirasinya
- 2) Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui wadah yang bisa menampung aspirasi perempuan seperti organisasi-organisasi wanita
- 3) Perlindungan, artinya memberikan proteksi/perlindungan kepada perempuan melalui undang-undang atau kebijakan-kebijakan yang peka gender, agar perempuan bisa berpartisipasi, mengakses, mengontrol, dan mengambil manfaat dari hasil pembangunan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbangdes

Sedangnya tingkat partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Tahun 2015 disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor pendukung partisipasi perempuan

dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes Kecamatan Mandai yang teridentifikasi adalah :

1. Faktor Internal

Adapun faktor internal pendukung partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Motivasi perempuan untuk ikut berpartisipasi
- b. Rasa percaya diri perempuan yang tinggi untuk turut serta berpartisipasi
- c. Pendidikan yang dimiliki perempuan
- d. Kondisi sosial ekonomi perempuan
- e. Kesehatan jasmani dan rohani yang prima serta ketahanan fisik dan mental yang kuat merupakan pendukung perempuan dalam berpartisipasi
- f. Kemampuan perempuan dalam berpartisipasi

2. Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal pendukung partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan-kebijakan yang mengatur partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes yang terdiri dari :
 - 1) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - 2) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 4) UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025.
 - 5) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- 6) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.
- 7) Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- 8) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 9) Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010 – 2014.
- 10) Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010.
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah.
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 Perencanaan Pembangunan Desa.
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK 02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan (Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dan Pengesahan Pelaksanaan DIPA TA. 2011.

15) Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga.

16) Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 dan 050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2007.

- b. Dilibatkan sebagai panitia pelaksana Musrenbangdes
- c. Ditunjuk sebagai wakil perempuan/delegasi yang ditunjuk oleh Ketua RT/RW untuk mengikuti Musrenbangdes
- d. Anggota/kader PKK
- e. Tokoh perempuan
- f. Dukungan/dorongan dari kepala desa agar turut berpartisipasi

Adapun faktor penghambat partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes Kecamatan Mandai yang teridentifikasi adalah :

1. Faktor Internal

Adapun faktor internal penghambat partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya motivasi perempuan untuk ikut berpartisipasi
- b. Rendahnya rasa percaya diri perempuan untuk turut serta berpartisipasi
- c. Rendahnya pendidikan yang dimiliki perempuan, yang mengakibatkan tidak siapnya perempuan memasuki wilayah-wilayah publik yang kompetitif dan maskulin

- d. Kesehatan jasmani dan rohani yang tidak prima serta ketahanan fisik dan mental yang tidak kuat merupakan penghambat perempuan dalam berpartisipasi
- e. Beban kerja domestik, dimana ketika perempuan ingin beraktifitas publik, maka tanggung jawab perempuan atas pekerjaan domestik (rumah tangga) harus sudah diselesaikan sehingga perempuan kadang terlambat menghadiri Musrenbangdes
- f. Izin dari suami untuk mengikuti Musrenbangdes karena pelaksanaan Musrenbangdes biasanya dari pagi sampai sore hari

2. Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal penghambat partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Peran ganda, di satu sisi sebagai ibu rumah tangga dan di sisi lainnya sebagai wanita karier. Peran ganda ini merupakan konsekuensi dari hadirnya industrialisasi dan urbanisasi serta kondisi ekonomi yang mengalami krisis yang berkepanjangan, sehingga perempuan dipaksa menanggung beban keluarga menjadi tenaga pekerja
- b. Kondisi sosial dan ekonomi yang menjadi masalah utama dihadapi perempuan adalah kemiskinan yang dapat menghambat perempuan berpartisipasi
- c. Budaya patriarkhal yang masih kuat dan menomorduakan perempuan
- d. Fasilitas kegiatan Musrenbangdes yang tidak memadai
- e. Suasana Musrenbangdes yang tidak kondusif dapat mempengaruhi partisipasi perempuan karena ketika forum dikuasai laki-laki, maka perempuan menjadi enggan atau tidak berani untuk berbicara menyampaikan pendapatnya

- f. Transportasi/kendaraan yang bisa mengantarkan perempuan ke tempat Musrenbangdes dilaksanakan

D. Peran Serta Perempuan Dalam Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Dilihat dari Karakteristik Penduduk

Cukup tingginya tingkat partisipasi perempuan di Kecamatan Mandai ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, dan lamanya bermukim perempuan Kecamatan Mandai. Penjelasan mengenai tingkat peran serta perempuan dalam Musrenbangdes dilihat dari karakteristik penduduk Kecamatan Mandai akan diuraikan berikutnya.

Setelah dilakukan analisis terhadap peran serta perempuan dalam Musrenbangdes, maka selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap peran serta perempuan dalam Musrenbangdes berdasarkan karakteristik penduduk. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pada umur berapa perempuan banyak yang berpartisipasi aktif dalam Musrenbangdes, pada tingkat pendidikan mana perempuan yang paling banyak berpartisipasi dalam Musrenbangdes, pekerjaan apa saja yang digeluti perempuan yang banyak berpartisipasi dalam Musrenbangdes, pada tingkat pendapatan/penghasilan berapa perempuan yang banyak berpartisipasi dalam Musrenbangdes, dan berapa lama perempuan bermukim di tempat tinggal mereka hingga mereka bisa berpartisipasi aktif dalam Musrenbangdes.

Analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang peran serta perempuan dalam Musrenbangdes dilihat dari karakteristik penduduk yaitu umur,

pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan lama bermukim. Untuk lebih jelasnya, berikut uraiannya.

1. Umur

Umur merupakan faktor yang bisa mempengaruhi peran serta perempuan dalam kegiatan Musrenbangdes. Perempuan dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya. Berikut data hasil penelitian peran serta perempuan dalam Musrenbangdes di Kecamatan Mandai dilihat dari umur responden yang telah memberikan tanggapannya.

Tabel 4.7
Peran Serta Perempuan Berdasarkan Umur

UMUR	FREKUENSI	PRESENTASI (%)
(21-30) TH	10	12,66
(31-40) TH	36	45,57
(41-50) TH	20	25,32
(51-60) TH	13	16,46

Sumber : Hasil Analisis 2017

Dari tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa dari 79 orang responden, umur 31 Tahun sampai 50 Tahun yang paling banyak berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbangdes dibandingkan usia lainnya. Hal ini berarti usia dewasa memiliki keinginan dan keterikatan moral dengan lingkungan tempat dia bermukim, mampu melihat pembangunan apa yang dibutuhkan perempuan dan desa/kelurahan tempat

dia tinggal, sehingga mereka mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbangdes.

2. Pendidikan

Pendidikan, dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk dapat berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Berikut data hasil penelitian peran serta perempuan dalam Musrenbangdes di Kecamatan Mandai dilihat dari tingkat pendidikan responden yang telah memberikan tanggapannya.

Tabel 4.8
Peran Serta Perempuan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	FREKUENSI	PRESENTASI (%)
SD	1	1,27
SMP	1	1,27
SMA	29	36,71
D-3	1	1,27
S-1	41	51,90
S-2	6	7,59

Sumber : Hasil Analisis 2017

Dari tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa rata-rata perempuan yang berpartisipasi telah menempuh jenjang pendidikan SMA dan S-1 bahkan ada yang S-2. Hal ini tercermin dari prosentase responden yang sebagian besar (51,90 %) menyatakan lulusan S-1, 36,71 % tamat SMA, dan 6 orang di antaranya (7,59 %) tamat S-2.

Sedangkan perempuan yang hanya tamat SD, SMP dan D-3 hanya 1,27 %. Hal ini mencerminkan bahwa perempuan di Kecamatan Mandai memiliki tingkat pendidikan yang sangat tinggi. Tingkat pendidikan yang tinggi ini merupakan potensi dalam meningkatkan partisipasi perempuan pada kegiatan Musrenbangdes.

3. Pekerjaan

Pekerjaan dan penghasilan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Maksudnya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian. Berikut data hasil penelitian peran serta perempuan dalam Musrenbangdes di Kecamatan Mandai dilihat dari pekerjaan responden yang telah memberikan tanggapannya.

Tabel 4.9
Peran Serta Perempuan Berdasarkan Pekerjaan

PEKERJAAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
IRT	7	8,86
HONORER	11	13,92
WIRASWASTA	3	3,80
PNS	51	64,56
GURU	7	8,86

Sumber : Hasil Analisis 2017

Dari tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa dari 79 orang responden, yang paling banyak berpartisipasi dalam Musrenbangdes adalah perempuan yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil 64,56 %, pegawai honorer 13,92 %, guru dan ibu rumah tangga masing-masing 8,86 %, sedangkan pekerjaan sebagai wiraswasta hanya memiliki prosentase 3,80 %. Ini menunjukkan bahwa, partisipasi yang dinominasi oleh pegawai negeri sipil dan honorer adalah merupakan anggota-anggota atau para pengurus PKK kecamatan, kelurahan, dan desa yang sangat aktif dalam setiap kegiatan Musrenbangdes. Namun apapun pekerjaan perempuan tidak dapat menghambat mereka untuk ikut berpartisipasi dalam Musrenbangdes. Perempuan dapat berpartisipasi sesuai dengan bidang yang digeluti dan dapat mengangkat masalah-masalah yang dihadapi di lingkungan tempat tinggalnya sesuai dengan jenis pekerjaannya, misalnya guru, dia berpartisipasi dalam hal mengangkat masalah peningkatan pendidikan perempuan yang ada di desa/kelurahannya, demikian juga dengan perempuan dengan pekerjaan wiraswasta, tentu dia akan mengangkat masalah peningkatan keterampilan perempuan yang ada di desa/kelurahannya dan lain sebagainya.

4. Penghasilan

Penghasilan merupakan hasil dari suatu pekerjaan, pekerjaan yang baik akan menentukan penghasilan yang akan diperoleh, dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang cukup atau mapan. Berikut data hasil penelitian peran serta perempuan dalam

Musrenbangdes di Kecamatan Mandai dilihat dari penghasilan responden yang telah memberikan tanggapannya.

Tabel 4.10
Peran Serta Perempuan Berdasarkan Penghasilan

PENGHASILAN	FREKUENSI	PRESENTASI (%)
(0 - 1) JT	10	12,66
(1,1 - 2) JT	8	10,13
(2,1 - 3) JT	36	45,57
(3,1 - 4) JT	18	22,78
(4,1 - 5) JT	7	8,86

Sumber : Hasil Analisis 2017

Dari tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa dari 79 orang responden, yang paling banyak berpartisipasi dalam Musrenbangdes adalah perempuan yang memiliki penghasilan di atas 1 juta rupiah, yaitu yang paling tinggi pada penghasilan (2,1-3) juta rupiah sebanyak 45,57 %, kemudian (3,1-4) juta rupiah sebanyak 22,78 %, (1,1-2) juta rupiah sebanyak 10,13 %, dan (4,1-5) juta rupiah sebanyak 8,86 %, sedangkan di bawah (0-1) juta rupiah sebanyak 12,66 %. Ini menunjukkan bahwa, penghasilan perempuan Kecamatan Mandai cukup tinggi, yang dapat menunjang partisipasi mereka dalam kegiatan Musrenbangdes.

5. Lama Bermukim

Lama bermukim adalah lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka

rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan di lingkungan tersebut. Berikut data hasil penelitian peran serta perempuan dalam Musrenbangdes di Kecamatan Mandai dilihat dari lamanya bermukim responden di lingkungan tersebut.

Tabel 4.11
Peran Serta Perempuan Berdasarkan Lama Bermukim

LAMA BERMUKIM	FREKUENSI	PRESENTASI (%)
(1-10) TH	25	31,65
(11-20) TH	22	27,85
(21-30) TH	11	13,92
(31-40) TH	8	10,13
(41-50) TH	11	13,92
(51-60) TH	2	2,53

Sumber : Hasil Analisis 2017

Dari tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa dari 79 orang responden yang telah memberikan tanggapannya, mereka telah bermukim/bertempat tinggal di Kecamatan Mandai sudah cukup lama, ini ditunjukkan dengan 31,65 % telah bermukim selama 1-10 tahun, 27,85 % sudah bermukim selama 11-20 tahun, 13,92 % telah bermukim selama 21-30 tahun, 10,13 % sudah bermukim selama 31-40 tahun, 13,92 % telah bermukim selama 41-50 tahun, dan 2,53 % sudah bermukim selama 51-60 tahun di wilayah Kecamatan Mandai Kabupaten Maros. Ini menunjukkan bahwa perempuan yang aktif berpartisipasi mengikuti kegiatan Musrenbangdes adalah perempuan yang telah bermukim di Kecamatan Mandai

selama 10 sampai 60 tahun, sehingga seharusnya mereka tahu apa yang dibutuhkan perempuan di wilayah tempat tinggalnya.

E. Strategi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pelaksanaan Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros

Setelah dilakukan analisis terhadap peran serta perempuan dalam Musrenbangdes, maka selanjutnya akan dilakukan analisis strategi peningkatan peran serta perempuan dalam kegiatan Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode Analisis SWOT, yaitu alat yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini dapat didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) (Rangkuti dalam Kodoatie (2005:419)).

Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*).

Berikut adalah visi dan misi serta tujuan musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan :

- Visi Musrenbangdes Kecamatan Mandai

Visi adalah suatu gambaran tentang masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa/kelurahan. Penyusunan visi desa/kelurahan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa/kelurahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka visi Musrenbangdes adalah “Terwujudnya masyarakat desa yang maju dan makmur didukung oleh pertanian/peternakan serta sarana dan prasarana desa/kel. yang memadai”.

- Misi Musrenbangdes Kecamatan Mandai

Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi-misi agar visi dapat diwujudkan tercapai. Penyusunan misi juga menggunakan pendekatan partisipatif dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa/kelurahan. Adapun misi Musrenbangdes adalah :

1. Meningkatkan hasil pertanian dan peternakan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di segala bidang
3. Meningkatkan sarana dan prasarana desa/kel.
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat

- Tujuan Musrenbangdes

Mendorong partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa/kelurahan.

Dari uraian di atas, maka disusun faktor-faktor yang mempengaruhi keempat komponen dasar Analisis SWOT, yaitu :

- Kekuatan (*strength*)

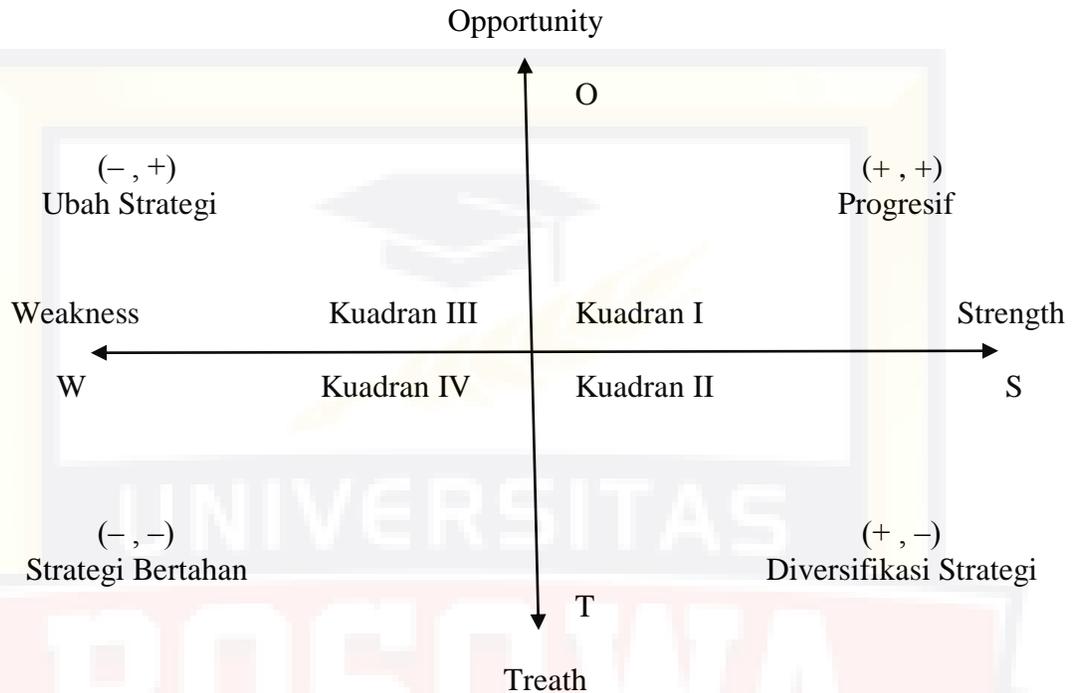
- a) Peran serta perempuan dalam Musrenbangdes mendapat dukungan penuh pemerintah (UU, Permendagri, PP)
- b) Pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan
- c) Meningkatkan pembangunan desa/kelurahan melalui Musrenbangdes
- d) Memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa/kelurahan
- e) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Kelemahan (*weakness*)
 - a) Proses Musrenbang yang panjang (musyawarah khusus perempuan/musyawarah warga, Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Propinsi)
 - b) Tidak ada kepastian usulan yang akan dilaksanakan/terrealisasi
 - c) Membutuhkan waktu yang lama
 - d) Alokasi anggaran pembangunan yang tersedia
 - e) Usulan harus bersaing dengan usulan desa/kelurahan lain
- Peluang (*opportunities*)
 - a) Bisa memasukkan usulan sebanyak-banyaknya
 - b) Pengorganisasian perempuan dalam kegiatan Musrenbangdes
 - c) Memobilisasi perempuan untuk ikut serta dalam Musrenbangdes
 - d) Dapat berinteraksi/berdiskusi dengan peserta lainnya
 - e) Kesempatan untuk berpartisipasi
- Ancaman (*threats*)
 - a) Tidak terjadi proses pembangunan di desa/kelurahan
 - b) Desa/kelurahan dapat tertinggal dari desa/kelurahan lain

- c) Terjadi kemiskinan
- d) Meningkatnya pengangguran
- e) Akan terbentuk lingkungan kumuh

Pada analisis ini menggunakan pendekatan kuantitatif analisis SWOT yaitu melalui perhitungan analisis SWOT yang dikembangkan oleh Pearce dan Robinson (1998), yang dilakukan melalui tiga tahap perhitungan, yaitu :

1. Melakukan perhitungan skor (a) dan bobot (b) poin faktor serta jumlah total perkalian skor dan bobot ($c = a \times b$) pada setiap faktor S-W-O-T. Menghitung skor (a) masing-masing poin faktor dilakukan secara saling bebas (penilaian terhadap sebuah poin faktor tidak boleh dipengaruhi atau mempengaruhi penilaian terhadap poin faktor lainnya. Pilihan rentang besaran skor sangat menentukan akurasi penilaian namun yang lazim digunakan adalah dari 1 sampai 10, dengan asumsi nilai 1 berarti skor yang paling rendah dan 10 berarti skor yang paling tinggi. Perhitungan bobot (b) masing-masing poin faktor dilaksanakan secara saling ketergantungan. Artinya, penilaian terhadap satu poin faktor adalah dengan membandingkan tingkat kepentingannya dengan poin faktor lainnya. Sehingga formulasi perhitungannya adalah nilai yang telah didapat (rentang nilainya sama dengan banyaknya poin faktor) dibagi dengan banyaknya jumlah poin faktor).
2. Melakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dengan W (d) dan faktor O dengan T (e); Perolehan angka ($d = x$) selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu X, sementara perolehan angka ($e = y$) selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu Y.
3. Mencari posisi organisasi yang ditunjukkan oleh titik (x,y) pada kuadran SWOT.

Gambar 4.4
Kuadran SWOT



Kuadran I (positif, positif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah **Progresif**, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

Kuadran II (positif, negatif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah **Diversifikasi Strategi**, artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar

bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karenanya, organisasi disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya.

Kuadran III (negatif, positif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah **Ubah Strategi**, artinya organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Sebab, strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki kinerja organisasi.

Kuadran IV (negatif, negatif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Strategi Bertahan, artinya kondisi internal organisasi berada pada pilihan dilematis. Oleh karenanya organisasi disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi diri.

Berikut hasil penelitian yang diperoleh melalui koesioner yang telah diberikan kepada 158 orang responden perempuan di Kecamatan Mandai :

Tabel 4.12
 Hasil Analisis SWOT (Faktor Internal)

No.	Indikator Kekuatan (S)	SKOR	BOBOT	TOTAL
1.	Peran serta perempuan dalam Musrenbangdes mendapat dukungan penuh Pemerintah (UU, Permendagri, PP)	5,1	3,25	16,58
2.	Pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan	5,11	3,32	16,97
3.	Meningkatkan pembangunan desa/kelurahan melalui Musrenbangdes	5,15	3,47	17,87
4.	Memfaatkan sumber daya alam yang ada di desa/kelurahan	4,59	3,09	14,18
5.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	5,06	3,44	17,41
Total Kekuatan				83,00
No.	Indikator Kelemahan (W)	SKOR	BOBOT	TOTAL
1.	Proses Musrenbang yang panjang (Musyawarah Khusus Perempuan/Musyawarah Warga, Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, dan Propinsi)	4,52	3,05	13,79
2.	Tidak ada kepastian usulan yang akan dilaksanakan/teralisasi	3,77	2,76	10,41
3.	Membutuhkan waktu yang lama	3,86	2,76	10,65
4.	Alokasi anggaran pembangunan yang tersedia	3,76	2,7	10,15
5.	Usulan harus bersaing dengan usulan desa/kelurahan lain	3,94	2,75	10,84
Total Kelemahan				55,83
Selisih Total Kekuatan - Total Kelemahan				27,17

Sumber : Hasil Analisis 2017

Tabel 4.13
Hasil Analisis SWOT (Faktor Eksternal)

No.	Indikator Peluang (O)	SKOR	BOBOT	TOTAL
1.	Bisa memasukkan usulan sebanyak-banyaknya	5,2	3,42	17,78
2.	Pengorganisasian perempuan dalam kegiatan Musrenbangdes	4,85	3,32	16,10
3.	Memobilisasi perempuan untuk ikut serta dalam Musrenbangdes	4,91	3,22	15,81
4.	Dapat berinteraksi/berdiskusi dengan peserta lainnya	4,86	3,06	14,87
5.	Kesempatan untuk berpartisipasi	4,91	3,18	15,61
	Total Peluang			80,18
No.	Indikator Ancaman (T)	SKOR	BOBOT	TOTAL
1.	Tidak terjadi proses pembangunan di desa/kelurahan	3,73	2,75	10,26
2.	Desa/kelurahan dapat tertinggal dari desa/kelurahan lain	3,57	2,61	9,32
3.	Terjadi kemiskinan	2,97	2,44	7,25
4.	Meningkatnya pengangguran	3,03	2,3	6,97
5.	Akan terbentuk lingkungan kumuh	2,76	2,34	6,46
	Total Ancaman			40,25
	Selisih Total Peluang - Total Ancaman			39,93

Sumber : Hasil Analisis 2017

Dari tabel 4.12 dan 4.13 di atas menunjukkan bahwa selisih antara total kekuatan dan total kelemahan diperoleh nilai/titik X yaitu 27,17 dan selisih antara total peluang dan total ancaman diperoleh nilai/titik Y yaitu 39,93 sehingga diperoleh titik (X,Y) yaitu (27,17 , 39,93) atau (+,+). Dari hasil tersebut diketahui bahwa titik (X,Y) berada pada Kuadran I (lihat gambar 4.4), posisi ini menunjukkan bahwa peran serta perempuan dalam kegiatan Musrenbangdes bisa terus ditingkatkan/dikembangkan

partisipasinya secara maksimal dalam pembangunan melalui rekomendasi strategi yang diusulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan adalah batasan tindakan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman . pegangan, dan petunjuk dalam pelaksanaan suatu kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi, arahan, dan penyadaran akan arti pentingnya peran serta perempuan dalam pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan pada masa selanjutnya perempuan akan aktif berpartisipasi dalam segala bentuk pembangunan.
2. Perlu adanya kebijakan yang mensyaratkan bahwa, kehadiran perempuan dalam kegiatan Musrenbangdes sebagai syarat berhasil atau tidaknya Musrenbangdes, sehingga pemerintah memperhatikan kehadiran dan keaktifan perempuan dalam Musrenbangdes.
3. Adanya tata tertib pelaksanaan Musrenbangdes yang mampu mendorong peran dan partisipasi perempuan dalam perumusan dan pengambilan keputusan bersama pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa/kelurahan.
4. Pemerintah diharapkan memberikan suasana kegiatan Musrenbangdes yang menyenangkan bagi peserta perempuan dan fasilitas yang memadai, sehingga perempuan dapat lebih aktif mengeluarkan pendapat, ide, dan pikirannya tanpa ada rasa takut dan ragu.

5. Adanya pelatihan-pelatihan dan penyuluhan-penyuluhan tentang kepribadian, kemandirian, dan kepercayaan diri bagi perempuan, sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan peran serta perempuan dalam Musrenbangdes.
6. Adanya pemberian penghargaan kepada perempuan yang hadir dan aktif dalam Musrenbangdes baik berupa finansial/insentif/materi, pengakuan dari pemerintah, maupun efek pada perasaan, harga diri, kepuasan kerja, atau prestasi. Sehingga dapat meningkatkan motivasi dan tanggung jawab perempuan untuk selalu turut berpartisipasi dalam Musrenbangdes.

F. Sintesis Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros

Partisipasi dalam penelitian ini menggunakan konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Paul Oakley yang memberi pemahaman tentang konsep partisipasi, dengan mengelompokkan ke dalam tiga pengertian pokok, yaitu Partisipasi sebagai kontribusi; Partisipasi sebagai organisasi; dan Partisipasi sebagai pemberdayaan.

Berdasarkan landasan teori dari Oakley, maka disusun definisi konseptual variabel partisipasi perempuan adalah keterlibatan langsung perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes yang meliputi kontribusi perempuan, pengorganisasian perempuan dan pemberdayaan perempuan. Dari definisi konseptual tersebut diperoleh 3 (tiga) dimensi kajian, yakni Dimensi Kontribusi Perempuan, Dimensi Pengorganisasian Perempuan, dan Dimensi Pemberdayaan Perempuan.

Dimensi Kontribusi Perempuan dijabarkan menjadi indikator-indikator : Kontribusi Pemikiran, Kontribusi Dana, Kontribusi Tenaga, dan Kontribusi Sarana.

Dimensi Pengorganisasian Perempuan dijabarkan menjadi indikator-indikator : Model Pengorganisasian, Struktur Pengorganisasian, Unsur-unsur Pengorganisasian, dan Fungsi Pengorganisasian. Dimensi Pemberdayaan Perempuan dijabarkan menjadi indikator-indikator : Peran Perempuan, Aksi Perempuan, Motivasi Perempuan, dan Tanggung jawab Perempuan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, berikut uraian partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dilihat dari kontribusi, pengorganisasian, dan pemberdayaan perempuan.

1. Kontribusi

Kontribusi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes dijabarkan dalam indikator-indikator sebagai berikut :

a. Kontribusi ide/pemikiran

Hasil penelitian kontribusi ide/pemikiran perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes menunjukkan bahwa perempuan yang sangat aktif memberikan idenya hanya 17 orang atau 21,52 %, aktif 34 orang atau 43,04 %, cukup aktif 22 orang atau 27,85 %, dan tidak aktif 6 orang atau 7,59 %. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi perempuan dalam hal ide/pemikiran sudah baik.

b. Kontribusi dana

Hasil penelitian kontribusi dana/uang perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes menunjukkan bahwa perempuan yang sangat aktif memberikan dananya tidak ada atau 0 %, aktif 12 orang atau 15,19 %, cukup aktif 30 orang atau 37,97 %, dan tidak aktif 37 orang atau 46,84 %. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi perempuan dalam hal memberikan dana/uang/sumbangan adalah kurang atau jarang dilakukan.

c. Kontribusi tenaga

Hasil penelitian kontribusi tenaga perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes menunjukkan bahwa perempuan yang sangat aktif memberikan tenaganya hanya 11 orang atau 13,92 %, aktif 42 orang atau 53,16 %, cukup aktif 23 orang atau 29,11 %, dan tidak aktif 3 orang atau 3,80 %. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi perempuan dalam hal tenaga sudah baik.

d. Kontribusi sarana

Hasil penelitian kontribusi sarana perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes menunjukkan bahwa perempuan yang sangat aktif memberikan sarananya hanya 2 orang atau 2,53 %, aktif 24 orang atau 30,38 %, cukup aktif 40 orang atau 50,63 %, dan tidak aktif 13 orang atau 16,46 %. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi perempuan dalam hal sarana cukup baik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes di Kecamatan Mandai

Kabupaten Maros dari tahun ke tahun cukup lebih baik dalam memberikan kontribusinya, dan perlu ditingkatkan lebih baik lagi di masa yang akan datang.

2. Pengorganisasian perempuan

Pengorganisasian perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes dijabarkan dalam indikator-indikator sebagai berikut :

a. Model pengorganisasian

Model pengorganisasian merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur atau mengorganisasikan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah desa menurut pendapat perempuan adalah yang sangat aktif mencapai 44 orang atau 55,70 %, aktif 19 orang atau 24,05 %, cukup aktif 15 orang atau 18,99 %, dan tidak aktif 1 orang atau 1,27 %. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model pengorganisasian perempuan dalam Musrenbangdes sudah sangat baik.

b. Struktur pengorganisasian

Merupakan upaya pemerintah mengorganisasikan perempuan dengan melibatkan mereka dalam struktur kepanitiaan Musrenbangdes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian perempuan dalam struktur kepanitiaan Musrenbangdes yang sangat aktif sebanyak 31 atau 39,24 %, aktif 39 orang atau 49,37 %, cukup aktif 9 orang atau 11,39 %, dan tidak aktif tidak ada atau 0 %. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur pengorganisasian perempuan dalam Musrenbangdes sudah baik.

c. Fungsi pengorganisasian

Merupakan upaya pemerintah mengatur/mengorganisasikan perempuan untuk berpartisipasi dengan memberikan fungsi/manfaatnya dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian perempuan memberikan fungsinya dalam Musrenbangdes yang sangat aktif 31 orang atau 39,24 %, aktif 34 orang atau 43,04 %, cukup aktif 14 orang atau 17,72 %, dan tidak aktif tidak ada atau 0 %. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi pengorganisasian perempuan dalam Musrenbangdes sudah baik.

d. Unsur pengorganisasian

Merupakan unsur/asas/aturan pengorganisasian perempuan dalam kegiatan Musrenbangdes yang harus diikuti untuk mencapai kesepakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian perempuan untuk mengikuti aturan-aturan atau unsur-unsur dalam Musrenbangdes yang sangat aktif 12 orang atau 15,19 %, aktif 40 orang atau 50,63 %, cukup aktif 26 orang atau 32,91 %, dan tidak aktif 1 orang atau 1,27 %. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur pengorganisasian perempuan dalam Musrenbangdes sudah baik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian perempuan untuk memberikan partisipasinya dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros sudah lebih baik, hanya perlu ditingkatkan lebih baik lagi di masa yang akan datang.

3. Pemberdayaan perempuan

Pemberdayaan perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes dijabarkan dalam indikator-indikator sebagai berikut :

a. Peran perempuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan dalam berpartisipasi mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes yang sangat aktif 21 orang atau 26,58 %, aktif 41 orang atau 51,90 %, cukup aktif 16 orang atau 20,25 %, dan tidak aktif 1 orang atau 1,27 %. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa peran perempuan dalam Musrenbangdes sudah baik.

b. Aksi perempuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi perempuan dalam berpartisipasi untuk mempertahankan dan mengawal usulan-usulannya agar menjadi daftar prioritas yang sangat aktif memberikan aksinya 21 orang atau 26,58 %, aktif 37 orang atau 46,84 %, cukup aktif 19 orang atau 24,05 %, dan tidak aktif 2 orang atau 2,53 %. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa aksi perempuan dalam mempertahankan usulannya sudah baik.

c. Motivasi perempuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes, yang sangat aktif memotivasi dirinya 29 orang atau 36,71 %, aktif 39 orang atau 49,37 %, cukup aktif 9 orang atau 11,39 %, dan tidak aktif 2 orang atau 2,53 %. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes sudah baik.

d. Tanggung jawab perempuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab perempuan memberikan partisipasinya untuk kemajuan dan kesejahteraan kaumnya, yang sangat aktif bertanggung jawab atas kemajuan kaumnya 29 orang atau 36,71 %, aktif 34 orang atau 43,04 %, cukup aktif 15 orang atau 18,99 %, dan tidak aktif 1 orang atau 1,27 %. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab perempuan untuk berpartisipasi dalam Musrenbangdes sudah baik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan untuk turut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros sudah baik, hanya perlu ditingkatkan lagi pemberdayaan perempuan dalam Musrenbangdes agar lebih maju lagi di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian partisipasi perempuan yang telah dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator seperti yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros sejauh ini sudah baik, pemerintah sudah melaksanakan program/kegiatan pembangunan termasuk pelaksanaan pengarusutamaan gender yang lebih cocok dengan keadaan dan aspirasi daerah. Dengan semangat reformasi yang berdasarkan tata laksana pemerintahan yang baik, demokratis dan berkeadilan, pelaksanaan Musrenbangdes diharapkan dapat menjadi peluang untuk melaksanakan strategi PUG yaitu suatu strategi pembangunan yang demokratis, mengakomodasi suara dan aspirasi perempuan dan laki-laki serta berkeadilan bagi perempuan dan laki-laki (*keadilan gender*) dalam berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.

Partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros sudah baik ini tidak dibarengi dengan kualitas output atau hasil Musrenbangdes yang baik pula, ini terlihat dari hasil keluaran/output Musrenbangdes berupa usulan kegiatan yang tidak responsif gender (lihat tabel 4.4 di atas) atau kurang sekali usulan yang menyangkut aspirasi perempuan.

G. Sintesis Strategi Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros

Partisipasi tidak datang dengan sendirinya, dibutuhkan strategi-strategi untuk menumbuhkannya dengan pengembangan kemampuan sumber daya manusia khususnya perempuan untuk mendorong partisipasinya dalam Musrenbangdes.

Menurut Sudarmanto (2009), untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia (individu) dalam mendorong kinerja yaitu aspek kompetensi, aspek budaya organisasi, dan aspek sistem penghargaan (*reward system*).

1. Kompetensi (kemampuan)

Menurut Spencer dalam Sudarmanto (2009:53), komponen-komponen kompetensi mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- a. *Motive* (dorongan) adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau dikehendaki seseorang yang menyebabkan tindakan. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap kegiatan atau tujuan tertentu dan menjauh dari yang lain,
- b. *Traits* (ciri, sifat) adalah karakteristik-karakteristik fisik dan respons-respons konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi,

- c. *Self concept* adalah sikap, nilai, dan citra diri seseorang,
- d. *Knowledge* adalah pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu,
- e. *Skill* adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu.

2. Budaya Organisasi

Budaya organisasi adalah kerangka kerja kognitif yang terdiri dari sikap-sikap, nilai-nilai, norma perilaku dan harapan bersama yang dirasakan oleh anggota organisasi (Green Berg & Baron dalam Sudarmanto, 2009).

3. Sistem Penghargaan

Penghargaan (*reward*) memiliki pemahaman penghargaan atau imbalan yang diberikan organisasi kepada anggotanya, baik yang sifatnya materi finansial, materi non finansial, maupun psikis atau non materi (Sudarmanto, 2009).

Kreitner dan Kinicki dalam Sudarmanto (2009;196) membagi penghargaan ke dalam tiga tipe penghargaan :

- a. Finansial/material, merupakan tipe atau bentuk penghargaan yang diberikan organisasi berupa uang atau materi yang berwujud,
- b. Sosial, merupakan tipe atau bentuk penghargaan berupa pengakuan dari lingkungan sosial pekerjaan,
- c. Psikis, merupakan tipe atau bentuk penghargaan dengan memberikan efek pada perasaan, harga diri, kepuasan kerja, atau prestasi.

Salah satu segi yang perlu mendapat perhatian dalam menumbuhkembangkan partisipasi adalah komunikasi, di mana Bintoro Tjokroamidjojo (1986 : 227) menyatakan

bahwa : ...gagasan-gagasan, kebijaksanaan dan rencana hanya akan mendapat dukungan, bila diketahui kemudian dimengerti, bahwa hal-hal tersebut mencerminkan sebagian atau seluruh kepentingan dan aspirasi masyarakat (kelompok masyarakat), kemudian lebih lanjut diterima dengan pengertian oleh masyarakat, bahwa hasil daripada kebijaksanaan rencana tersebut akan betul-betul sebagian atau seluruhnya dipetik oleh masyarakat.

Strategi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan partisipasi menurut Handiman Rico adalah :

1. Peningkatan Kesadaran (*Awareness Raising*)

- Memperkaya konsep – konsep pembangunan partisipatoris dalam pengambilan keputusan publik.
- Mendorong kesadaran eksekutif dan legislatif agar lebih membuka diri terhadap partisipasi perempuan (keadilan dan kesetaraan gender). Kegiatan seminar, workshop, dan pelatihan dilakukan untuk mengangkat aspek partisipasi ke dalam proses pembangunan.
- Mendorong permintaan yang lebih besar untuk partisipasi dan akuntabilitas dengan meningkatkan kesadaran perempuan tentang kebutuhan dan hak mereka berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan publik. Kegiatan utama berupa pendampingan, pelatihan serta kampanye publik.

2. Advokasi Kebijakan (*Policy Advocacy*)

- Membangun legal framework berupa kebijakan dan peraturan yang mendorong partisipasi perempuan.
- Memberikan insentif/penghargaan terhadap inovasi untuk mendorong partisipasi.

- Mendorong terbentuknya berbagai partnership antara pemerintah dengan komponen civil society.

3. Pengembangan Institusi (*Institution Building*)

- Mendorong terbentuknya tata tertib Musrenbang yang responsif gender sebagai wujud konsultasi publik.
- Memperbaiki kualitas partisipasi antara lain dengan menjamin keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok marjinal lainnya dalam proses perencanaan.
- Memfasilitasi upaya penguatan institusi melalui *civil education* untuk membangun dan mengembangkan kekuatan serta mengasah keterampilan perempuan berpartisipasi secara efektif.

4. Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*)

- Mengembangkan berbagai metode alternatif dan teknik – teknik partisipasi.
- Menyediakan *skilled facilitator* yang handal untuk memfasilitasi proses partisipasi perempuan.
- Membangun system informasi dan komunikasi berbagai komunitas (*community based development*).
- Mengkader perempuan untuk menjadi fasilitator handal.
- Melakukan pelatihan penggunaan metode partisipatoris baik untuk aparat pemerintah, aktivis, LSM, maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan Musrenbangdes sangat dimungkinkan untuk terus dilaksanakan dengan cara menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes yaitu :

1. Meningkatkan partisipasi perempuan melalui pelatihan-pelatihan dan penyuluhan penyuluhan sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan perempuan,
2. Memberikan suasana kegiatan Musrenbangdes dengan suasana seperti berada di rumah sendiri, sehingga perempuan dapat dengan leluasa mengeluarkan pendapat, ide, pikiran mereka secara gamblang,
3. Memberikan penghargaan kepada perempuan berupa diikutkan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Desa/Kelurahan.

Partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes dapat dilakukan dalam dua langkah yaitu melalui pemberdayaan dan kebijakan :

1. Penguatan perempuan melalui pemberdayaan, yang terdiri dari :
 - a. Melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, workshop ataupun sarana lain berupa pencerahan untuk menjelaskan atau meluruskan pemahaman tentang konsep seks (jenis kelamin) dengan konsep gender, yaitu kesempatan yang sama dan adil antara laki-laki dan perempuan dalam memikul tanggung jawab.
 - b. Penguatan kapasitas masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat.
 - c. Pembentukan kelembagaan/organisasi kewanitaan.
2. Penguatan perempuan melalui kebijakan, dengan mengeluarkan kebijakan yang responsif terhadap peran perempuan, seperti :
 - a. Menciptakan tata tertib Musrenbangdes, dimana perempuan diberikan porsi untuk mengungkapkan program-programnya, pengaturan peserta dengan keterwakilan perempuan 30 % dari unsur organisasi atau aktivis perempuan.

- b. Adanya program atau kegiatan prioritas yang menyangkut masalah pemberdayaan perempuan di tingkatan desa serta memperoleh alokasi anggaran.
- c. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur partisipasi optimal perempuan dalam susunan kepanitiaan.

H. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil kajian literatur, observasi, analisis, serta tanggapan penduduk perempuan yang diperoleh dari hasil survey yang telah dilakukan mengenai tingkat partisipasi perempuan Kecamatan Mandai dalam Musrenbangdes, diperoleh beberapa temuan penelitian sebagai berikut :

1. Kepala Desa/Lurah se-Kecamatan Mandai tidak melaksanakan Musyawarah Khusus Perempuan yaitu musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang hanya dihadiri oleh perempuan untuk membahas gagasan-gagasan khusus perempuan. Musyawarah Khusus Perempuan dilaksanakan untuk mendorong partisipasi perempuan pada tingkat paling bawah dalam rangka memperkuat kapasitas dan kemandirian kaum perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan juga untuk menentukan usulan kegiatan yang merupakan apresiasi perempuan, memilih wakil perempuan untuk mengikuti Musrenbang desa/kelurahan, dan memilih perempuan yang terlibat dalam penulisan usulan. Karena Musyawarah Khusus Perempuan tidak dilaksanakan, maka usulan kegiatan perempuan kurang atau sedikit sekali yang diakomodasi atau masuk dalam daftar skala prioritas yang akan diusulkan dalam Musrenbangdes.
2. Pengalaman berorganisasi perempuan Kecamatan Mandai masih kurang, sehingga cenderung untuk tidak hadir dan tidak aktif dalam Musrenbangdes.

3. Kurangnya usulan kegiatan yang sesuai aspirasi perempuan dalam Musrenbangdes di setiap desa dan kelurahan di Kecamatan Mandai menunjukkan bahwa daftar usulan skala prioritas masih menjadi keputusan/kekuasaan pemerintah atau Kepala Desa/Lurah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbang Desa/Kelurahan di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros sejauh ini sudah baik dilihat dari kontribusi, pengorganisasian, dan pemberdayaan perempuan. Pemerintah sudah melaksanakan pengarusutamaan gender yang lebih baik yang sesuai dengan keadaan dan aspirasi daerah, berdasarkan tata laksana pemerintahan yang baik, demokratis dan berkeadilan. Namun partisipasi perempuan yang sudah baik ini tidak dibarengi dengan banyaknya usulan kegiatan yang merupakan aspirasi perempuan yang diakomodir dalam prioritas usulan kegiatan desa/kelurahan, sehingga dari sekian banyak usulan yaitu 168 usulan hanya 32 usulan (19,05 %) merupakan aspirasi perempuan yang masuk daftar skala prioritas pembangunan desa/kelurahan. Kegiatan Musrenbangdes seharusnya menjadi harapan/peluang untuk melaksanakan strategi PUG yaitu suatu strategi pembangunan yang demokratis, mengakomodasi suara dan aspirasi perempuan dan laki-laki serta berkeadilan bagi perempuan dan laki-laki (*keadilan gender*) dalam berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan, dimana dengan jumlah penduduk perempuan Kecamatan Mandai yang lebih dari 50 % merupakan aset/modal yang besar bagi pembangunan, bila mereka diberi kesempatan dan hak-

hak yang sama dengan laki-laki. Adapun faktor pendukung dan penghambat partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes dapat dibagi dalam faktor internal yaitu faktor-faktor pendukung dan penghambat yang ada dalam diri perempuan, dan faktor eksternal yaitu faktor-faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari luar atau lingkungan perempuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros adalah umur/usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, penghasilan, dan lamanya tinggal/bermukim.

2. Strategi peningkatan peran serta perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros adalah dengan kebijakan dan pemberdayaan. Kebijakan yaitu dengan menciptakan tata tertib Musrenbangdes, dimana perempuan diberikan porsi untuk mengungkapkan program-programnya, pengaturan peserta dengan keterwakilan perempuan 30 % dari unsur organisasi atau aktivis perempuan, dan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur partisipasi optimal perempuan dalam susunan kepanitiaan. Pemberdayaan yaitu melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, untuk menjelaskan atau meluruskan pemahaman tentang konsep seks (jenis kelamin) dengan konsep gender, yaitu kesempatan yang sama dan adil antara laki-laki dan perempuan dalam memikul tanggung jawab, penguatan kapasitas perempuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, dan pembentukan kelembagaan/organisasi kewanitaan. Peningkatan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdesdes di

Kecamatan Mandai Kabupaten Maros juga dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan kontribusi perempuan, pengorganisasian perempuan, dan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan Musrenbangdes.

B. Saran

1. Kepada pemerintah agar lebih mengoptimalkan peran serta/partisipasi perempuan dalam pembangunan dengan lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan perempuan yaitu dengan pembangunan sarana dan prasarana tempat untuk kegiatan pelatihan/pendidikan (seperti kursus menjahit, memasak, tata rias, dll), tempat penitipan anak bagi perempuan yang bekerja, serta kegiatan penyuluhan kesehatan (yaitu dengan pembangunan posyandu, playgroup, dll).
2. Membentuk organisasi-organisasi/lembaga-lembaga kewanitaan di desa/kelurahan sebagai wadah peningkatan pemberdayaan dan pengorganisasian perempuan dalam menyampaikan aspirasi/ide-idenya dalam pembangunan demi kebutuhan dan kepentingan perempuan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Bagi masyarakat khususnya perempuan agar lebih memotivasi dirinya untuk ikut bertanggung jawab atas pembangunan, perkembangan, dan pertumbuhan wilayah desa/kelurahan di mana dia tinggal, dengan memaksimalkan faktor-faktor pendukung yang ada dan meminimalkan faktor-faktor penghambat yang selalu menghambat partisipasi perempuan dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arif Tiro, Muhammad dan Arbianingsih. 2011, *Teknik Pengambilan Sampel*. Makassar: Andira Publisher.
- Abdul Latif, Dega. 2012, *Teori Feminisme (Gender)*. Makassar: PPS UNM.
- Bintarto. 1989, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Kab. Maros. 2014, *Kecamatan Mandai Dalam Angka*. Maros: BPS Kab. Maros.
- Djoeffan, Sri Hidayati. 2000, *Gerakan Feminisme di Indonesia : Tantangan dan Strategi Mendatang*. Makalah. UNISBA.
- Dika. 2011, *Partisipasi Masyarakat*. (<http://dika-anpanama.blogspot.co.id/2011/10/partisipasi-masyarakat.html>). Didownload 19 Juli 2017.
- Djunaedi, Achmad. 2012, *Proses Perencanaan Wilayah dan Kota*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan Kedeputian Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan. 2007, *Analisis Gender Dalam Perencanaan Pembangunan*. Laporan Akhir. Kementerian PPN/Bappenas.
- Elzafina. 2011, *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Melalui Peran Fasilitator Musrenbang di Kota Solok (Kasus Kelurahan Vi Suku, KTK, Tanjung Paku dan Kota Panjang)*. Artikel. Universitas Andalas.
- Ekawati, Sri. 2010, *Partisipasi Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Firmansyah, Saca. 2009, *Partisipasi Masyarakat*. (<https://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>). Didownload 23 Agustus 2015.
- Faedhoni, Mokhammad. 2014, *Sinkronisasi Visi Misi Kepala Desa Dengan Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang Desa di Kecamatan Jekulo Dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rencana Kerja Pembangunan Desa Berkelanjutan*. Tesis. Universitas Muria Kudus.

- Harto Wibowo, Agus. 2009, Analisis Perencanaan Partisipatif. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Jume'edi. 2005, Peran Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Nelayan di Kelurahan Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang.
- Kodoatie, Robert J. 2005, Pengantar Manajemen Infrastruktur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartiko Widi, Restu. 2010, Asas Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kementrian PPN, Bappenas. 2013, Pembangunan Kesetaraan Gender Background Study RPJMN III (2015-2019). Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bappenas.
- Kalyanamitra. 2010, Kajian Partisipasi Perempuan Dalam Musrenbang di Nangroe Aceh Darussalam. Jakarta.
- Kalyanamitra. 2011, Menelusik Partisipasi Perempuan Dalam Musrenbang: Paper Kajian Terhadap Kebijakan-Kebijakan Terkait. Jakarta.
- Motte, Joseph. 2005, Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Ma'arif, Samsul (dkk.). 2010, Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Semarang. Jurnal. Universitas Diponegoro.
- Murtiyanto, Nawa. 2011, Partisipasi Masyarakat (Teori Ringkas). ([https://bagasaskara.wordpress.com/2011/10/12/partisipasi - masyarakat - teori-ringkas/](https://bagasaskara.wordpress.com/2011/10/12/partisipasi-masyarakat-teori-ringkas/)) Didownload 23 Agustus 2015.
- Nugroho, Riant. 2008, Gender dan Strategi Pengarusutamanya di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Novia, Windy. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Kashiko Press.
- Nasution, Erwinsyah Putra. 2010, Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Medan Area Kota Medan. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Purnamasari, Irma. 2008, Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Tesis. Universitas Diponegoro.

- Pranowo, Dian. 2009, Model Penguatan Peran Perempuan di Musrenbangdes Dalam Rangka Pembangunan Desa Responsif Gender. Id.scribd.com/doc/19169182/Model-Penguatan-Peran-Perempuan-Dalam-Musrenbangdes#scribd. Didownload 22 Mei 2015.
- Pasaribu, Vera A.R. 2006, Kesetaraan dan Keadilan Gender. Karya Ilmiah. Universitas HKBP NOMMENSEN: Medan.
- Permana Putri, Anggita. 2009, Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Skripsi. Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kab. Maros.
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Penyusunan RKP Desa.
- Rangkuti, Freddy. 1997, Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rico, Handiman. Kebijakan Nasional Dalam Perencanaan Tata Ruang “Merealisasikan Hak Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang”. Bogor: Divisi Riset JKPP.
- Rusdy Borneo, Yuliamus. 2011, Dasar Hukum Musrenbang. (<http://pemerintahnilmu.blogspot.com/2011/02/dasar-hukum-musrenbang.html>). Didownload 07 Mei 2015.
- Sudarmanto. 2009, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. 2009, Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiawan, Afriandi, dkk. 2011, Gender dan Pembangunan. Paper Kelompok. Universitas Gadjah Mada.
- Sri Ayu, Utin, dkk. 2013, Pelaksanaan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Jurnal Tesis. Universitas Tanjung Pura.
- Salman, Muhammad. 2009, Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008. Tesis. Universitas Sumatera Utara.

- Sri Panca Sari, Desi. 2004, Kajian Tentang Aktivitas Perempuan Pedesaan dan Kualitas Lingkungan Hidup (Studi Kasus: Aktivitas Perempuan di Daerah Tangkapan Air Danau Toba Desa Pengobatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo Sumatera Utara). Jurnal. Universitas Sumatera Utara.
- Syafutrieza, Yuniza. 2015, Peran Serta Masyarakat. <http://yunizasyafutrieza.blogspot.com/2011/05/peran-serta-masyarakat.html>. Didownload 07 Mei 2015.
- Tarigan, Robinson. 2005, Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Turindra, Azis. 2009, Pengertian Partisipasi. (<http://turindraatp.blogspot.com/2009/06/pengertian-partisipasi.html>). Didownload 23 Agustus 2015.
- Usman, Sunyoto. 1998, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Uwes Qoroni, Akhmad. 2005, Efektivitas Musrenbangdes Dalam Perencanaan Infrastruktur Pedesaan Berdasarkan Kondisi dan Potensi Wilayah di Kabupaten Tegal. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Wikipedia. 2015, <http://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi>. Didownload 07 Mei 2015.
- Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_kritis. Didownload Kamis, 7 Desember 2017.
- Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme>. Didownload Rabu, 6 Desember 2017.
- Zubaedi. 2013, Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik. Jakarta: Prenadamedia Group.

Kuisisioner Penelitian

“Peran Serta Perempuan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa”

I. IDENTITAS RESPONDEN

- a. Nama :
- b. Alamat :

II. KARAKTERISTIK RESPONDEN

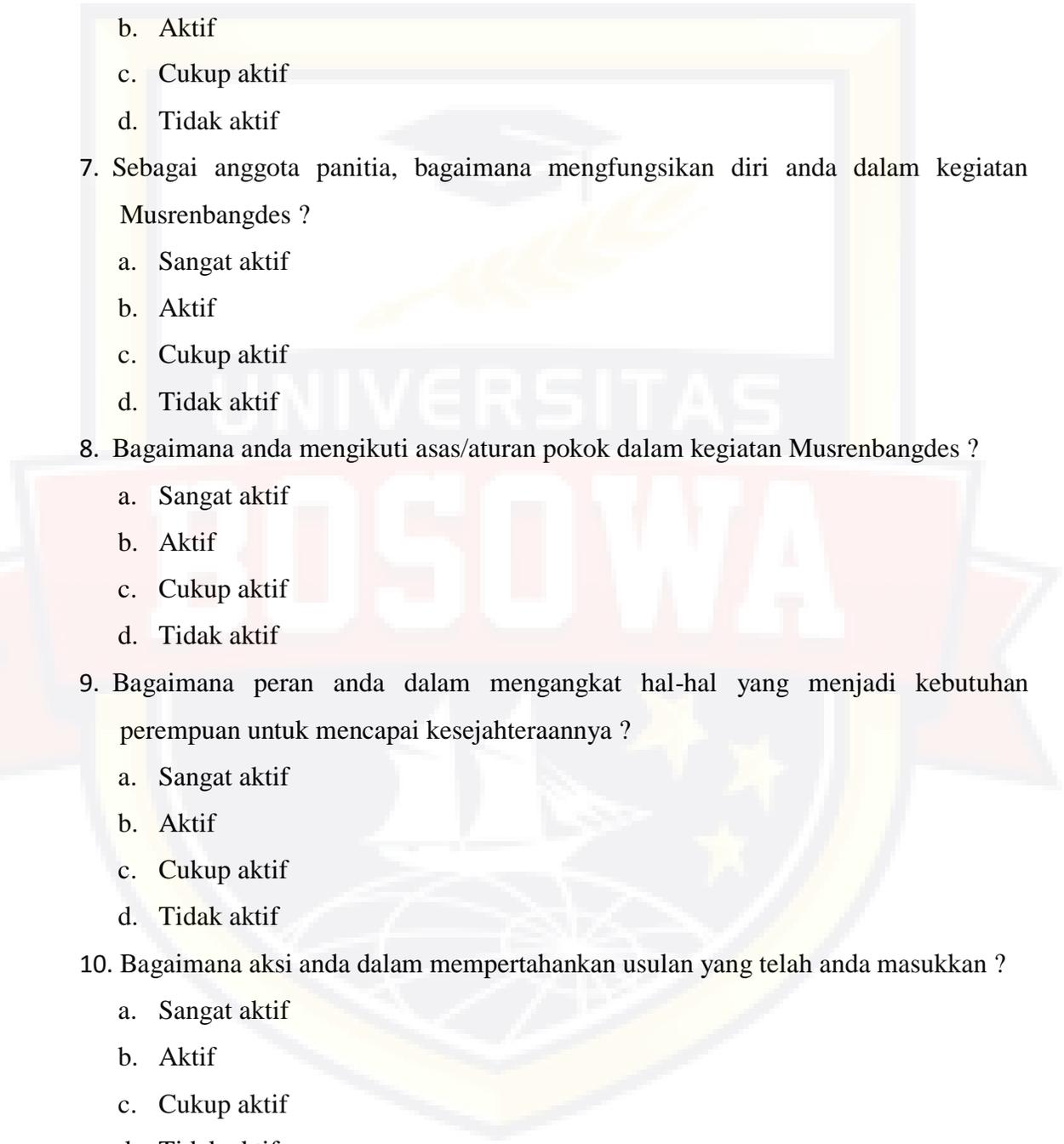
- a. Umur :
- b. Pendidikan :
- c. Pekerjaan :
- d. Penghasilan :
- e. Lama Bermukim : tahun

III. PETUNJUK PENGISIAN

1. Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai dengan pendapat anda dengan memberi tanda silang (X) pada kolom yang telah disediakan.
2. Jika anda salah memilih, maka lingkarilah jawaban yang keliru tersebut kemudian pilihlah jawaban yang paling sesuai.
3. Kode pilihan :
 - a. SA = Sangat Aktif
 - b. A = Aktif
 - c. CA = Cukup Aktif
 - d. TA = Tidak Aktif

IV. PERTANYAAN

1. Bagaimana kontribusi anda dalam memberikan ide/pemikiran dalam kegiatan Musrenbangdes ?
 - a. Sangat aktif
 - b. Aktif
 - c. Cukup aktif
 - d. Tidak aktif
2. Bagaimana kontribusi anda dalam memberikan sumbangan dana/uang untuk pelaksanaan kegiatan Musrenbangdes ?
 - a. Sangat aktif
 - b. Aktif
 - c. Cukup aktif
 - d. Tidak aktif
3. Bagaimana kontribusi anda dalam memberikan tenaga demi kelancaran kegiatan Musrenbangdes ?
 - a. Sangat aktif
 - b. Aktif
 - c. Cukup aktif
 - d. Tidak aktif
4. Bagaimana kontribusi anda dalam memberikan sarana yang representatif untuk digunakan dalam kegiatan Musrenbangdes ?
 - a. Sangat aktif
 - b. Aktif
 - c. Cukup aktif
 - d. Tidak aktif
5. Dalam kegiatan Musrenbangdes, bagaimana model/cara pemerintah desa mengatur/mengorganisasikan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut ?
 - a. Sangat aktif
 - b. Aktif
 - c. Cukup aktif
 - d. Tidak aktif

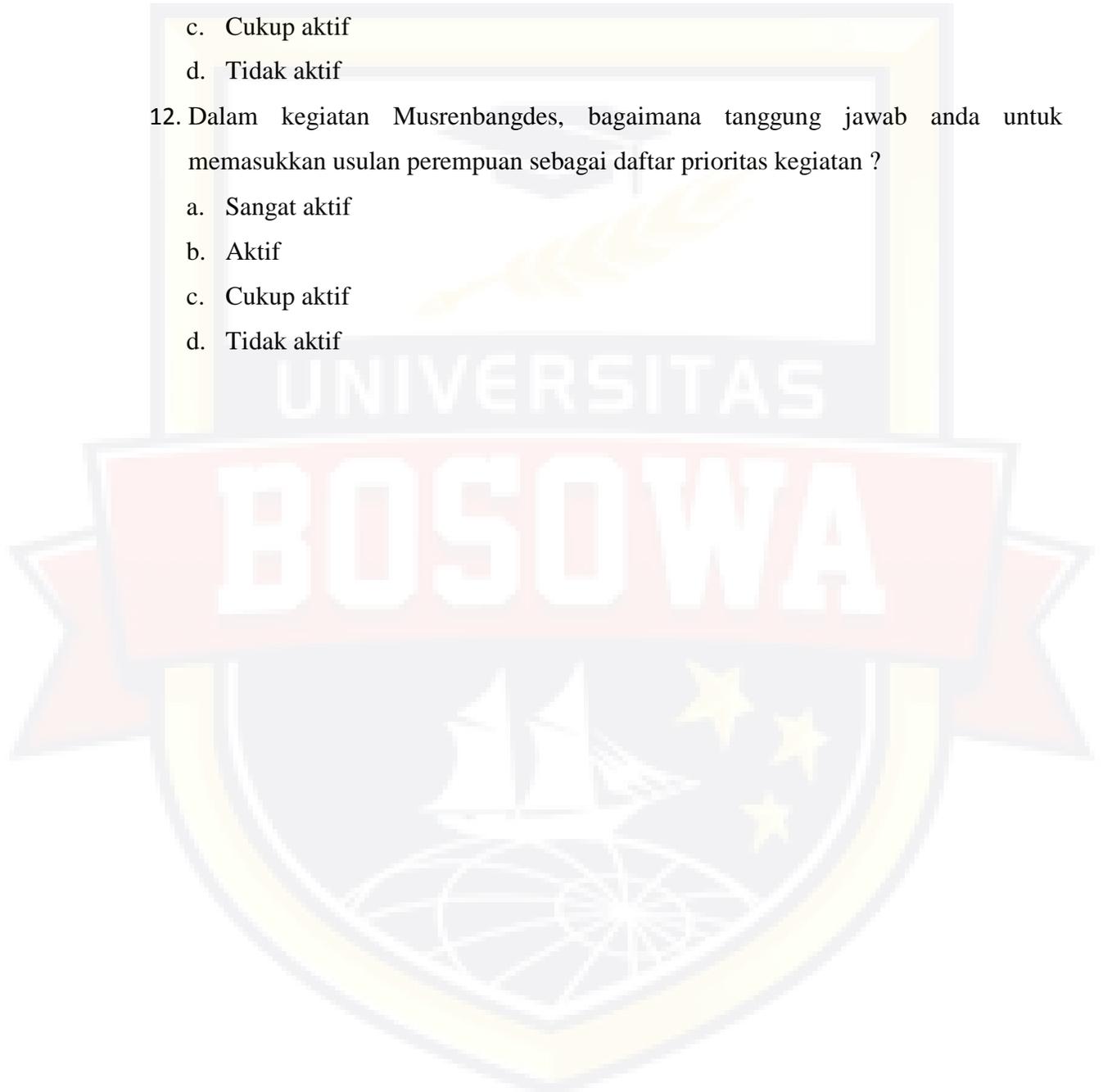
- 
6. Bila anda ditunjuk sebagai anggota dalam struktur kepanitiaian Musrenbangdes, bagaimana anda melaksanakannya ?
 - a. Sangat aktif
 - b. Aktif
 - c. Cukup aktif
 - d. Tidak aktif
 7. Sebagai anggota panitia, bagaimana mengfungsikan diri anda dalam kegiatan Musrenbangdes ?
 - a. Sangat aktif
 - b. Aktif
 - c. Cukup aktif
 - d. Tidak aktif
 8. Bagaimana anda mengikuti asas/aturan pokok dalam kegiatan Musrenbangdes ?
 - a. Sangat aktif
 - b. Aktif
 - c. Cukup aktif
 - d. Tidak aktif
 9. Bagaimana peran anda dalam mengangkat hal-hal yang menjadi kebutuhan perempuan untuk mencapai kesejahteraannya ?
 - a. Sangat aktif
 - b. Aktif
 - c. Cukup aktif
 - d. Tidak aktif
 10. Bagaimana aksi anda dalam mempertahankan usulan yang telah anda masukkan ?
 - a. Sangat aktif
 - b. Aktif
 - c. Cukup aktif
 - d. Tidak aktif

11. Bagaimana motivasi anda mengikuti kegiatan Musrenbangdes ?

- a. Sangat aktif
- b. Aktif
- c. Cukup aktif
- d. Tidak aktif

12. Dalam kegiatan Musrenbangdes, bagaimana tanggung jawab anda untuk memasukkan usulan perempuan sebagai daftar prioritas kegiatan ?

- a. Sangat aktif
- b. Aktif
- c. Cukup aktif
- d. Tidak aktif



KOESIONER RISET SWOT

“Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbangdes”

Petunjuk pengisian :

- a. Pilih salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai dengan pendapat anda dengan memberi tanda (X) pada kolom yang telah disediakan
- b. Jika salah memilih, maka lingkariilah jawaban yang keliru tersebut, kemudian pilihlah jawaban yang paling benar.

Kode pilihan :

Penilaian kondisi saat ini :
kepentingan)

Angka 1 = Sangat Kurang

Angka 2 = Kurang

Angka 3 = Cukup

Angka 4 = Agak Baik

Angka 5 = Baik

Angka 6 = Sangat Baik

Penilaian Urgensi (tingkat

Angka 1 = Tidak Urgen

Angka 2 = Kurang Urgen

Angka 3 = Urgen

Angka 4 = Sangat Urgen

No.	Indikator Kekuatan (S)	Penilaian Kondisi Saat Ini						Urgensi Penanganan			
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
1.	Peran serta perempuan dalam Musrenbangdes mendapat dukungan penuh Pemerintah (UU, Permendagri, PP)										
2.	Pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan										
3.	Meningkatkan pembangunan desa/kelurahan melalui Musrenbangdes										
4.	Memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa/kelurahan										
5.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat										

No.	Indikator Kelemahan (W)	Penilaian Kondisi Saat Ini						Urgensi Penanganan				
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	
1.	Proses Musrenbang yang panjang (Musyawarah Khusus Perempuan/Musyawarah Warga, Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, dan Propinsi)											
2.	Tidak ada kepastian usulan yang akan dilaksanakan/terrealisasi											
3.	Membutuhkan waktu yang lama											
4.	Alokasi anggaran pembangunan yang tersedia											
5.	Usulan harus bersaing dengan usulan desa/kelurahan lain											

No.	Indikator Peluang (O)	Penilaian Kondisi Saat Ini						Urgensi Penanganan				
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	
1.	Bisa memasukkan usulan sebanyak-banyaknya											
2.	Pengorganisasian perempuan dalam kegiatan Musrenbangdes											
3.	Memobilisasi perempuan untuk ikut serta dalam Musrenbangdes											
4.	Dapat berinteraksi/berdiskusi dengan peserta lainnya											
5.	Kesempatan untuk berpartisipasi											

No.	Indikator Ancaman (T)	Penilaian Kondisi Saat Ini						Urgensi Penanganan				
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	
1.	Tidak terjadi proses pembangunan di desa/kelurahan											
2.	Desa/kelurahan dapat tertinggal dari desa/kelurahan lain											
3.	Terjadi kemiskinan											
4.	Meningkatnya pengangguran											
5.	Akan terbentuk lingkungan kumuh											



DATA PENELITIAN KONTRIBUSI PEREMPUAN

No.	Nama	Umur (Th.)	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan (Rp)	Lama Ber mukim (Th.)	Kontribusi			
							Ide	Dana	Tenaga	Sarana
1	Resky Febriani	26	S-1	Honoror	1,250,000	5	CA	A	A	CA
2	Mirawati	26	SMA	Honoror	500,000	7	CA	TA	A	CA
3	Bulan Rahayu, SP	27	S-1	Bendahara UPK	1,300,000	6	TA	TA	TA	TA
4	Sitti Zulaeha	28	S-1	IRT	0	5	CA	TA	CA	CA
5	Melisa	28	S-1	Honoror	1,250,000	5	A	TA	A	TA
6	Nurjannah	28	SMA	Honoror	500,000	28	CA	TA	CA	TA
7	Dewi Jayati	29	SMA	Honoror	500,000	20	TA	TA	SA	A
8	Fajeriah	29	S-1	Honoror	500,000	7	A	TA	A	CA
9	Wahyuni	30	SMA	Wiraswasta	2,500,000	30	TA	TA	TA	TA
10	St. Raehana	30	S-2	Guru	3,000,000	10	SA	CA	A	CA
11	Ratnawati	32	SMA	Honoror	500,000	5	TA	TA	CA	TA
12	Diana	33	SMA	PNS	3,000,000	15	CA	TA	A	CA
13	Sitti Hapsah	33	SMA	PNS	2,300,000	5	CA	CA	A	CA
14	Nur Santi	33	SMA	PNS	2,500,000	33	CA	CA	CA	TA
15	Ernawati	33	SMA	PNS	2,300,000	10	CA	TA	CA	CA
16	Irmawati	33	SMA	PNS	2,300,000	33	A	CA	A	CA
17	Herawati	34	S-2	PNS	3,000,000	13	SA	TA	A	A
18	Sarwenda	34	S-1	PNS	2,750,000	15	CA	TA	CA	CA
19	Nurhaedah	34	S-1	PNS	2,300,000	10	A	TA	A	CA
20	Mariani	34	SMA	PNS	3,000,000	34	CA	CA	CA	CA
21	Hasriani	34	S-1	PNS	3,500,000	34	A	TA	SA	A
22	Agustina	34	S-1	PNS	4,248,000	7	CA	CA	CA	CA
23	Hj. Nurhaenah	35	S-1	Honoror	1,250,000	25	SA	A	A	A
24	Nuraeni , S.Pd	35	S-1	Guru	4,000,000	30	SA	CA	A	A
25	Nur Azizah	35	S-1	PNS	2,750,000	23	A	TA	A	CA
26	Nunung Hermawati	36	SMA	PNS	2,450,000	14	A	CA	CA	CA
27	A. Vivi Elfira Nur	36	S-1	PNS	3,500,000	36	A	TA	SA	A
28	Sulastri	36	SMA	PNS	3,000,000	20	A	CA	A	CA
29	Raodah Arsyad, SSTP, M.Si	36	S-2	PNS	3,855,000	15	A	CA	A	CA
30	Rahmawati	36	SMA	PNS	2,500,000	5	CA	TA	CA	TA
31	Irna Dewi, S.Pd	37	S-1	Guru	3,500,000	11	CA	TA	CA	CA
32	Rahmania, S.Sos	37	S-1	PNS	3,000,000	30	A	CA	A	A
33	Wahyuni, S.Sos	37	S-1	PNS	4,000,000	10	A	CA	A	CA
34	Nadirah	38	SMA	PNS	2,780,000	38	A	CA	A	A
35	Nursakti	38	SMA	PNS	2,500,000	20	A	CA	A	TA
36	A. Roswati, SE	38	S-1	PNS	3,500,000	5	A	TA	A	CA
37	Hasria Puji Atma	38	SMA	PNS	3,000,000	38	TA	TA	CA	CA
38	Susilawati	38	SMA	PNS	3,000,000	15	A	TA	SA	A
39	Asrida Dadauleng, S.Pd	38	S-1	Guru	3,551,000	5	CA	TA	CA	CA
40	Nur Asmi	38	SMA	PNS	2,800,000	15	CA	TA	CA	CA
41	Adriati Nilasari	39	SMA	PNS	2,300,000	17	CA	TA	A	CA
42	Surviani, SE, M.Si	39	S-2	PNS	3,500,000	5	SA	A	A	CA
43	Hj. Asmawati	39	S-1	PNS	3,000,000	15	A	TA	A	TA
44	Hasma Fitri	39	SMA	PNS	2,500,000	15	CA	TA	A	A
45	A. Widyawati AB, S.Sos, MM	40	S-2	PNS	3,700,000	20	SA	CA	A	CA
46	Juliati	40	SD	Kader Posyandu	500,000	19	A	A	CA	CA
47	Nadjemia	41	SMA	PNS	2,000,000	8	CA	CA	CA	CA
48	Andi Rahmah	41	S-1	PNS	3,000,000	8	A	TA	A	TA
49	A. Dewi Indrawati	41	S-1	PNS	4,781,000	16	A	CA	CA	TA
50	Nasma Ifmawati Syam, S.Sos	42	S-1	PNS	3,000,000	42	CA	CA	A	A

51	Mardiana	42	S-1	PNS	4,200,000	8	A	A	A	A
52	Nurlinda Yakub, SE	43	S-1	PNS	4,000,000	25	A	A	A	A
53	Subaedah	43	S-1	PNS	2,000,000	43	CA	TA	SA	A
54	Hj. Buana, SE	43	S-1	PNS	3,500,000	10	A	CA	CA	CA
55	Aslinda, SH	44	S-1	PNS	4,000,000	22	CA	TA	CA	A
56	A. Adriani	44	SMA	Staf Desa	1,250,000	20	SA	TA	SA	CA
57	Rosmawati, SP	45	S-1	PNS	3,000,000	45	A	A	A	A
58	Hj. Normah	45	S-1	PNS	2,700,000	45	A	A	CA	A
59	Sukmawati	47	SMA	IRT	0	27	A	TA	TA	CA
60	Nur B Siang	48	SMA	Wiraswasta	2,500,000	48	A	CA	A	TA
61	Sitti Sulaehana, SE	48	S-1	PNS	3,000,000	5	SA	CA	A	A
62	Salminah, SE	48	S-1	PNS	3,000,000	8	SA	CA	A	A
63	Dra. Nurhaeni	49	S-1	PNS	3,000,000	1	A	TA	A	A
64	Salimang	49	SMK	PNS	2,500,000	49	A	CA	A	SA
65	Saenab	49	SMP	IRT	0	17	CA	CA	CA	CA
66	A. Nurwati, S.Sos	49	S-1	PNS	4,000,000	49	SA	A	SA	A
67	A. Suryani Amiruddin	52	S-1	PNS	4,300,000	50	SA	CA	A	CA
68	Hj. Sitti Hasnih	52	S-2	Guru	5,000,000	40	SA	CA	SA	A
69	Hawiah	53	S-1	PNS	3,022,500	53	A	TA	A	TA
70	Dra. Hj. Hasbiah	54	S-1	PNS	4,000,000	30	SA	A	SA	A
71	Hj. A. Suryani Syarif	54	S-1	Guru	5,000,000	12	SA	A	SA	SA
72	Norlang	54	SMA	PNS	3,000,000	10	A	CA	A	CA
73	Hj. Sitti Hasnih, S.Pd	56	S-1	Guru	4,500,000	24	A	A	SA	A
74	Hajrah	56	SMA	IRT	0	50	A	CA	A	CA
75	Hj. Sumarni	58	S-1	PNS	3,000,000	17	TA	TA	CA	CA
76	Hj. Rabiah	58	S-1	Pensiunan	4,000,000	58	SA	CA	CA	CA
77	Suharli	60	D-3	Pensiunan	4,000,000	50	SA	CA	A	CA
78	Halijah BSW	60	S-1	Pensiunan	2,500,000	20	A	TA	A	CA
79	A. Munawarrah	60	SMA	Wiraswasta	2,000,000	50	SA	TA	A	CA

DATA PENELITIAN PENGORGANISASIAN PEREMPUAN

No.	Nama	Umur (Th.)	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan (Rp)	Lama Ber mukim (Th.)	Pengorganisasian			
							Model	Struktur	Fungsi	Unsur
1	Resky Febriani	26	S-1	Honoror	1,250,000	5	CA	A	A	CA
2	Mirawati	26	SMA	Honoror	500,000	7	SA	SA	SA	SA
3	Bulan Rahayu, SP	27	S-1	Bendahara UPK	1,300,000	6	A	SA	SA	A
4	Sitti Zulaeha	28	S-1	IRT	0	5	A	A	A	A
5	Melisa	28	S-1	Honoror	1,250,000	5	SA	A	A	CA
6	Nurjannah	28	SMA	Honoror	500,000	28	A	CA	CA	CA
7	Dewi Jayati	29	SMA	Honoror	500,000	20	A	A	SA	A
8	Fajeriah	29	S-1	Honoror	500,000	7	A	A	A	CA
9	Wahyuni	30	SMA	Wiraswasta	2,500,000	30	TA	A	A	A
10	St. Raehana	30	S-2	Guru	3,000,000	10	SA	SA	SA	A
11	Ratnawati	32	SMA	Honoror	500,000	5	A	A	A	TA
12	Diana	33	SMA	PNS	3,000,000	15	CA	A	SA	A
13	Sitti Hapsah	33	SMA	PNS	2,300,000	5	SA	SA	SA	A
14	Nur Santi	33	SMA	PNS	2,500,000	33	A	A	A	A
15	Ernawati	33	SMA	PNS	2,300,000	10	SA	A	A	CA
16	Irmawati	33	SMA	PNS	2,300,000	33	SA	A	A	A
17	Herawati	34	S-2	PNS	3,000,000	13	SA	SA	SA	SA
18	Sarwenda	34	S-1	PNS	2,750,000	15	A	A	A	A
19	Nurhaedah	34	S-1	PNS	2,300,000	10	SA	A	A	A
20	Mariani	34	SMA	PNS	3,000,000	34	A	A	A	A
21	Hasriani	34	S-1	PNS	3,500,000	34	CA	SA	A	A
22	Agustina	34	S-1	PNS	4,248,000	7	CA	CA	CA	CA
23	Hj. Nurhaenah	35	S-1	Honoror	1,250,000	25	A	A	SA	SA
24	Nuraeni , S.Pd	35	S-1	Guru	4,000,000	30	SA	SA	SA	A
25	Nur Azizah	35	S-1	PNS	2,750,000	23	SA	A	A	A
26	Nunung Hermawati	36	SMA	PNS	2,450,000	14	SA	A	A	CA
27	A. Vivi Elfira Nur	36	S-1	PNS	3,500,000	36	CA	SA	A	A
28	Sulastri	36	SMA	PNS	3,000,000	20	SA	SA	SA	A
29	Raodah Arsyad, SSTP, M.Si	36	S-2	PNS	3,855,000	15	SA	SA	SA	SA
30	Rahmawati	36	SMA	PNS	2,500,000	5	SA	A	A	CA
31	Irna Dewi, S.Pd	37	S-1	Guru	3,500,000	11	SA	A	A	CA
32	Rahmania, S.Sos	37	S-1	PNS	3,000,000	30	SA	SA	SA	A
33	Wahyuni, S.Sos	37	S-1	PNS	4,000,000	10	SA	A	A	A
34	Nadirah	38	SMA	PNS	2,780,000	38	SA	A	A	A
35	Nursakti	38	SMA	PNS	2,500,000	20	SA	A	A	A
36	A. Roswati, SE	38	S-1	PNS	3,500,000	5	CA	A	CA	CA
37	Hasria Puji Atma	38	SMA	PNS	3,000,000	38	SA	SA	SA	CA
38	Susilawati	38	SMA	PNS	3,000,000	15	CA	SA	A	A
39	Asrida Dadauleng, S.Pd	38	S-1	Guru	3,551,000	5	SA	SA	SA	A
40	Nur Asmi	38	SMA	PNS	2,800,000	15	SA	A	A	CA
41	Adriati Nilasari	39	SMA	PNS	2,300,000	17	A	A	A	A
42	Surviani, SE, M.Si	39	S-2	PNS	3,500,000	5	A	A	CA	A
43	Hj. Asmawati	39	S-1	PNS	3,000,000	15	SA	A	A	CA
44	Hasma Fitri	39	SMA	PNS	2,500,000	15	SA	CA	CA	CA
45	A. Widyawati AB, S.Sos, MM	40	S-2	PNS	3,700,000	20	SA	SA	SA	A
46	Juliati	40	SD	Kader Posyandu	500,000	19	SA	SA	SA	SA
47	Nadjemia	41	SMA	PNS	2,000,000	8	CA	CA	CA	CA
48	Andi Rahmah	41	S-1	PNS	3,000,000	8	A	A	CA	A
49	A. Dewi Indrawati	41	S-1	PNS	4,781,000	16	SA	A	SA	CA
50	Nasma Ifmawati Syam, S.Sos	42	S-1	PNS	3,000,000	42	A	A	A	CA

51	Mardiana	42	S-1	PNS	4,200,000	8	A	CA	CA	CA
52	Nurlinda Yakub, SE	43	S-1	PNS	4,000,000	25	A	A	A	A
53	Subaedah	43	S-1	PNS	2,000,000	43	SA	A	A	CA
54	Hj. Buana, SE	43	S-1	PNS	3,500,000	10	SA	SA	SA	A
55	Aslinda, SH	44	S-1	PNS	4,000,000	22	CA	CA	CA	CA
56	A. Adriani	44	SMA	Staf Desa	1,250,000	20	CA	SA	CA	A
57	Rosmawati, SP	45	S-1	PNS	3,000,000	45	SA	SA	CA	A
58	Hj. Normah	45	S-1	PNS	2,700,000	45	CA	A	CA	A
59	Sukmawati	47	SMA	IRT	0	27	CA	A	SA	CA
60	Nur B Siang	48	SMA	Wiraswasta	2,500,000	48	A	A	A	CA
61	Sitti Sulaehana, SE	48	S-1	PNS	3,000,000	5	SA	SA	SA	A
62	Salminah, SE	48	S-1	PNS	3,000,000	8	SA	SA	SA	A
63	Dra. Nurhaeni	49	S-1	PNS	3,000,000	1	CA	SA	A	A
64	Salimang	49	SMK	PNS	2,500,000	49	A	A	A	CA
65	Saenab	49	SMP	IRT	0	17	CA	CA	CA	CA
66	A. Nurwati, S.Sos	49	S-1	PNS	4,000,000	49	SA	SA	SA	SA
67	A. Suryani Amiruddin	52	S-1	PNS	4,300,000	50	SA	SA	SA	SA
68	Hj. Sitti Hasnih	52	S-2	Guru	5,000,000	40	SA	SA	SA	SA
69	Hawiah	53	S-1	PNS	3,022,500	53	SA	CA	A	SA
70	Dra. Hj. Hasbiah	54	S-1	PNS	4,000,000	30	SA	SA	SA	SA
71	Hj. A. Suryani Syarif	54	S-1	Guru	5,000,000	12	SA	SA	SA	SA
72	Norlang	54	SMA	PNS	3,000,000	10	SA	A	A	A
73	Hj. Sitti Hasnih, S.Pd	56	S-1	Guru	4,500,000	24	A	A	SA	A
74	Hajrah	56	SMA	IRT	0	50	SA	A	A	A
75	Hj. Sumarni	58	S-1	PNS	3,000,000	17	CA	CA	CA	CA
76	Hj. Rabiah	58	S-1	Pensiunan	4,000,000	58	SA	SA	SA	SA
77	Suharli	60	D-3	Pensiunan	4,000,000	50	SA	SA	SA	A
78	Halijah BSW	60	S-1	Pensiunan	2,500,000	20	SA	SA	SA	A
79	A. Munawarah	60	SMA	Wiraswasta	2,000,000	50	SA	SA	SA	CA

DATA PENELITIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

No.	Nama	Umur (Th.)	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan (Rp)	Lama Ber mukim (Th.)	Pemberdayaan			
							Peran	Aksi	Motivasi	Tanggung Jawab
1	Resky Febriani	26	S-1	Honoror	1,250,000	5	CA	A	A	CA
2	Mirawati	26	SMA	Honoror	500,000	7	SA	SA	A	SA
3	Bulan Rahayu, SP	27	S-1	Bendahara UPK	1,300,000	6	SA	SA	SA	SA
4	Sitti Zulaeha	28	S-1	IRT	0	5	A	CA	A	A
5	Melisa	28	S-1	Honoror	1,250,000	5	SA	SA	A	SA
6	Nurjannah	28	SMA	Honoror	500,000	28	CA	CA	CA	CA
7	Dewi Jayati	29	SMA	Honoror	500,000	20	SA	SA	A	CA
8	Fajeriah	29	S-1	Honoror	500,000	7	A	CA	A	A
9	Wahyuni	30	SMA	Wiraswasta	2,500,000	30	TA	TA	TA	TA
10	St. Raehana	30	S-2	Guru	3,000,000	10	SA	SA	SA	SA
11	Ratnawati	32	SMA	Honoror	500,000	5	CA	CA	CA	CA
12	Diana	33	SMA	PNS	3,000,000	15	A	A	A	A
13	Sitti Hapsah	33	SMA	PNS	2,300,000	5	A	A	A	A
14	Nur Santi	33	SMA	PNS	2,500,000	33	A	CA	A	CA
15	Ernawati	33	SMA	PNS	2,300,000	10	CA	CA	A	A
16	Irmawati	33	SMA	PNS	2,300,000	33	A	A	A	A
17	Herawati	34	S-2	PNS	3,000,000	13	SA	SA	SA	SA
18	Sarwenda	34	S-1	PNS	2,750,000	15	A	A	A	A
19	Nurhaedah	34	S-1	PNS	2,300,000	10	CA	CA	A	A
20	Mariani	34	SMA	PNS	3,000,000	34	A	A	A	A
21	Hasriani	34	S-1	PNS	3,500,000	34	A	SA	SA	SA
22	Agustina	34	S-1	PNS	4,248,000	7	A	A	A	A
23	Hj. Nurhaenah	35	S-1	Honoror	1,250,000	25	SA	SA	A	A
24	Nuraeni , S.Pd	35	S-1	Guru	4,000,000	30	A	A	SA	SA
25	Nur Azizah	35	S-1	PNS	2,750,000	23	A	A	A	A
26	Nunung Hermawati	36	SMA	PNS	2,450,000	14	A	A	A	A
27	A. Vivi Elfira Nur	36	S-1	PNS	3,500,000	36	A	SA	SA	SA
28	Sulastri	36	SMA	PNS	3,000,000	20	A	A	SA	SA
29	Raodah Arsyad, SSTP, M.Si	36	S-2	PNS	3,855,000	15	A	A	SA	SA
30	Rahmawati	36	SMA	PNS	2,500,000	5	A	A	A	A
31	Irna Dewi, S.Pd	37	S-1	Guru	3,500,000	11	A	A	A	A
32	Rahmania, S.Sos	37	S-1	PNS	3,000,000	30	A	A	SA	SA
33	Wahyuni, S.Sos	37	S-1	PNS	4,000,000	10	A	A	A	A
34	Nadirah	38	SMA	PNS	2,780,000	38	A	A	A	A
35	Nursakti	38	SMA	PNS	2,500,000	20	A	A	A	A
36	A. Roswati, SE	38	S-1	PNS	3,500,000	5	A	A	A	SA
37	Hasria Puji Atma	38	SMA	PNS	3,000,000	38	A	SA	SA	SA
38	Susilawati	38	SMA	PNS	3,000,000	15	A	SA	SA	SA
39	Asrida Dadauleng, S.Pd	38	S-1	Guru	3,551,000	5	A	A	A	A
40	Nur Asmi	38	SMA	PNS	2,800,000	15	A	A	A	A
41	Adriati Nilasari	39	SMA	PNS	2,300,000	17	A	A	A	A
42	Surviani, SE, M.Si	39	S-2	PNS	3,500,000	5	A	SA	SA	CA
43	Hj. Asmawati	39	S-1	PNS	3,000,000	15	A	A	A	A
44	Hasma Fitri	39	SMA	PNS	2,500,000	15	CA	CA	A	A
45	A. Widyawati AB, S.Sos, MM	40	S-2	PNS	3,700,000	20	SA	SA	SA	SA
46	Julianti	40	SD	Kader Posyandu	500,000	19	A	SA	SA	SA
47	Nadjemia	41	SMA	PNS	2,000,000	8	CA	CA	CA	CA
48	Andi Rahmah	41	S-1	PNS	3,000,000	8	CA	CA	SA	SA
49	A. Dewi Indrawati	41	S-1	PNS	4,781,000	16	A	A	SA	A
50	Nasma Ifmawati Syam, S.Sos	42	S-1	PNS	3,000,000	42	A	CA	CA	CA

51	Mardiana	42	S-1	PNS	4,200,000	8	CA	TA	TA	CA
52	Nurlinda Yakub, SE	43	S-1	PNS	4,000,000	25	A	A	A	A
53	Subaedah	43	S-1	PNS	2,000,000	43	SA	A	A	SA
54	Hj. Buana, SE	43	S-1	PNS	3,500,000	10	SA	SA	SA	SA
55	Aslinda, SH	44	S-1	PNS	4,000,000	22	CA	CA	CA	CA
56	A. Adriani	44	SMA	StafDesa	1,250,000	20	A	CA	CA	CA
57	Rosmawati, SP	45	S-1	PNS	3,000,000	45	CA	A	SA	CA
58	Hj. Normah	45	S-1	PNS	2,700,000	45	CA	SA	SA	SA
59	Sukmawati	47	SMA	IRT	0	27	A	SA	CA	A
60	Nur B Siang	48	SMA	Wiraswasta	2,500,000	48	CA	CA	A	A
61	Sitti Sulaehana, SE	48	S-1	PNS	3,000,000	5	SA	A	SA	SA
62	Salminah, SE	48	S-1	PNS	3,000,000	8	SA	A	SA	SA
63	Dra. Nurhaeni	49	S-1	PNS	3,000,000	1	A	A	SA	A
64	Salimang	49	SMK	PNS	2,500,000	49	SA	CA	A	CA
65	Saenab	49	SMP	IRT	0	17	CA	CA	CA	CA
66	A. Nurwati, S.Sos	49	S-1	PNS	4,000,000	49	SA	SA	SA	SA
67	A. Suryani Amiruddin	52	S-1	PNS	4,300,000	50	SA	A	A	A
68	Hj. Sitti Hasnih	52	S-2	Guru	5,000,000	40	SA	SA	SA	SA
69	Hawiah	53	S-1	PNS	3,022,500	53	SA	A	A	SA
70	Dra. Hj. Hasbiah	54	S-1	PNS	4,000,000	30	SA	SA	SA	SA
71	Hj. A. Suryani Syarif	54	S-1	Guru	5,000,000	12	SA	SA	SA	SA
72	Norlang	54	SMA	PNS	3,000,000	10	A	A	A	A
73	Hj. Sitti Hasnih, S.Pd	56	S-1	Guru	4,500,000	24	A	A	SA	A
74	Hajrah	56	SMA	IRT	0	50	A	CA	A	A
75	Hj. Sumarni	58	S-1	PNS	3,000,000	17	CA	CA	CA	CA
76	Hj. Rabiah	58	S-1	Pensiunan	4,000,000	58	A	A	A	A
77	Suharli	60	D-3	Pensiunan	4,000,000	50	SA	A	SA	SA
78	Halijah BSW	60	S-1	Pensiunan	2,500,000	20	SA	A	SA	SA
79	A. Munawarah	60	SMA	Wiraswasta	2,000,000	50	CA	CA	A	A



HASIL PENELITIAN KONTRIBUSI PEREMPUAN

No.	NAMA	Kontribusi				Total Skor
		Ide	Dana	Tenaga	Sarana	
1	Resky Febriani	2	3	3	2	10
2	Mirawati	2	1	3	2	8
3	Bulan Rahayu, SP	1	1	1	1	4
4	Sitti Zulaeha	2	1	2	2	7
5	Melisa	3	1	3	1	8
6	Nurjannah	2	1	2	1	6
7	Dewi Jayati	1	1	4	3	9
8	Fajeriah	3	1	3	2	9
9	Wahyuni	1	1	1	1	4
10	St. Raehana	4	2	3	2	11
11	Ratnawati	1	1	2	1	5
12	Diana	2	1	3	2	8
13	Sitti Hapsah	2	2	3	2	9
14	Nur Santi	2	2	2	1	7
15	Ernawati	2	1	2	2	7
16	Irmawati	3	2	3	2	10
17	Herawati	4	1	3	3	11
18	Sarwenda	2	1	2	2	7
19	Nurhaedah	3	1	3	2	9
20	Mariani	2	2	2	2	8
21	Hasriani	3	1	4	3	11
22	Agustina	2	2	2	2	8
23	Hj. Nurhaenah	4	3	3	3	13
24	Nuraeni , S.Pd	4	2	3	3	12
25	Nur Azizah	3	1	3	2	9
26	Nunung Hermawati	3	2	2	2	9
27	A. Vivi Elfira Nur	3	1	4	3	11
28	Sulastri	3	2	3	2	10
29	Raodah Arsyad, SSTP, M.Si	3	2	3	2	10
30	Rahmawati	2	1	2	1	6
31	Irna Dewi, S.Pd	2	1	2	2	7
32	Rahmania, S.Sos	3	2	3	3	11
33	Wahyuni, S.Sos	3	2	3	2	10
34	Nadirah	3	2	3	3	11
35	Nursakti	3	2	3	1	9
36	A. Roswati, SE	3	1	3	2	9
37	Hasria Puji Atma	1	1	2	2	6
38	Susilawati	3	1	4	3	11
39	Asrida Dadauleng, S.Pd	2	1	2	2	7
40	Nur Asmi	2	1	2	2	7
41	Adriati Nilasari	2	1	3	2	8
42	Surviani, SE, M.Si	4	3	3	2	12
43	Hj. Asmawati	3	1	3	1	8
44	Hasma Fitri	2	1	3	3	9
45	A. Widyawati AB, S.Sos, MM	4	2	3	2	11

46	Juliati	3	3	2	2	10
47	Nadjemia	2	2	2	2	8
48	Andi Rahmah	3	1	3	1	8
49	A. Dewi Indrawati	3	2	2	1	8
50	Nasma Ifmawati Syam, S.Sos	2	2	3	3	10
51	Mardiana	3	3	3	3	12
52	Nurlinda Yakub, SE	3	3	3	3	12
53	Subaedah	2	1	4	3	10
54	Hj. Buana, SE	3	2	2	2	9
55	Aslinda, SH	2	1	2	3	8
56	A. Adriani	4	1	4	2	11
57	Rosmawati, SP	3	3	3	3	12
58	Hj. Normah	3	3	2	3	11
59	Sukmawati	3	1	1	2	7
60	Nur B Siang	3	2	3	1	9
61	Sitti Sulaehana, SE	4	2	3	3	12
62	Salminah, SE	4	2	3	3	12
63	Dra. Nurhaeni	3	1	3	3	10
64	Salimang	3	2	3	4	12
65	Saenab	2	2	2	2	8
66	A. Nurwati, S.Sos	4	3	4	3	14
67	A. Suryani Amiruddin	4	2	3	2	11
68	Hj. Sitti Hasnih	4	2	4	3	13
69	Hawiah	3	1	3	1	8
70	Dra. Hj. Hasbiah	4	3	4	3	14
71	Hj. A. Suryani Syarif	4	3	4	4	15
72	Norlang	3	2	3	2	10
73	Hj. Sitti Hasnih, S.Pd	3	3	4	3	13
74	Hajrah	3	2	3	2	10
75	Hj. Sumarni	1	1	2	2	6
76	Hj. Rabiah	4	2	2	2	10
77	Suharli	4	2	3	2	11
78	Halijah BSW	3	1	3	2	9
79	A. Munawarah	4	1	3	2	10

HASIL PENELITIAN PENGORGANISASIAN PEREMPUAN

No.	NAMA	Pengorganisasian				Total Skor
		Model	Struktur	Fungsi	Unsur	
1	Resky Febriani	2	3	3	2	10
2	Mirawati	4	4	4	4	16
3	Bulan Rahayu, SP	3	4	4	3	14
4	Sitti Zulaeha	3	3	3	3	12
5	Melisa	4	3	3	2	12
6	Nurjannah	3	2	2	2	9
7	Dewi Jayati	3	3	4	3	13
8	Fajeriah	3	3	3	2	11
9	Wahyuni	1	3	3	3	10
10	St. Raehana	4	4	4	3	15
11	Ratnawati	3	3	3	1	10
12	Diana	2	3	4	3	12
13	Sitti Hapsah	4	4	4	3	15
14	Nur Santi	3	3	3	3	12
15	Ernawati	4	3	3	2	12
16	Irmawati	4	3	3	3	13
17	Herawati	4	4	4	4	16
18	Sarwenda	3	3	3	3	12
19	Nurhaedah	4	3	3	3	13
20	Mariani	3	3	3	3	12
21	Hasriani	2	4	3	3	12
22	Agustina	2	2	2	2	8
23	Hj. Nurhaenah	3	3	4	4	14
24	Nuraeni , S.Pd	4	4	4	3	15
25	Nur Azizah	4	3	3	3	13
26	Nunung Hermawati	4	3	3	2	12
27	A. Vivi Elfira Nur	2	4	3	3	12
28	Sulastri	4	4	4	3	15
29	Raodah Arsyad, SSTP, M.Si	4	4	4	4	16
30	Rahmawati	4	3	3	2	12
31	Irna Dewi, S.Pd	4	3	3	2	12
32	Rahmania, S.Sos	4	4	4	3	15
33	Wahyuni, S.Sos	4	3	3	3	13
34	Nadirah	4	3	3	3	13
35	Nursakti	4	3	3	3	13
36	A. Roswati, SE	2	3	2	2	9
37	Hasria Puji Atma	4	4	4	2	14
38	Susilawati	2	4	3	3	12
39	Asrida Dadauleng, S.Pd	4	4	4	3	15
40	Nur Asmi	4	3	3	2	12
41	Adriati Nilasari	3	3	3	3	12
42	Surviani, SE, M.Si	3	3	2	3	11
43	Hj. Asmawati	4	3	3	2	12
44	Hasma Fitri	4	2	2	2	10
45	A. Widyawati AB, S.Sos, MM	4	4	4	3	15

46	Juliati	4	4	4	4	16
47	Nadjemia	2	2	2	2	8
48	Andi Rahmah	3	3	2	3	11
49	A. Dewi Indrawati	4	3	4	2	13
50	Nasma Ifmawati Syam, S.Sos	3	3	3	2	11
51	Mardiana	3	2	2	2	9
52	Nurlinda Yakub, SE	3	3	3	3	12
53	Subaedah	4	3	3	2	12
54	Hj. Buana, SE	4	4	4	3	15
55	Aslinda, SH	2	2	2	2	8
56	A. Adriani	2	4	2	3	11
57	Rosmawati, SP	4	4	2	3	13
58	Hj. Normah	2	3	2	3	10
59	Sukmawati	2	3	4	2	11
60	Nur B Siang	3	3	3	2	11
61	Sitti Sulaehana, SE	4	4	4	3	15
62	Salminah, SE	4	4	4	3	15
63	Dra. Nurhaeni	2	4	3	3	12
64	Salimang	3	3	3	2	11
65	Saenab	2	2	2	2	8
66	A. Nurwati, S.Sos	4	4	4	4	16
67	A. Suryani Amiruddin	4	4	4	4	16
68	Hj. Sitti Hasnih	4	4	4	4	16
69	Hawiah	4	2	3	4	13
70	Dra. Hj. Hasbiah	4	4	4	4	16
71	Hj. A. Suryani Syarif	4	4	4	4	16
72	Norlang	4	3	3	3	13
73	Hj. Sitti Hasnih, S.Pd	3	3	4	3	13
74	Hajrah	4	3	3	3	13
75	Hj. Sumarni	2	2	2	2	8
76	Hj. Rabiah	4	4	4	4	16
77	Suharli	4	4	4	3	15
78	Halijah BSW	4	4	4	3	15
79	A. Munawarah	4	4	4	2	14

HASIL PENELITIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

No.	NAMA	Pemberdayaan				Total Skor
		Peran	Aksi	Motivasi	Tanggung Jawab	
1	Resky Febriani	2	3	3	2	10
2	Mirawati	4	4	3	4	15
3	Bulan Rahayu, SP	4	4	4	4	16
4	Sitti Zulaeha	3	2	3	3	11
5	Melisa	4	4	3	4	15
6	Nurjannah	2	2	2	2	8
7	Dewi Jayati	4	4	3	2	13
8	Fajeriah	3	2	3	3	11
9	Wahyuni	1	1	1	1	4
10	St. Rachana	4	4	4	4	16
11	Ratnawati	2	2	2	2	8
12	Diana	3	3	3	3	12
13	Sitti Hapsah	3	3	3	3	12
14	Nur Santi	3	2	3	2	10
15	Ernawati	2	2	3	3	10
16	Irmawati	3	3	3	3	12
17	Herawati	4	4	4	4	16
18	Sarwenda	3	3	3	3	12
19	Nurhaedah	2	2	3	3	10
20	Mariani	3	3	3	3	12
21	Hasriani	3	4	4	4	15
22	Agustina	3	3	3	3	12
23	Hj. Nurhaenah	4	4	3	3	14
24	Nuraeni , S.Pd	3	3	4	4	14
25	Nur Azizah	3	3	3	3	12
26	Nunung Hermawati	3	3	3	3	12
27	A. Vivi Elfira Nur	3	4	4	4	15
28	Sulastri	3	3	4	4	14
29	Raodah Arsyad, SSTP, M.Si	3	3	4	4	14
30	Rahmawati	3	3	3	3	12
31	Irna Dewi, S.Pd	3	3	3	3	12
32	Rahmania, S.Sos	3	3	4	4	14
33	Wahyuni, S.Sos	3	3	3	3	12
34	Nadirah	3	3	3	3	12
35	Nursakti	3	3	3	3	12
36	A. Roswati, SE	3	3	3	4	13
37	Hasria Puji Atma	3	4	4	4	15
38	Susilawati	3	4	4	4	15
39	Asrida Dadauleng, S.Pd	3	3	3	3	12
40	Nur Asmi	3	3	3	3	12
41	Adriati Nilasari	3	3	3	3	12
42	Surviani, SE, M.Si	3	4	4	2	13
43	Hj. Asmawati	3	3	3	3	12
44	Hasma Fitri	2	2	3	3	10
45	A. Widyawati AB, S.Sos, MM	4	4	4	4	16

46	Juliati	3	4	4	4	15
47	Nadjemia	2	2	2	2	8
48	Andi Rahmah	2	2	4	4	12
49	A. Dewi Indrawati	3	3	4	3	13
50	Nasma Ifmawati Syam, S.Sos	3	2	2	2	9
51	Mardiana	2	1	1	2	6
52	Nurlinda Yakub, SE	3	3	3	3	12
53	Subaedah	4	3	3	4	14
54	Hj. Buana, SE	4	4	4	4	16
55	Aslinda, SH	2	2	2	2	8
56	A. Adriani	3	2	2	2	9
57	Rosmawati, SP	2	3	4	2	11
58	Hj. Normah	2	4	4	4	14
59	Sukmawati	3	4	2	3	12
60	Nur B Siang	2	2	3	3	10
61	Sitti Sulaehana, SE	4	3	4	4	15
62	Salminah, SE	4	3	4	4	15
63	Dra. Nurhaeni	3	3	4	3	13
64	Salimang	4	2	3	2	11
65	Saenab	2	2	2	2	8
66	A. Nurwati, S.Sos	4	4	4	4	16
67	A. Suryani Amiruddin	4	3	3	3	13
68	Hj. Sitti Hasnih	4	4	4	4	16
69	Hawiah	4	3	3	4	14
70	Dra. Hj. Hasbiah	4	4	4	4	16
71	Hj. A. Suryani Syarif	4	4	4	4	16
72	Norlang	3	3	3	3	12
73	Hj. Sitti Hasnih, S.Pd	3	3	4	3	13
74	Hajrah	3	2	3	3	11
75	Hj. Sumarni	2	2	2	2	8
76	Hj. Rabiah	3	3	3	3	12
77	Suharli	4	3	4	4	15
78	Halijah BSW	4	3	4	4	15
79	A. Munawarah	2	2	3	3	10

HASIL SWOT KEKUATAN (S)

NO.	NAMA	PENILAIAN KONDISI SAAT INI				
		INDI. I	INDI. II	INDI. III	INDI. IV	INDI. V
1	Resky Febriani	6	6	6	6	6
2	Mirawati	5	5	5	5	6
3	Bulan Rahayu, SP	5	6	6	6	6
4	Sitti Zulaeha	3	2	5	3	5
5	Melisa	6	6	6	6	6
6	Nurjannah	5	5	5	5	6
7	Dewi Jayati	5	6	5	5	6
8	Fajeriah	5	5	5	5	6
9	Wahyuni	1	1	1	1	1
10	St. Raehana	6	6	6	6	6
11	Ratnawati	6	6	6	5	6
12	Diana	5	5	5	5	5
13	Sitti Hapsah	5	5	5	3	5
14	Nur Santi	6	6	5	6	5
15	Ernawati	5	6	6	6	6
16	Irmawati	5	4	4	3	3
17	Herawati	5	5	5	3	4
18	Sarwenda	6	5	5	5	5
19	Nurhaedah	5	5	5	5	5
20	Mariani	3	3	6	6	6
21	Hasriani	5	6	6	6	5
22	Agustina	6	5	5	4	5
23	Hj. Nurhaenah	1	1	1	1	1
24	Nuraeni , S.Pd	6	5	6	6	6
25	Nur Azizah	5	5	5	3	5
26	Nunung Hermawati	5	6	6	6	6
27	A. Vivi Elfira Nur	5	6	6	6	5
28	Sulastri	6	5	5	5	5
29	Raodah Arsyad, SSTP, M.Si	6	6	6	5	6
30	Rahmawati	5	5	5	3	5
31	Irna Dewi, S.Pd	6	5	5	4	5
32	Rahmania, S.Sos	6	6	6	6	6
33	Wahyuni, S.Sos	6	5	5	5	5
34	Nadirah	5	5	5	4	4
35	Nursakti	5	6	5	6	5
36	A. Roswati, SE	6	6	6	5	6
37	Hasria Puji Atma	5	6	5	6	5
38	Susilawati	4	6	6	5	6
39	Asrida Dadauleng, S.Pd	6	5	5	5	5
40	Nur Asmi	6	5	6	4	5

41	Adriati Nilasari	5	5	5	5	5
42	Surviani, SE, M.Si	5	5	4	3	5
43	Hj. Asmawati	6	6	5	6	6
44	Hasma Fitri	5	5	5	4	5
45	A. Widyawati AB, S.Sos, MM	6	6	6	6	6
46	Juliati	6	6	6	6	6
47	Nadjemia	5	5	5	6	6
48	Andi Rahmah	6	5	6	5	6
49	A. Dewi Indrawati	6	6	6	2	5
50	Nasma Ifmawati Syam, S.Sos	6	5	6	6	5
51	Mardiana	3	5	3	5	6
52	Nurlinda Yakub, SE	5	5	5	6	6
53	Subaedah	6	5	6	6	5
54	Hj. Buana, SE	6	6	6	4	6
55	Aslinda, SH	3	3	3	3	3
56	A. Adriani	3	5	6	4	6
57	Rosmawati, SP	5	6	5	6	6
58	Hj. Normah	2	1	4	2	2
59	Sukmawati	6	6	6	3	4
60	Nur B Siang	5	4	5	3	4
61	Sitti Sulaehana, SE	5	5	5	3	4
62	Salminah, SE	6	5	5	3	3
63	Dra. Nurhaeni	5	6	5	6	6
64	Salimang	5	6	3	6	5
65	Saenab	3	3	3	3	3
66	A. Nurwati, S.Sos	6	6	6	4	6
67	A. Suryani Amiruddin	6	6	6	5	6
68	Hj. Sitti Hasnih	6	6	6	3	5
69	Hawiah	6	6	6	6	6
70	Dra. Hj. Hasbiah	6	6	6	6	6
71	Hj. A. Suryani Syarif	6	6	6	5	6
72	Norlang	5	5	5	3	4
73	Hj. Sitti Hasnih, S.Pd	5	5	5	5	5
74	Hajrah	4	5	5	4	4
75	Hj. Sumarni	4	4	4	2	2
76	Hj. Rabiah	6	6	6	4	6
77	Suharli	5	5	5	5	5
78	Halijah BSW	6	5	5	5	5
79	A. Munawarah	5	5	5	4	5
	Jumlah	546	404	407	363	400
	Rata-Rata	6.91	5.11	5.15	4.59	5.06

HASIL SWOT KELEMAHAN (W)

NO.	NAMA	PENILAIAN KONDISI SAAT INI				
		INDI. I	INDI. II	INDI. III	INDI. IV	INDI. V
1	Resky Febriani	6	1	1	6	1
2	Mirnawati	5	3	4	3	3
3	Bulan Rahayu, SP	4	3	3	6	6
4	Sitti Zulaeha	3	3	3	3	3
5	Melisa	6	1	1	6	1
6	Nurjannah	5	3	4	3	3
7	Dewi Jayati	5	6	5	6	5
8	Fajeriah	5	3	4	3	3
9	Wahyuni	1	1	1	1	1
10	St. Raehana	6	6	6	6	6
11	Ratnawati	3	4	3	4	5
12	Diana	5	2	3	3	3
13	Sitti Hapsah	3	3	3	2	3
14	Nur Santi	5	5	3	2	5
15	Ernawati	4	3	3	6	6
16	Irmawati	3	3	3	1	2
17	Herawati	3	3	3	1	2
18	Sarwenda	6	6	6	4	4
19	Nurhaedah	5	2	3	3	3
20	Mariani	4	4	3	4	4
21	Hasriani	4	2	3	5	3
22	Agustina	3	3	3	2	3
23	Hj. Nurhaenah	6	1	1	1	1
24	Nuraeni , S.Pd	5	4	3	6	6
25	Nur Azizah	3	3	3	2	3
26	Nunung Hermawati	4	3	3	6	6
27	A. Vivi Elfira Nur	4	2	3	5	3
28	Sulastri	4	4	3	2	2
29	Raodah Arsyad, SSTP,	3	3	3	2	3
30	Rahmawati	3	3	3	2	2
31	Irna Dewi, S.Pd	5	5	5	1	4
32	Rahmania, S.Sos	5	5	5	2	5
33	Wahyuni, S.Sos	5	5	5	6	5
34	Nadirah	4	4	4	3	4
35	Nursakti	4	4	4	5	4
36	A. Roswati, SE	6	5	5	6	5
37	Hasria Puji Atma	3	3	3	4	4
38	Susilawati	6	3	3	2	5
39	Asrida Dadauleng, S.Pd	4	4	4	3	4
40	Nur Asmi	4	3	4	2	3

41	Adriati Nilasari	3	3	3	3	3
42	Surviani, SE, M.Si	5	3	4	5	6
43	Hj. Asmawati	5	5	5	4	5
44	Hasma Fitri	5	4	4	5	5
45	A. Widyawati AB, S.Sos	6	6	6	6	6
46	Juliati	5	4	3	5	5
47	Nadjemia	5	5	5	4	4
48	Andi Rahmah	5	6	3	5	3
49	A. Dewi Indrawati	6	6	6	3	5
50	Nasma Ifmawati Syam, S	4	2	4	2	5
51	Mardiana	5	3	2	5	5
52	Nurlinda Yakub, SE	6	6	6	5	4
53	Subaedah	5	5	5	6	4
54	Hj. Buana, SE	5	5	5	5	5
55	Aslinda, SH	4	3	3	3	3
56	A. Adriani	3	1	2	6	1
57	Rosmawati, SP	3	2	3	2	1
58	Hj. Normah	2	2	2	2	1
59	Sukmawati	2	3	4	2	5
60	Nur B Siang	4	4	4	4	3
61	Sitti Sulaehana, SE	5	4	5	3	4
62	Salminah, SE	5	4	5	3	4
63	Dra. Nurhaeni	5	1	1	3	5
64	Salimang	4	2	5	6	5
65	Saenab	3	3	3	3	3
66	A. Nurwati, S.Sos	6	6	6	4	6
67	A. Suryani Amiruddin	6	6	6	4	6
68	Hj. Sitti Hasnih	6	6	6	3	5
69	Hawiah	6	1	1	6	1
70	Dra. Hj. Hasbiah	6	6	6	5	6
71	Hj. A. Suryani Syarif	6	6	6	5	6
72	Norlang	2	3	3	1	2
73	Hj. Sitti Hasnih, S.Pd	5	5	5	5	5
74	Hajrah	6	6	6	5	5
75	Hj. Sumarni	4	4	4	4	4
76	Hj. Rabiah	6	6	6	4	6
77	Suharli	4	5	5	3	5
78	Halijah BSW	6	6	6	4	5
79	A. Munawarah	6	6	6	4	5
	Jumlah	357	443	305	297	311
	Rata-Rata	4.52	5.61	3.86	3.76	3.94

HASIL SWOT PELUANG (O)

NO.	NAMA	PENILAIAN KONDISI SAAT INI				
		INDI. I	INDI. II	INDI. III	INDI. IV	INDI. V
1	Resky Febriani	6	6	6	6	6
2	Mirawati	6	5	6	6	5
3	Bulan Rahayu, SP	5	6	6	5	6
4	Sitti Zulaeha	4	3	3	3	3
5	Melisa	6	6	6	6	6
6	Nurjannah	6	5	6	6	5
7	Dewi Jayati	6	4	4	5	5
8	Fajeriah	6	5	6	6	5
9	Wahyuni	1	1	1	1	1
10	St. Raehana	6	6	6	6	6
11	Ratnawati	4	4	5	5	5
12	Diana	4	5	3	5	6
13	Sitti Hapsah	6	5	5	4	4
14	Nur Santi	5	4	5	5	5
15	Ernawati	5	6	6	5	6
16	Irmawati	5	4	3	3	4
17	Herawati	5	5	4	4	4
18	Sarwenda	6	5	6	5	6
19	Nurhaedah	4	5	3	5	6
20	Mariani	5	5	5	4	4
21	Hasriani	5	6	5	5	5
22	Agustina	6	5	5	5	5
23	Hj. Nurhaenah	6	6	6	6	6
24	Nuraeni , S.Pd	6	5	6	6	6
25	Nur Azizah	6	5	5	4	4
26	Nunung Hermawati	5	6	6	5	6
27	A. Vivi Elfira Nur	5	6	5	5	5
28	Sulastri	6	5	5	5	5
29	Raodah Arsyad, SSTP,	6	6	6	6	6
30	Rahmawati	6	5	5	5	5
31	Irna Dewi, S.Pd	6	5	5	5	6
32	Rahmania, S.Sos	6	5	5	5	5
33	Wahyuni, S.Sos	6	6	6	5	5
34	Nadirah	3	3	3	3	4
35	Nursakti	5	5	4	4	4
36	A. Roswati, SE	5	6	6	6	6
37	Hasria Puji Atma	5	5	5	5	5
38	Susilawati	5	3	5	6	6
39	Asrida Dadauleng, S.Pd	6	6	6	5	6
40	Nur Asmi	6	5	5	5	5

41	Adriati Nilasari	5	5	5	5	5
42	Surviani, SE, M.Si	6	5	5	6	5
43	Hj. Asmawati	6	6	6	5	5
44	Hasma Fitri	5	5	5	4	4
45	A. Widyawati AB, S.Sos,	6	6	6	6	6
46	Juliati	6	5	6	6	6
47	Nadjemia	5	5	5	4	4
48	Andi Rahmah	4	3	3	5	5
49	A. Dewi Indrawati	6	6	6	6	6
50	Nasma Ifmawati Syam, S	6	2	2	3	3
51	Mardiana	5	5	5	6	5
52	Nurlinda Yakub, SE	3	5	6	6	5
53	Subaedah	6	5	5	5	5
54	Hj. Buana, SE	6	5	5	5	5
55	Aslinda, SH	3	3	3	3	3
56	A. Adriani	3	3	5	3	3
57	Rosmawati, SP	5	3	6	6	6
58	Hj. Normah	3	2	2	3	2
59	Sukmawati	5	6	6	5	2
60	Nur B Siang	5	4	4	4	4
61	Sitti Sulaehana, SE	6	5	5	4	4
62	Salminah, SE	6	5	5	5	5
63	Dra. Nurhaeni	6	5	6	5	6
64	Salimang	4	6	3	3	6
65	Saenab	3	3	3	3	3
66	A. Nurwati, S.Sos	6	6	6	6	6
67	A. Suryani Amiruddin	6	6	6	6	6
68	Hj. Sitti Hasnih	6	6	6	6	6
69	Hawiah	6	6	6	6	6
70	Dra. Hj. Hasbiah	6	6	6	6	6
71	Hj. A. Suryani Syarif	6	6	6	6	6
72	Norlang	4	3	3	4	3
73	Hj. Sitti Hasnih, S.Pd	5	5	5	5	5
74	Hajrah	4	4	4	4	4
75	Hj. Sumarni	5	4	4	4	4
76	Hj. Rabiah	6	6	6	6	6
77	Suharli	5	4	5	4	4
78	Halijah BSW	6	4	4	5	5
79	A. Munawarah	5	5	4	4	5
	Jumlah	411	530	388	384	388
	Rata-Rata	5.20	6.71	4.91	4.86	4.91

HASIL SWOT ANCAMAN (T)

NO.	NAMA	PENILAIAN KONDISI SAAT INI				
		INDI. I	INDI. II	INDI. III	INDI. IV	INDI. V
1	Resky Febriani	6	6	1	2	2
2	Mirnawati	4	4	3	3	1
3	Bulan Rahayu, SP	2	3	3	2	1
4	Sitti Zulaeha	3	3	3	3	3
5	Melisa	1	1	1	1	1
6	Nurjannah	4	4	3	3	1
7	Dewi Jayati	3	3	2	2	2
8	Fajeriah	4	4	3	3	1
9	Wahyuni	1	1	1	1	1
10	St. Raehana	6	6	6	6	6
11	Ratnawati	5	1	1	2	2
12	Diana	4	4	2	3	5
13	Sitti Hapsah	3	3	2	2	2
14	Nur Santi	3	5	5	3	2
15	Ernawati	2	3	3	2	1
16	Irmawati	6	5	4	3	2
17	Herawati	3	3	2	2	2
18	Sarwenda	5	4	5	4	5
19	Nurhaedah	4	4	2	3	5
20	Mariani	4	4	5	5	5
21	Hasriani	5	1	1	2	1
22	Agustina	3	3	2	2	2
23	Hj. Nurhaenah	1	1	1	1	1
24	Nuraeni , S.Pd	1	1	2	2	1
25	Nur Azizah	3	3	2	2	2
26	Nunung Hermawati	2	3	3	2	1
27	A. Vivi Elfira Nur	5	1	1	2	1
28	Sulastri	4	4	3	3	3
29	Raodah Arsyad, SSTP, M.Si	3	3	3	3	3
30	Rahmawati	2	2	2	2	2
31	Irna Dewi, S.Pd	5	5	4	4	4
32	Rahmania, S.Sos	3	3	2	2	1
33	Wahyuni, S.Sos	5	5	6	6	6
34	Nadirah	5	4	4	5	3
35	Nursakti	4	4	5	5	6
36	A. Roswati, SE	4	5	5	5	5
37	Hasria Puji Atma	3	3	2	2	2
38	Susilawati	2	4	1	3	2
39	Asrida Dadauleng, S.Pd	3	3	2	2	2
40	Nur Asmi	4	4	3	3	2

41	Adriati Nilasari	4	4	3	3	3
42	Surviani, SE, M.Si	5	5	2	2	1
43	Hj. Asmawati	4	4	3	3	2
44	Hasma Fitri	5	5	4	4	3
45	A. Widyawati AB, S.Sos, MM	5	5	5	5	5
46	Juliati	6	5	2	2	1
47	Nadjemia	4	4	3	3	2
48	Andi Rahmah	6	5	2	2	2
49	A. Dewi Indrawati	5	5	4	4	4
50	Nasma Ifmawati Syam, S.Sos	5	3	5	4	2
51	Mardiana	2	2	2	2	2
52	Nurlinda Yakub, SE	2	2	1	1	1
53	Subaedah	4	4	5	5	6
54	Hj. Buana, SE	5	5	5	5	5
55	Aslinda, SH	3	3	3	3	3
56	A. Adriani	1	1	1	2	1
57	Rosmawati, SP	2	1	2	2	2
58	Hj. Normah	5	5	2	4	5
59	Sukmawati	2	1	2	1	2
60	Nur B Siang	3	4	3	4	3
61	Sitti Sulaehana, SE	5	5	3	3	2
62	Salminah, SE	5	5	5	5	5
63	Dra. Nurhaeni	3	2	1	2	1
64	Salimang	3	5	1	1	3
65	Saenab	3	3	3	3	3
66	A. Nurwati, S.Sos	5	5	4	4	4
67	A. Suryani Amiruddin	5	5	4	4	4
68	Hj. Sitti Hasnih	5	5	4	4	4
69	Hawiah	1	1	1	1	1
70	Dra. Hj. Hasbiah	6	6	6	6	4
71	Hj. A. Suryani Syarif	5	5	5	4	4
72	Norlang	4	3	3	4	4
73	Hj. Sitti Hasnih, S.Pd	5	5	5	5	5
74	Hajrah	3	3	3	3	3
75	Hj. Sumarni	2	2	2	2	2
76	Hj. Rabiah	5	5	4	4	4
77	Suharli	3	3	4	4	5
78	Halijah BSW	6	5	4	3	2
79	A. Munawarah	3	3	3	3	3
	Jumlah	295	282	235	239	218
	Rata-Rata	3.73	3.57	2.97	3.03	2.76

HASIL SWOT KEKUATAN (S)

NO.	NAMA	PENILAIAN URGENSI				
		INDI. I	INDI. II	INDI. III	INDI. IV	INDI. V
1	Resky Febriani	3	3	4	4	4
2	Mirnawati	3	3	4	3	4
3	Bulan Rahayu, SP	3	4	3	3	4
4	Sitti Zulaeha	3	2	3	3	3
5	Melisa	3	3	4	4	4
6	Tuti Damayanti	3	4	4	4	4
7	Nurjannah	3	3	4	3	4
8	Dewi Jayati	3	4	3	4	3
9	Fajeriah	3	4	4	4	4
10	St. Raehana	3	3	3	3	3
11	Ratnawati	3	3	3	3	3
12	Diana	3	3	3	3	3
13	Sitti Hapsah	3	3	3	1	3
14	Nur Santi	3	3	2	3	3
15	Ernawati	3	3	4	4	4
16	Irmawati	4	4	4	3	3
17	Herawati	3	3	4	3	4
18	Sarwenda	3	3	3	4	4
19	Nurhaedah	3	4	3	4	3
20	Mariani	3	3	4	4	4
21	Hasriani	3	4	4	4	4
22	Agustina	4	3	3	2	3
23	Hj. Nurhaenah	4	4	4	4	4
24	Nuraeni , S.Pd	4	3	3	2	3
25	Nur Azizah	4	4	4	3	3
26	Nunung Hermawati	3	3	4	4	4
27	A. Vivi Elfira Nur	3	4	4	4	4
28	Sulastri	4	3	3	3	3
29	Raodah Arsyad, SSTP, M.Si	4	4	4	3	4
30	Rahmawati	3	3	3	1	3
31	Irna Dewi, S.Pd	4	3	3	2	3
32	Rahmania, S.Sos	4	4	4	4	4
33	Wahyuni, S.Sos	4	3	3	3	3
34	Nadirah	4	4	4	3	4
35	Nursakti	3	4	3	4	3
36	A. Roswati, SE	4	4	4	4	4
37	Hasria Puji Atma	3	3	3	3	3
38	Susilawati	2	3	4	3	4
39	Asrida Dadauleng, S.Pd	4	3	3	3	3
40	Nur Asmi	4	3	4	2	3

41	Adriati Nilasari	3	3	3	3	3
42	Surviani, SE, M.Si	3	3	4	4	4
43	Hj. Asmawati	4	4	3	4	4
44	Hasma Fitri	3	3	3	2	3
45	A. Widyawati AB, S.Sos, MM	4	4	4	4	4
46	Juliati	3	3	4	4	3
47	Nadjemia	3	3	3	4	4
48	Andi Rahmah	3	3	4	3	4
49	A. Dewi Indrawati	4	4	4	1	3
50	Nasma Ifmawati Syam, S.Sos	4	3	4	4	4
51	Mardiana	2	3	2	3	4
52	Nurlinda Yakub, SE	3	3	3	4	4
53	Subaedah	4	3	4	4	3
54	Hj. Buana, SE	4	4	4	2	4
55	Aslinda, SH	3	3	3	3	3
56	A. Adriani	3	4	4	3	4
57	Rosmawati, SP	3	4	3	4	4
58	Hj. Normah	2	1	4	2	2
59	Sukmawati	4	4	4	1	2
60	Nur B Siang	3	3	4	4	4
61	Sitti Sulaehana, SE	3	3	3	1	2
62	Salminah, SE	4	3	3	1	1
63	Dra. Nurhaeni	3	3	4	3	3
64	Salimang	1	3	2	4	2
65	Saenab	3	3	3	3	3
66	A. Nurwati, S.Sos	4	4	4	2	4
67	A. Suryani Amiruddin	4	4	4	2	4
68	Hj. Sitti Hasnih	3	3	2	2	3
69	Hawiah	3	3	4	4	4
70	Dra. Hj. Hasbiah	4	4	4	4	4
71	Hj. A. Suryani Syarif	4	4	4	3	4
72	Norlang	3	4	4	3	4
73	Hj. Sitti Hasnih, S.Pd	3	3	3	4	4
74	Hajrah	3	4	4	3	3
75	Hj. Sumarni	2	2	2	2	2
76	Hj. Rabiah	4	4	4	2	4
77	Suharli	2	2	2	3	3
78	Halijah BSW	3	3	3	4	4
79	A. Munawarah	3	4	4	3	4
	Jumlah	257	262	274	244	272
	Rata-Rata	3.25	3.32	3.47	3.09	3.44

HASIL SWOT KELEMAHAN (W)

NO.	NAMA	PENILAIAN URGENSI				
		INDI. I	INDI. II	INDI. III	INDI. IV	INDI. V
1	Resky Febriani	4	3	3	4	3
2	Mirnawati	4	3	2	3	2
3	Bulan Rahayu, SP	3	2	2	4	4
4	Sitti Zulaeha	3	3	3	3	3
5	Melisa	4	3	3	4	3
6	Tuti Damayanti	3	3	4	4	4
7	Nurjannah	4	3	2	3	2
8	Dewi Jayati	3	4	3	4	3
9	Fajeriah	3	3	4	4	4
10	St. Raehana	3	3	3	3	3
11	Ratnawati	3	3	3	3	3
12	Diana	3	2	3	3	3
13	Sitti Hapsah	3	3	3	2	3
14	Nur Santi	3	3	2	3	3
15	Ernawati	4	3	3	4	3
16	Irmawati	4	4	4	3	3
17	Herawati	4	3	2	3	2
18	Sarwenda	4	3	3	4	3
19	Nurhaedah	3	4	3	4	3
20	Mariani	3	3	2	3	3
21	Hasriani	3	2	2	3	2
22	Agustina	3	3	3	2	3
23	Hj. Nurhaenah	3	4	4	4	1
24	Nuraeni , S.Pd	4	3	3	2	3
25	Nur Azizah	4	4	4	3	4
26	Nunung Hermawati	3	3	2	3	3
27	A. Vivi Elfira Nur	3	2	2	3	2
28	Sulastri	3	3	2	1	1
29	Raodah Arsyad, SSTP, M.Si	3	3	3	2	3
30	Rahmawati	3	3	3	2	2
31	Irna Dewi, S.Pd	3	3	3	1	2
32	Rahmania, S.Sos	3	3	3	1	3
33	Wahyuni, S.Sos	3	3	3	3	3
34	Nadirah	3	3	3	2	3
35	Nursakti	2	2	2	3	2
36	A. Roswati, SE	3	3	4	4	3
37	Hasria Puji Atma	2	2	3	3	2
38	Susilawati	3	3	3	4	4
39	Asrida Dadauleng, S.Pd	2	2	2	1	2
40	Nur Asmi	2	1	2	1	2

41	Adriati Nilasari	3	3	3	3	3
42	Surviani, SE, M.Si	3	1	2	3	4
43	Hj. Asmawati	4	4	4	3	4
44	Hasma Fitri	3	2	2	3	3
45	A. Widyawati AB, S.Sos, MM	4	4	4	4	4
46	Juliati	4	2	1	4	3
47	Nadjemia	3	3	3	2	2
48	Andi Rahmah	2	2	3	2	3
49	A. Dewi Indrawati	4	4	4	1	3
50	Nasma Ifmawati Syam, S.Sos	2	3	4	4	4
51	Mardiana	3	2	1	3	3
52	Nurlinda Yakub, SE	4	4	4	3	2
53	Subaedah	3	3	3	4	2
54	Hj. Buana, SE	3	3	3	3	3
55	Aslinda, SH	3	3	3	3	3
56	A. Adriani	3	1	1	4	1
57	Rosmawati, SP	2	1	2	1	2
58	Hj. Normah	2	2	2	2	1
59	Sukmawati	1	2	3	1	4
60	Nur B Siang	3	3	3	2	3
61	Sitti Sulaehana, SE	3	2	3	1	2
62	Salminah, SE	3	2	3	1	2
63	Dra. Nurhaeni	3	1	1	3	3
64	Salimang	3	2	3	4	2
65	Saenab	3	3	3	3	3
66	A. Nurwati, S.Sos	4	4	4	2	4
67	A. Suryani Amiruddin	4	4	4	2	4
68	Hj. Sitti Hasnih	2	2	2	1	2
69	Hawiah	4	3	3	4	3
70	Dra. Hj. Hasbiah	3	3	2	2	2
71	Hj. A. Suryani Syarif	2	2	2	3	4
72	Norlang	2	2	1	1	2
73	Hj. Sitti Hasnih, S.Pd	3	3	3	4	4
74	Hajrah	3	3	3	2	2
75	Hj. Sumarni	2	2	2	2	2
76	Hj. Rabiah	4	4	4	2	4
77	Suharli	2	2	2	1	1
78	Halijah BSW	4	4	3	3	3
79	A. Munawarah	2	2	2	1	1
	Jumlah	241	218	218	213	217
	Rata-Rata	3.05	2.76	2.76	2.70	2.75

HASIL SWOT PELUANG (O)

NO.	NAMA	PENILAIAN URGENSI				
		INDI. I	INDI. II	INDI. III	INDI. IV	INDI. V
1	Resky Febriani	4	4	3	3	4
2	Mirnawati	4	3	4	3	3
3	Bulan Rahayu, SP	3	4	4	3	4
4	Sitti Zulaeha	4	3	3	3	3
5	Melisa	4	4	3	3	4
6	Tuti Damayanti	3	3	3	3	3
7	Nurjannah	4	4	3	3	3
8	Dewi Jayati	4	3	4	3	4
9	Fajeriah	3	3	3	3	3
10	St. Raehana	4	4	4	4	4
11	Ratnawati	3	3	3	3	3
12	Diana	3	3	3	3	4
13	Sitti Hapsah	4	3	3	2	2
14	Nur Santi	3	2	3	2	3
15	Ernawati	4	4	3	3	4
16	Irmawati	3	3	3	2	2
17	Herawati	4	4	3	3	3
18	Sarwenda	4	4	3	3	3
19	Nurhaedah	4	3	4	3	4
20	Mariani	3	3	3	2	2
21	Hasriani	3	4	3	3	3
22	Agustina	4	3	3	3	3
23	Hj. Nurhaenah	4	4	4	4	4
24	Nuraeni , S.Pd	4	4	3	3	3
25	Nur Azizah	4	4	3	4	3
26	Nunung Hermawati	3	3	3	2	2
27	A. Vivi Elfira Nur	3	4	3	3	3
28	Sulastri	4	3	3	3	3
29	Raodah Arsyad, SSTP, M.Si	4	4	4	4	4
30	Rahmawati	4	3	3	3	3
31	Irna Dewi, S.Pd	4	3	3	3	4
32	Rahmania, S.Sos	4	3	3	3	3
33	Wahyuni, S.Sos	4	4	4	3	3
34	Nadirah	4	4	4	4	4
35	Nursakti	3	3	2	2	2
36	A. Roswati, SE	3	4	4	4	4
37	Hasria Puji Atma	3	3	3	3	3
38	Susilawati	2	3	3	4	4
39	Asrida Dadauleng, S.Pd	4	4	4	3	4
40	Nur Asmi	4	3	3	3	3

41	Adriati Nilasari	3	3	3	3	3
42	Surviani, SE, M.Si	3	4	3	4	3
43	Hj. Asmawati	4	4	4	3	3
44	Hasma Fitri	3	3	3	2	2
45	A. Widyawati AB, S.Sos, MM	4	4	4	4	4
46	Juliati	3	3	3	4	4
47	Nadjemia	3	3	3	2	2
48	Andi Rahmah	2	3	2	3	3
49	A. Dewi Indrawati	4	4	4	4	4
50	Nasma Ifmawati Syam, S.Sos	3	2	3	2	3
51	Mardiana	3	3	3	4	3
52	Nurlinda Yakub, SE	2	3	4	4	3
53	Subaedah	4	3	3	3	3
54	Hj. Buana, SE	4	3	3	3	3
55	Aslinda, SH	3	3	3	3	3
56	A. Adriani	2	3	4	4	3
57	Rosmawati, SP	3	1	4	4	4
58	Hj. Normah	3	2	2	3	2
59	Sukmawati	3	4	4	3	1
60	Nur B Siang	3	3	3	2	2
61	Sitti Sulaehana, SE	4	3	3	2	2
62	Salminah, SE	4	3	3	3	3
63	Dra. Nurhaeni	3	3	3	3	4
64	Salimang	3	4	2	2	4
65	Saenab	3	3	3	3	3
66	A. Nurwati, S.Sos	4	4	4	4	4
67	A. Suryani Amiruddin	4	4	4	4	4
68	Hj. Sitti Hasnih	3	3	3	3	3
69	Hawiah	4	4	3	3	4
70	Dra. Hj. Hasbiah	4	4	4	4	4
71	Hj. A. Suryani Syarif	4	4	4	4	4
72	Norlang	4	4	4	3	3
73	Hj. Sitti Hasnih, S.Pd	3	3	3	3	3
74	Hajrah	3	3	3	2	2
75	Hj. Sumarni	2	2	2	2	2
76	Hj. Rabiah	4	4	4	4	4
77	Suharli	3	3	2	2	3
78	Halijah BSW	3	3	2	2	3
79	A. Munawarah	2	3	3	4	4
	Jumlah	270	262	254	242	251
	Rata-Rata	3.42	3.32	3.22	3.06	3.18

HASIL SWOT ANCAMAN (T)

NO.	NAMA	PENILAIAN URGENSI				
		INDI. I	INDI. II	INDI. III	INDI. IV	INDI. V
1	Resky Febriani	4	3	3	2	2
2	Mirnawati	3	3	3	3	4
3	Bulan Rahayu, SP	2	2	2	1	1
4	Sitti Zulaeha	3	3	3	3	3
5	Melisa	1	1	1	1	1
6	Tuti Damayanti	2	2	2	2	2
7	Nurjannah	3	2	2	2	2
8	Dewi Jayati	4	3	4	3	4
9	Fajeriah	2	2	2	2	2
10	St. Raehana	3	3	3	3	3
11	Ratnawati	3	4	3	3	3
12	Diana	4	4	4	3	3
13	Sitti Hapsah	3	3	2	2	2
14	Nur Santi	3	2	3	2	3
15	Ernawati	1	1	1	1	1
16	Irmawati	2	2	2	2	3
17	Herawati	3	2	2	2	2
18	Sarwenda	3	3	2	2	2
19	Nurhaedah	4	3	4	3	4
20	Mariani	2	2	3	3	3
21	Hasriani	3	4	3	2	3
22	Agustina	3	3	2	2	2
23	Hj. Nurhaenah	1	1	1	1	1
24	Nuraeni , S.Pd	4	4	2	2	1
25	Nur Azizah	4	4	3	3	3
26	Nunung Hermawati	2	2	3	3	3
27	A. Vivi Elfira Nur	3	4	3	2	1
28	Sulastri	3	3	2	2	2
29	Raodah Arsyad, SSTP, M.Si	3	3	3	3	3
30	Rahmawati	2	2	2	2	2
31	Irna Dewi, S.Pd	3	3	2	2	2
32	Rahmania, S.Sos	3	3	2	2	1
33	Wahyuni, S.Sos	3	3	4	4	4
34	Nadirah	3	3	3	3	3
35	Nursakti	2	2	3	3	4
36	A. Roswati, SE	3	3	3	3	3
37	Hasria Puji Atma	2	2	2	2	2
38	Susilawati	4	3	4	3	3
39	Asrida Dadauleng, S.Pd	2	2	1	1	1
40	Nur Asmi	3	3	2	2	1

41	Adriati Nilasari	3	3	3	3	3
42	Surviani, SE, M.Si	3	3	2	2	1
43	Hj. Asmawati	3	3	2	2	1
44	Hasma Fitri	3	3	2	2	1
45	A. Widyawati AB, S.Sos, MM	3	3	3	3	3
46	Juliati	2	1	3	1	1
47	Nadjemia	3	3	2	2	1
48	Andi Rahmah	3	3	2	2	2
49	A. Dewi Indrawati	3	3	2	2	2
50	Nasma Ifmawati Syam, S.Sos	2	2	3	3	3
51	Mardiana	2	2	2	2	2
52	Nurlinda Yakub, SE	4	4	3	3	3
53	Subaedah	2	2	3	3	4
54	Hj. Buana, SE	3	3	3	3	3
55	Aslinda, SH	3	3	3	3	3
56	A. Adriani	4	1	2	2	1
57	Rosmawati, SP	2	1	2	2	2
58	Hj. Normah	3	3	1	2	3
59	Sukmawati	2	1	2	1	2
60	Nur B Siang	4	4	3	3	3
61	Sitti Sulaehana, SE	3	3	2	2	1
62	Salminah, SE	3	3	3	3	3
63	Dra. Nurhaeni	3	2	1	2	2
64	Salimang	3	3	1	1	3
65	Saenab	3	3	3	3	3
66	A. Nurwati, S.Sos	3	3	2	2	2
67	A. Suryani Amiruddin	3	3	2	2	2
68	Hj. Sitti Hasnih	3	3	2	2	2
69	Hawiah	1	1	1	1	1
70	Dra. Hj. Hasbiah	2	2	3	3	3
71	Hj. A. Suryani Syarif	2	2	2	2	2
72	Norlang	3	3	4	4	4
73	Hj. Sitti Hasnih, S.Pd	3	3	3	3	3
74	Hajrah	2	2	2	2	2
75	Hj. Sumarni	3	3	3	3	3
76	Hj. Rabiah	3	3	2	2	2
77	Suharli	2	2	3	3	4
78	Halijah BSW	3	3	3	2	2
79	A. Munawarah	1	1	2	2	2
	Jumlah	217	206	193	182	185
	Rata-Rata	2.75	2.61	2.44	2.30	2.34

**REKAPITULASI USULAN KEGIATAN MUSRENBANGDES
KECAMATAN MANDAI TAHUN ANGGARAN 2015**

BIDANG : SARANA DAN PRASARANA (INFRASTRUKTUR)

NO.	NAMA KEGIATAN	DESA/KELURAHAN
1	Pembuatan jalan setapak/paving blok jalan ke pekuburan	Hasanuddin
2	Pembuatan jalan setapak/paving blok jalan SD Angkasa Pura	Hasanuddin
3	Pembuatan jalan setapak/paving blok RT 01 (belakang masjid)	Hasanuddin
4	Pembuatan/perbaikan drainase Kadieng	Hasanuddin
5	Pembuatan/perbaikan drainase Lanud	Hasanuddin
6	Pembuatan/perbaikan drainase Kampung Baru	Hasanuddin
7	Perbaikan jalan paving blok jalan menuju Siratul Mustaqim	Bontoa
8	Paving blok dan duiker jalan menuju rumah Imam Lingk. Tete Batu	Bontoa
9	Duiker dan drainase perapatan jalan depan BRI Hasanuddin	Bontoa
10	Pembuatan talud bahu jalan tua Kompleks Perhubungan - Kadieng	Bontoa
11	Pembangunan/penambahan ruangan Kantor Kelurahan Bontoa	Bontoa
12	Penggantian tegel lantai Kantor Kelurahan Bontoa	Bontoa
13	Paving blok lorong samping rumah KepalaLingk. Sambotara tembus jl. BTN Papan Lestari	Bontoa
14	Paving blok jalan Kampung Pallangga	Bontoa
15	MCK jalan Kampung Pallangga	Bontoa
16	Paving blok dan duiker jalan Anggrek BTN Griya Maros Indah	Bontoa
17	Paving blok samping pagar Bandara Lama - Rumah Pak Idris	Bontoa
18	Rehabilitasi kantor desa, pagar, dan pekarangan	Baji Mangngai
19	Tanggul penahan air yang masuk ke Bandara	Baji Mangngai
20	Pembuatan drainase dari samping rumah Dg. Badu' sampai Dg. Sattu	Baji Mangngai
21	Pembuatan MCK Dusun Borongloe	Bonto Mate'ne
22	Bedah Rumah Dusun Borongloe	Bonto Mate'ne
23	Pengaspalan jalan desa depan rumah kepala desa	Bonto Mate'ne
24	Pengecoran jalan ke Kampung Malloe	Bonto Mate'ne
25	Pembuatan Tugu Batas Desa	Bonto Mate'ne
26	Pengecoran jalan ke Kampung Tebbange	Bonto Mate'ne
27	Paving Blok dan pembuatan jembatan ke Kampung Borongkirasa	Bonto Mate'ne
28	Pembangunan drainase Perumnas Bentenge	Bonto Mate'ne
29	Pembangunan duiker Perumnas Bentenge	Bonto Mate'ne
30	Pengadaan sumur kantor desa	Bonto Mate'ne
31	Bedah rumah Dusun Bentenge	Bonto Mate'ne
32	Paving blok ke Kampung Tarangkoang	Bonto Mate'ne
33	Drainase Kompleks BTN Griya Maros Indah	Bonto Mate'ne
34	Pengadaan gorong-gorong BTN Griya Maros Indah	Bonto Mate'ne
35	Paving blok BTN Griya Maros Indah	Bonto Mate'ne
36	Rehab. Pintu gerbang BTN Griya Maros Indah	Bonto Mate'ne
37	Paving blok dan drainase dari Barambang ke Dalango	Bonto Mate'ne
38	Pembuatan sumur umum/MCK	Bonto Mate'ne
39	Bedah Rumah Dusun Barambang	Bonto Mate'ne
40	Pembuatan jalan dari Poros Barambang ke BTN Wesabbe	Bonto Mate'ne

41	Pembuatan jalan dari Barambang ke Kampung Barambang	Bonto Mate'ne
42	Pembuatan jalan ke Bontorea	Bonto Mate'ne
43	Penimbunan bahu jalan Griya Maros Indah	Bonto Mate'ne
44	Pengerasan/pengecoran jalan ke Kampung Bontorea	Bonto Mate'ne
45	Perluasan got pembuangan air di samping masjid tua	Bonto Mate'ne
46	Pembuangan air di Lorong I, kiri kanan jalan	Bonto Mate'ne
47	Bedah Rumah Dusun Bontoramba	Bonto Mate'ne
48	Pengerasan jalan tani dari belakang SMP sampai perumahan	Bonto Mate'ne
49	Paving blok di RT 03 dari depan SD	Bonto Mate'ne
50	Pembuatan drainase depan SMP Neg. 16 Mandai	Bonto Mate'ne
51	Pembuatan jalan dari Bontoramba ke Batua	Bonto Mate'ne
52	Pembuatan jembatan jalan dari Bontoramba ke Batua	Bonto Mate'ne
53	Pembuatan drainase/selokan jalan Poros Kariango	Bonto Mate'ne
54	Pemasangan paving blok	Tenrigangkae
55	Pembebasan lahan dan pembuatan DAM	Tenrigangkae
56	Saluran air pembuangan	Tenrigangkae
57	Pembuatan jalan lorong	Tenrigangkae
58	Pembuatan pagar	Tenrigangkae
59	Pemasangan paving blok	Tenrigangkae
60	Pengerukan sungai Dusun Mangento	Pattontongan
61	Pekerjaan talud jalan Poros Dusun Mangento-Dusun Bangun Polea	Pattontongan
62	Pengerukan Sungai Kampung Borong	Pattontongan
63	Pembuatan saluran tersier	Pattontongan
64	Pembuatan DAM	Pattontongan
65	Pekerjaan talud jalan Poros Dusun Pattontongan-Dusun Bangun Polea	Pattontongan
66	Perintisan jalan Kampung Borong (jalur tengah)	Pattontongan
67	Pengerukan sungai Dusun Salu	Pattontongan

**REKAPITULASI USULAN KEGIATAN MUSRENBANGDES
KECAMATAN MANDAI TAHUN ANGGARAN 2015**

BIDANG : EKONOMI

NO.	NAMA KEGIATAN	DESA/KELURAHAN
1	Pelatihan tenaga produktif wirausaha tani perempuan	Hasanuddin
2	Pengadaan traktor untuk kelompok tani	Baji Mangngai
3	Penataan penjualan bunga sepanjang jalan pekuburan	Baji Mangngai
4	Pembuatan jalan tani di Kampung Malloe	Bonto Mate'ne
5	Pengadaan sumur bor dan mesin air untuk persawahan	Bonto Mate'ne
6	Pengecoran jalan tani dari belakang kantor desa ke Borongloe	Bonto Mate'ne
7	Pembuatan sanggar tani	Bonto Mate'ne
8	Pembuatan saluran air tersier di persawahan	Bonto Mate'ne
9	Pengadaan traktor untuk kelompok tani	Bonto Mate'ne
10	Pelatihan untuk kelompok wanita tani	Bonto Mate'ne
11	Membuat produk menuju ekonomi kreatif bagi kelompok wanita tani	Bonto Mate'ne
12	Bantuan Ternak Itik, Kambing keluarga miskin	Bonto Mate'ne
13	Bantuan tanaman bibit buah pertanian	Bonto Mate'ne
14	Pembuatan Sanggar Tani	Bonto Mate'ne
15	Pembuatan irigasi pertanian	Bonto Mate'ne
16	Pengadaan alat panduan pertanian	Bonto Mate'ne
17	Pengadaan traktor	Tenrigangkae
18	Tenda petak	Tenrigangkae
19	Pembuatan jalan tani	Tenrigangkae
20	Pelatihan UKM (Usaha Kecil Menengah)	Tenrigangkae
21	Pelatihan ekonomi kreatif	Tenrigangkae
22	Saluran irigasi	Tenrigangkae
23	Pembuatan jalan tani	Tenrigangkae
24	Pondasi irigasi Padaelo-Tinggito	Tenrigangkae
25	Pengadaan mesin rumput	Tenrigangkae
26	Pondasi irigasi Dusun Padaelo	Tenrigangkae
27	Irigasi	Pattontongan
28	Pembuatan irigasi dari Batas Desa Tenrigangkae ke Desa Pattontongan Dusun Mangento	Pattontongan
29	Pembuatan irigasi dusun berbatasan Dusun Mangento	Pattontongan
30	Pembuatan pintu air berbatasan dengan Dusun Mangento	Pattontongan

**REKAPITULASI USULAN KEGIATAN MUSRENBANGDES
KECAMATAN MANDAI TAHUN ANGGARAN 2015**

BIDANG : SOSIAL BUDAYA

NO.	NAMA KEGIATAN	DESA/KELURAHAN
1	Pembuatan jalan setapak/paving blok halaman SD 99	Hasanuddin
2	Pengadaan bangunan TK	Hasanuddin
3	Pengadaan MCK dan SAB halaman SD 99	Hasanuddin
4	Pembuatan jalan setapak/paving blok halaman SD Angkasa Pura	Hasanuddin
5	Perbaikan dan pengadaan peralatan Posyandu Jl. Bouraq RT 05	Hasanuddin
6	Pembuatan jalan setapak/paving blok Lapangan SD Angkasa 2	Hasanuddin
7	Pengadaan bangunan ruang kelas baru SD Angkasa 3	Hasanuddin
8	Sosialisasi Bina Keluarga	Hasanuddin
9	Pengadaan Mobiler Kader Posyandu	Hasanuddin
10	Pengadaan insentif Kader Posyandu	Hasanuddin
11	Pemb. Pagar dan ruang kelas SD No. 103 Inpres Hasanuddin	Bontoa
12	Pengadaan pakaian dinas aparat desa	Baji Mangngai
13	Pakaian seragam petugas kebersihan kantor desa	Baji Mangngai
14	Pengadaan pakaian dinas BPD	Baji Mangngai
15	Pagar TPA/TK Tamarunang	Baji Mangngai
16	Pelatihan komputer	Baji Mangngai
17	Paving blok pekarangan SDN No. 222 Pao-Pao	Baji Mangngai
18	Kanopi/ruang istirahat orang tua murid PAUD Babul Jannah	Baji Mangngai
19	Peningkatan/pelatihan kualitas SDM produktif	Baji Mangngai
20	Pemasangan paving blok halaman Posyandu	Baji Mangngai
21	Perlengkapan Posyandu	Baji Mangngai
22	Pengadaan tempat sampah Posyandu	Baji Mangngai
23	PMT(Pemberian Makanan Tambahan)	Baji Mangngai
24	Pengadaan alat permainan edukatif (APE)	Baji Mangngai
25	Pengadaan motor dinas kepala dusun	Baji Mangngai
26	Pengadaan motor dinas Ketua BPD	Baji Mangngai
27	Pembuatan poskamling	Bonto Mate'ne
28	Bantuan beasiswa anak sekolah	Bonto Mate'ne
29	Pembangunan Play Group	Bonto Mate'ne
30	Pengadaan bak / kontainer sampah	Bonto Mate'ne
31	Pembangunan posyandu	Bonto Mate'ne
32	Beasiswa anak sekolah	Bonto Mate'ne
33	Pengadaan perlengkapan inventaris RT. 06 (kursi, meja, lampu penerangan)	Bonto Mate'ne
34	Pengadaan bak sampah BTN Griya Maros Indah	Bonto Mate'ne
35	Pembuatan TPA	Bonto Mate'ne
36	Pembuatan pagar SD Barambang	Bonto Mate'ne
37	Pembangunan play group/TK	Bonto Mate'ne
38	Pembinaan generasi muda	Bonto Mate'ne
39	Pelatihan tata rias	Bonto Mate'ne
40	Pelatihan jahit menjahit lanjutan	Bonto Mate'ne
41	Pelatihan tata boga	Bonto Mate'ne
42	Bantuan beasiswa	Bonto Mate'ne
43	Pengadaan bak sampah BTN Maccopa Indah	Bonto Mate'ne
44	Pengadaan menara masjid BTN Griya Maros Indah	Bonto Mate'ne
45	Pembangunan poskamling Griya Maros Indah	Bonto Mate'ne
46	Pembuatan pagar sekolah SMP Bontoramba	Bonto Mate'ne
47	Bantuan rehab. Masjid Bontoramba	Bonto Mate'ne
48	Beasiswa anak sekolah	Bonto Mate'ne
49	Paving blok Lapangan Upacara SMP Neg. 16 Mandai	Bonto Mate'ne
50	Pembuatan WC siswa	Bonto Mate'ne
51	Paving blok Lapangan Upacara SD Neg. 234 Bontoramba	Bonto Mate'ne
52	Pembuatan pagar Poskesdes	Bonto Mate'ne
53	Pengadaan lemari ATK PKK	Tenrigangkae
54	Jasa Kader	Tenrigangkae
55	Seragam Kader	Tenrigangkae
56	Seragam Pengurus PKK	Tenrigangkae
57	Pos ronda	Tenrigangkae
58	Rehab.pagar SDN dan TK 228 Inpres Dusun Salu	Pattontongan

**REKAPITULASI USULAN KEGIATAN MUSRENBANGDES
KECAMATAN MANDAI TAHUN ANGGARAN 2015**

BIDANG : SUMBER DAYA ALAM

NO.	NAMA KEGIATAN	DESA/KELURAHAN
1	Penerangan/lampu jalan Kadieng	Hasanuddin
2	Penerangan/lampu jalan Kampung Baru	Hasanuddin
3	Penerangan/lampu jalan Padang Sessere	Hasanuddin
4	Lampu jalan di 4 (empat) lingkungan	Bontoa
5	Pengadaan sumur bor Poskesdes	Baji Mangngai
6	Pengadaan pot bunga untuk Posyandu	Baji Mangngai
7	Pengadaan lampu jalan Dusun Borongloe	Bonto Mate'ne
8	Pengadaan lampu jalan Dusun Barambang	Bonto Mate'ne
9	Pengadaan PDAM dan listrik di Poskesdes Bontoramba	Bonto Mate'ne
10	Pompa air	Tenrigangkae
11	Pengadaan sumur bor	Tenrigangkae
12	Pengadaan penghisap air	Tenrigangkae
13	Pembuatan sumur bor	Pattontongan